

Laporan

KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya

2025



**Interim
Triwulan 1**



Semua menjadi tanggung jawab kami



Ali Yudhi H., SE., Apt., MM

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 Tahun 2025 Balai Besar POM (BBPOM) di Palangka Raya dapat terselesaikan dengan baik sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pelayanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan ikhtisar yang menjelaskan dan menggambarkan secara terperinci, lengkap dan sistematis capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan 1 Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja melalui informasi kinerja yang terukur. Dalam laporan kinerja BBPOM Di Palangka Raya Triwulan 1 Tahun 2025 tertuang indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja serta evaluasi dan analisis yang memadai tentang penyebab keberhasilan atau kegagalan yang dapat menggambarkan pengukuran kinerja serta realisasi anggaran serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi baik internal maupun eksternal untuk perbaikan kinerja selanjutnya.



Pengukuran kinerja merupakan salah satu wujud penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi kegiatan terhadap target capaian kinerja, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dan anggaran disertai analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut serta rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja, untuk peningkatan kinerja BBPOM di Palangka Raya pada triwulan selanjutnya serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Palangka Raya, 30 April 2025
Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya



Ali Yudhi H., S.F., Apt., M.M

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dokumen Renstra BBPOM di Palangka Raya periode 2025-2029 telah ditetapkan tujuan strategis untuk periode 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi. Berikut adalah tujuan BBPOM di Palangka Raya untuk periode 2025-2029:

1. Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan, telah dirumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi
3. Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
4. Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
6. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
8. Layanan publik UPT yang prima
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 mengacu pada Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2025-2029 dengan melaksanakan 22 kegiatan untuk mencapai 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 **belum berhasil tercapai** dengan Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya sebesar **99.43%** dengan Kriteria **BAIK**. Dari 25 indikator kinerja, 19 indikator kinerja dapat diukur pada triwulan I, dan 6 indikator kinerja diukur pada akhir tahun. Dari 19 indikator kinerja yang diukur, 3 indikator kinerja dikecualikan. Enam belas indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 114.61% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
2. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 116.11% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 109.02% dengan kriteria Sangat Baik.
4. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder **berhasil tercapai** dengan capaian 113.14% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
5. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **belum berhasil tercapai** dengan capaian 0% dengan kriteria Kurang.

6. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 110.71% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
7. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 112.74% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
8. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
9. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **berhasil tercapai** dengan capaian 107.91% dengan kriteria Sangat Baik.
10. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 103.03% dengan kriteria Sangat Baik
11. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
12. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
13. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.
14. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan **berhasil tercapai** dengan capaian 114.05% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
15. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 185.17% dengan kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
16. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar **berhasil tercapai** dengan capaian 100% dengan kriteria Baik.

Tiga indikator kinerja yang dikecualikan pada pengukuran triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
2. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Enam indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT.
3. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
4. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM.
5. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
6. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Palangka Raya pada triwulan 1 tahun 2025, dari 9 sasaran kegiatan, 7 sasaran kegiatan dapat diukur, dan 2 sasaran kegiatan diukur pada akhir tahun. Tujuh sasaran kegiatan yang dapat diukur, 6 kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 1 kegiatan belum berhasil mencapai target. Tujuh sasaran kegiatan yang dapat diukur adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Pertama, Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **belum berhasil tercapai**, dengan capaian 96.75% yang diukur dengan 11 indikator. Satu indikator diukur pada akhir tahun, 10 indikator dapat

- diukur. Dari 10 indikator yang dapat diukur, 1 indikator dapat dicapai dengan kriteria sangat baik, 5 indikator dapat dicapai dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 1 indikator tidak dapat dicapai dengan kriteria kurang, dan 3 indikator dikecualikan pada pengukuran triwulan I.
2. Sasaran Kegiatan Kedua, Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi **berhasil tercapai** dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.
 3. Sasaran Kegiatan Ketiga, Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 107.91% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria sangat baik.
 4. Sasaran Kegiatan Keempat, Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 100.76% yang diukur dengan 4 indikator. Dari 4 indikator, 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat baik, dan 3 indikator tercapai dengan kriteria baik.
 5. Sasaran Kegiatan Kelima, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu **berhasil tercapai** dengan capaian 114.05% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
 6. Sasaran Kegiatan Keenam, Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT **berhasil tercapai** dengan capaian 185.17% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
 7. Sasaran Kegiatan Ketujuh, Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif **berhasil tercapai** dengan capaian 100.00% yang diukur dengan 1 indikator dengan kriteria baik.

Dua Sasaran Kegiatan yang diukur pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Layanan Publik UPT yang prima.
2. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025, pagu yang dikelola pada triwulan I Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola menjadi Rp 14.035.291.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan 1 tahun 2025 adalah Rp 2.625.820.346,- dengan capaian 11.87% dari pagu awal atau 18.71% dari pagu efektif yang di kelola BBPOM Palangka Raya. Dengan rincian belanja pegawai Rp 1.332.126.142,- belanja bahan, Rp 1.074.194.204,- dan belanja modal Rp 219.500.000,-. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi secara keseluruhan Tingkat Efisiensi BBPOM Palangka Raya adalah 1.15 yang berarti output kegiatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan dan capaiannya 0.15 dengan kriteria 100% efisien.

Tahun 2025 sebagai tahun awal periode Renstra 2025-2029 dimana didalamnya terdapat perubahan dibandingkan dengan Renstra 202-2024 pada sisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis maupun indikatornya. Pada awal tahun 2025 dari sisi anggaran mengalami dinamika dimulai dengan terbitnya Surat Sekretaris Utama BPOM tentang Penyampaian Data Pembolokiran dalam rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan Non Quick Win Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025 diikuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025. Pada akhir triwulan I terdapat revisi anggaran berdasarkan Surat Sekretaris utama tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 terhadap blokir belanja barang dan belanja modal. Atas dinamika pengelolaan anggaran tersebut yang mempengaruhi pencapaian

sasaran kegiatan, terhadap beberapa tantangan yang dihadapi dan kelemahan yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya, beberapa upaya yang telah dilaksanakan adalah efisiensi dalam pengelolaan operasional perkantoran, dilakukannya pengaturan ulang titik lokus pengawasan Obat dan Makanan, dimanfaatkannya teknologi dalam pelayanan publik dikembangkan **Inovasi Smart Laura** di Mall Pelayanan Publik yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota, dilakukannya perubahan sistem kerja pegawai antara lain pembagian sistem kerja WFO dan WFH, dan pemanfaatan *co-working space*, serta dalam semua aspek operasional dilakukan digitalisasi salah satunya penciptaan dokumen elektronik (*paperless*). Dalam pelaksanaannya upaya ini efektif dan efisien berhasil mengatasi kendala yang dihadapi atas terbatasnya jumlah anggaran dan sumber daya manusia, hal ini dapat dibuktikan dari 16 indikator kinerja yang dapat diukur pada triwulan I, 15 indikator kinerja berhasil tercapai dan 1 indikator kinerja belum berhasil tercapai dengan kriteria kurang. Dari 15 indikator kinerja yang berhasil tercapai, 7 indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 3 indikator dengan kriteria sangat baik dan 5 indikator dengan kriteria baik.

Palangka Raya 30 April 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di
Palangka Raya



Ali Yudhi Hartanto

- Pelayanan Sertifikasi
- Layanan Informasi dan Pengaduan
- Pemeriksaan Sarana Rutin
- Sampling dan Pengujian Rutin
- Operasi Penindakan
- Pengujian Pihak Ketiga
- Serta Ketatausahaan



Highlight Kinerja

2b. Inovasi dalam Manajemen Kinerja

Inovasi



- ✓ PERENCANAAN
- ✓ PELAPORAN DAN EVALUASI KINERJA
- ✓ KEUANGAN
- ✓ LAPKIN DAN LAPTAH PMPZI
- MANAJEMEN RESIKO
- SISTEM MANAJEMEN MUTU TERINTEGRASI
- SAKIP
- ✓ MATERI DAN PERATURAN
- SKP 2025



Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut Capaian Kinerja

- Analisa Capaian Target Kinerja
- Identifikasi Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Peningkatan / Penurunan Kinerja
- Rekomendasi / Perbaikan
- Arahan Pimpinan
- Rencana Aksi



NKO

Nilai Kinerja Organisasi

MONELAKU menjadi inovasi penggerak / motor akuntabilitas, terhadap individu yang mendukung pencapaian kinerja organisasi diberikan apresiasi melalui **Inovasi BINTANG KINERJA**



Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di triwulan 1 tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO senilai 99,43% dari hasil rata-rata 16 Indikator kinerja yang dapat dinilai capaiannya di triwulan 1 tahun 2025 dengan predikat Baik.



**INOVASI
BINTANG KINERJA**



**Pemberian
Reward and
Punishment
Kinerja
tingkat
individu**

Highlight Kinerja

3. Kolaborasi dengan Lintas Sektor Januari 2025



BPOM PALANGKA RAYA LAKUKAN PENGAWALAN KEAMANAN PANGAN BAGI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KOTA PALANGKA RAYA



Sabtu, 11 Januari 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan Siap Saji dan Food Handling kepada 47 (empat puluh tujuh) orang anggota SPPG di Jl. Bukit Kenanga, Kota Palangka Raya. Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi Hartanto hadir untuk memberikan pengarahan dan membuka kegiatan secara resmi. Ali Yudhi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para anggota dengan prinsip-prinsip keamanan pangan dan bagaimana menangani pangan siap saji dengan benar



DUKUNG PENUH UMKM PANGAN OLAHAN NAIK KELAS, BBPOM DI PALANGKA RAYA SIAP BERKOLABORASI DENGAN RUMAH BUMN PALANGKA RAYA



Rumah BUMN merupakan wadah untuk memberdayakan UMKM dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diinisiasi oleh BUMN dan ditujukan sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. Berawal dari kesamaan Visi dalam membantu UMKM terutama UMKM Pangan Olahan di Palangka Raya untuk naik kelas, Rumah BUMN Palangka Raya melakukan kunjungan ke kantor BBPOM di Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2025. Agenda kunjungan Rumah BUMN tersebut antara lain persiapan Kerjasama (MoU) dengan BBPOM di Palangka Raya dalam hal pengembangan UMKM di wilayah Palangka Raya.

Februari 2025



BBPOM DI PALANGKA RAYA DAN POS INDONESIA LOGISTIK JALIN KERJASAMA PENGAWASAN PRODUK FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI KALIMANTAN TENGAH



Kepala BBPOM di Palangka Raya Ali Yudhi bersama Executive General Manager Pos Indonesia Logistik KCU Palangka Raya 73000 Mudjibur Rachman menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal pengiriman dokumen atau paket produk Balai Besar POM di Palangka Raya pada Selasa, 18 Februari 2025 di kantor Pos Indonesia Logistik KCU Palangka Raya 73000. Penandatanganan ini menandai komitmen kedua instansi untuk besinergi dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah



KUNJUNGAN KOORDINASI BALAI BESAR POM PALANGKA RAYA KE BPPMHKP KALTENG



Rumah BUMN merupakan wadah untuk memberdayakan UMKM dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diinisiasi oleh BUMN dan ditujukan sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. Berawal dari kesamaan Visi dalam membantu UMKM terutama UMKM Pangan Olahan di Palangka Raya untuk naik kelas, Rumah BUMN Palangka Raya melakukan kunjungan ke kantor BBPOM di Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2025. Agenda kunjungan Rumah BUMN tersebut antara lain persiapan Kerjasama (MoU) dengan BBPOM di Palangka Raya dalam hal pengembangan UMKM di wilayah Palangka Raya.

Maret 2025



BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA JALIN KOLABORASI UNTUK JAMIN KEAMANAN PRODUK PERIKANAN DI KALTENG



Palangka Raya - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya turut serta dalam kegiatan "Coffee Morning" yang diselenggarakan oleh Badan Mutu KKP pada 27 Februari 2024. Dalam acara tersebut, BBPOM di Palangka Raya ingin bekerja sama melalui berbagai program kolaborasi untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk perikanan di Kalimantan Tengah. Kegiatan yang juga dihadiri oleh pelaku usaha perikanan ini, dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).



TINGKATKAN SINERGITAS, KEPALA BBPOM PALANGKA RAYA LAKUKAN AUDIENSI DENGAN PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



Guna memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas sektor terkait peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palangka Raya, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Palangka Raya, Ali Yudhi Hartanto, melakukan audiensi dengan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak. Pertemuan ini berlangsung pada Senin, 3 Maret 2024, di kantor Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Dalam audiensi tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugiyanto, serta Ketua Tim Inspeksi, Mei Indarti, dan Ketua Tim Program Prioritas Nasional, Astry Talenta Betharia, dari BBPOM di Palangka Raya.



GALANG SINERGITAS DAN KOLABORASI BERSAMA BKKBN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH



Palangka Raya- Perkuat dukungan lintas sektor terkait adalah salah satu upaya strategis BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan visi dan misi BPOM dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan di daerah. Pada Kamis tanggal 27 Februari 2025, Kepala BBPOM di Palangka Raya, Bapak Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, M.Sc melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Sunarto, S.K.M, M.Adm, KP terkait dengan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
HIGHLIGHT KINERJA.....	8
DAFTAR ISI	14
DAFTAR TABEL	16
BAB I PENDAHULUAN.....	18
1.1 Latar Belakang.....	18
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	18
1.3 Struktur Organisasi	20
1.4 Isu Strategis	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	29
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	31
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	34
2.5 Metode Pengukuran	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	44
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	157
3.3 Realisasi Anggaran.....	166
BAB IV PENUTUP	
Lampiran.....	185



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Organisasi	19
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya	20
Gambar 3. Visi dan Misi Badan POM RI Tahun 2025-2029	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisis Beban Kerja	21
Tabel 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya	31
Tabel 3 Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2024	33
Tabel 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2023	35
Tabel 5 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Tahun 2024 Triwulan III.....	222

BAB

1



Pendahuluan

- Latar Belakang
- Gambaran Umum Organisasi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I / Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu tujuan pembuatan Laporan Kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja memiliki manfaat diantaranya menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program / kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Oleh karena itu, pada penyusunan Laporan kinerja, harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun jujur, objektif, akurat, dan transparan.

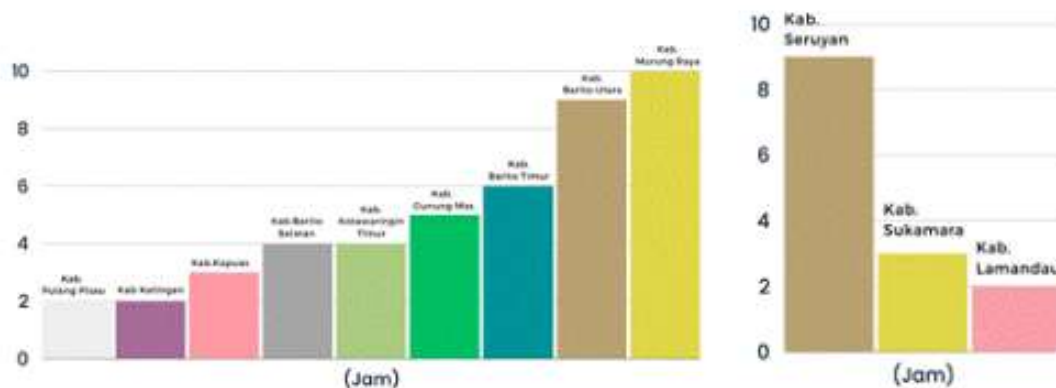
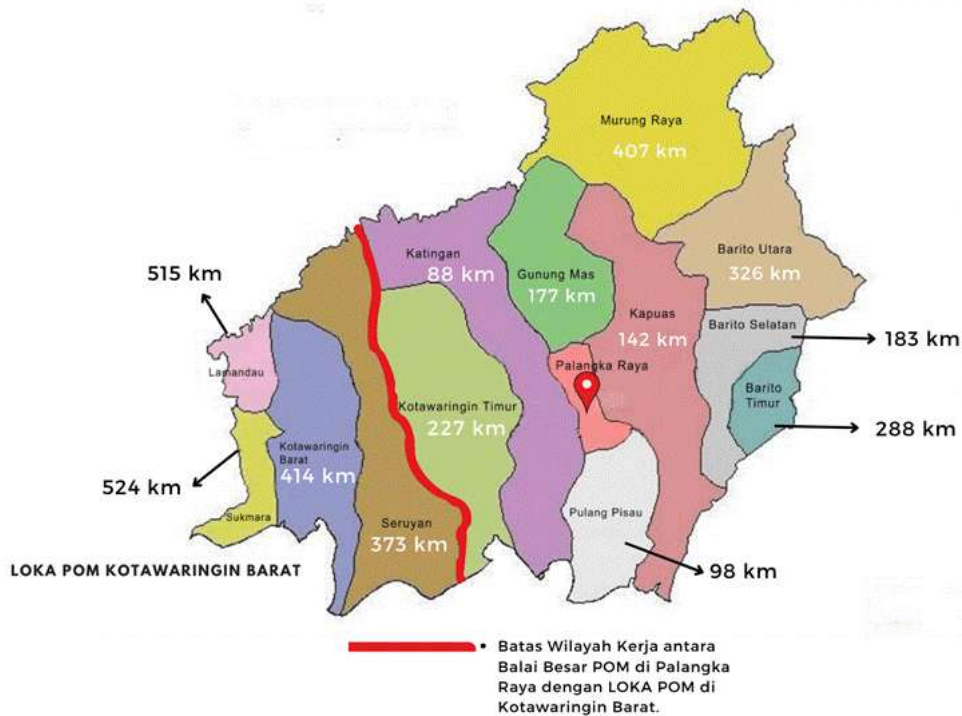
1.2 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut jumlah UPT BPOM terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. BBPOM di Palangka raya dengan cakupan pengawasan 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- b. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cakupan pengawasan 4 kabupaten/kota, yaitu

BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA



Sebagai UPT BPOM, BBPOM di Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala BBPOM di Palangka Raya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 11 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Palangka Raya yang mengawal pencapaian 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPT.

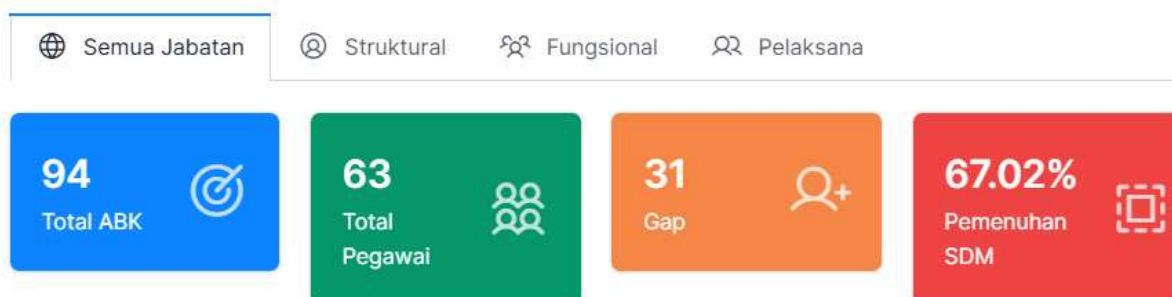
1.4 Isu Strategis

I. Sumber Daya Manusia

1). Jumlah SDM belum memadai

SDM Balai Besar POM di Palangka Raya sampai dengan April 2025 sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang ASN yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang PPPK serta 7 (tujuh) orang PPNPN untuk memenuhi beban kerja 94 orang yang baru terpenuhi sebesar 67.02% dengan proporsi 77.36% perempuan dan 22.64% laki-laki. Jumlah SDM tersebut tentunya belum memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dashboard - Balai Besar POM di Palangka Raya



ABK BBPOM di Palangka Raya berdasarkan SIREN (April, 2025)

No	Jabatan	Eksisting	ABK	GAP	Pemenuhan ABK
1	Struktural	1	2	-1	50,00
2	Fungsional Ketatausahaan	10	32	-22	31,25
3	Fungsional PFM	45	60	-15	75,00
4	Fungsional Umum	5	0	-	-
5	MPP (Pensiun per 1 Juni 2025)	1	0	-	-
6	Tubel (selesai Februari 2026)	1	0	-	-
		63	94	-38	67,02

Berdasarkan analisa beban kerja, untuk mendukung upaya penguatan tugas pokok dan fungsi, BBPOM di Palangka Raya memerlukan SDM sebanyak 94 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 31 orang. Perhitungan pemenuhan ABK 67,02% didapat dari pemenuhan ABK Struktural 50%, Fungsional Ketatausahaan 31,25% dan Fungsional PFM 75,00%. Selama 3 tahun ke depan, jumlah pegawai fungsi ketatausahaan akan berkurang sebanyak 5 orang. Pada tahun 2025, dari 63 orang pegawai, terdapat 1 orang pegawai yang memasuki masa purna tugas, namun dari 7 orang PPNPN akan menambah jumlah SDM melalui jalur pengangkatan PPPK. Dukungan manajemen yang harus dilakukan oleh fungsi ketatausahaan banyak dirangkap oleh personil yang ada pada fungsi-fungsi diluar jabatan fungsionalnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah akibat beban kinerja.

Selain jumlah pegawai, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Tingkat Pendidikan sebagian besar pegawai BBPOM di Palangka Raya adalah S1 dan Profesi (apoteker). Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai organisasi yang scientific based perlu lebih banyak didukung SDM dengan Pendidikan S2 yang lebih banyak dari yang ada saat ini. Dengan jumlah SDM yang terbatas dan harus menjawab tantangan yang semakin kompleks Balai Besar POM di Palangka Raya harus terus meningkatkan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Dengan peningkatan SDM, diharapkan Balai Besar POM di Palangka Raya akan mampu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dengan semakin berkembang dan beragamnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

2). Kompetensi teknis belum merata

Seiring semakin menurunnya jumlah SDM dengan tantangan yang semakin kompleks, telah membatasi pola rotasi internal antar fungsi sehingga kompetensi teknis SDM belum merata di setiap jenjangnya, belum terpetakannya peta kompetensi SDM menjadi kendala dalam percepatan pemenuhan dan pemerataan kompetensi teknis. Kompetensi yang belum merata selain terjadi pada kompetensi teknis juga terdapat pada kompetensi manajerial.

II. Sumber Daya Anggaran

a. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM melaksanakan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dimana telah memasuki tahun kelima sejak pengalokasian perdananya di tahun 2020. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.

- b. DAK NF BPOM tahun 2024 diberikan kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang pengawalannya dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun anggaran DAK ini dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, **DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya****

Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor: SP.DIPA-063.01.2.432872/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 22.128.308.000-. Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025, telah dilakukan revisi anggaran melalui persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran sebanyak 6 kali dari DIPA awal sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025. Anggaran yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya menurut jenis belanja dan sumbernya dananya dalam mendukung pelaksanaan 2 program dengan rincian sebagai berikut:

Program	Sumber Dana	Jenis Belanja		
		51	52	53
3165	Rupiah Murni	-	5.135.346.000	5.646.990.000
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PNP	-	987.260.000	256.478.000
	Total	-	6.122.606.000	5.903.468.000
6384	Rupiah Murni	5.530.734.000	4.571.500.000	-
Grand Total	Rupiah Murni	5.530.734.000	9.706.846.000	5.646.990.000
	PNP	-	987.260.000	256.478.000
	Total	5.530.734.000	10.694.106.000	5.903.468.000
		22.128.308.000		

Anggaran Responsif Gender (ARG merupakan anggaran yang memperhitungkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran Responsif Gender bukanlah suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, namun lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan.

Bila sebelumnya telah dikenal istilah anggaran berbasis kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Anggaran berbasis kinerja memiliki tiga nilai inti yakni Efficiency, Effectiveness dan Economy. Anggaran Responsif Gender melengkapi satu nilai inti lagi, yakni Equity. Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi anggapan yang kurang tepat, jika: ARG adalah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; ARG berarti alokasi anggaran 50% laki-laki dan 50% perempuan; adanya ARG berarti adanya penambahan anggaran yang dikhususkan untuk perempuan dan ARG hanya untuk kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.

III. Mesin/Perlengkapan

Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya, laboratorium pengujian memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Kecepatan dalam proses pengujian produk obat dan makanan sangat diharapkan agar

dapat segera dilakukan tindak lanjut apabila ditemukan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat seperti dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang terkait sehingga masyarakat dapat terhindar dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu (ilegal). Untuk itu Balai Besar POM di Palangka Raya terus melakukan peningkatan kapasitas maupun kapabilitas pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini Balai Besar POM di Palangka Raya telah didukung dengan instrument laboratorium teknologi kompleks seperti LC MSMS, GCMS dan real time PCR.

Dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin pesatnya industri obat dan makanan, membawa perubahan yang cepat dan signifikan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi perubahan tersebut. Tantangan pengujian yang semakin kompleks berkaitan dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan digitalisasi perdagangan memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis terkait kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan ketersediaan sarana dan prasarana dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengujian.

Keterbatasan dalam anggaran pengadaan alat laboratorium serta kebutuhan reagensia dan media yang diperlukan dalam proses pengujian menimbulkan gagasan konsep regionalisasi laboratorium. Regionalisasi sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas Laboratorium pengujian Badan POM. Melalui konsep regionalisasi BBPOM di Palangka Raya telah dilengkapi dengan instrumen mutakhir untuk mendukung pengujian parameter uji spesifik seperti LCMSMS dan GCMS, namun seiring dengan berubahnya konsep regionalisasi, untuk alat LC MSMS di pindahkan ke BBPOM di Samarinda sebagai Balai Unggulan di Region Samarinda untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian.

IV. Metode

Konsep Regionalisasi Laboratorium

Pengujian merupakan tulang punggung pengawasan Obat dan Makanan BPOM, dimana hasil pengujian laboratorium menjadi landasan ilmiah bagi pengambilan keputusan atas produk dibawah pengawasannya. Dalam rangka efisiensi dan memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan maka sejak tahun 2022 telah diterapkan sistem Regionalisasi Laboratorium yang kemudian disempurnakan pada tahun 2023 dengan konsep baru regionalisasi laboratorium.

Pada konsep baru Regionalisasi ini dilakukan pemusatan pengujian unggul di salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional pada setiap region. Terdapat total 8 (delapan) Laboratorium Regional yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap menjadi laboratorium dengan peralatan yang canggih dan menjadi rujukan bagi laboratorium anggota dalam region tersebut. Laboratorium Regional tersebut adalah : Laboratorium di BBPOM Medan, BBPOM Pekanbaru, BBPOM Semarang, BBPOM Surabaya, BBPOM Samarinda, BBPOM Makasar, BBPOM Manado dan terakhir adalah BBPOM di Jayapura. Dengan konsep regionalisasi ini maka penajaman perencanaan pengujian dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai.

Proses perubahan konsep regionalisasi dilakukan pada pertengahan pada tahun 2023 antara lain dengan pemindahan peralatan dan efektivitas pengujian dalam rangka pengawasan Obat dan makanan di seluruh pelosok negeri.

V. Lingkungan

Laboratorium Hijau merupakan sebuah konsep revolusioner dalam pengelolaan fasilitas laboratorium yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dengan praktik laboratorium modern. Konsep ini tidak sekadar tentang pengurangan dampak lingkungan, tetapi merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aktivitas laboratorium. Dalam implementasinya, Laboratorium Hijau mengedepankan tiga pilar utama, yaitu: (1) efisiensi penggunaan sumber daya, (2) minimalisasi dampak lingkungan, dan (3) penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan.

Laboratorium mengkonsumsi energi besar dan menghasilkan limbah yang berpotensi merusak lingkungan, dengan jejak karbon lima kali lebih besar dibanding ruang kantor biasa. Pedoman ini menawarkan pendekatan holistik, mencakup efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Selain mengurangi dampak lingkungan, konsep ini juga menghemat biaya operasional, meningkatkan kesehatan kerja, dan menciptakan lingkungan yang produktif.

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi pondasi utama dalam konsep Laboratorium Hijau. Hal ini dimulai dari manajemen energi yang cerdas, di mana setiap aspek penggunaan energi direncanakan dan dikelola secara optimal. Sistem pencahayaan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami melalui desain arsitektur yang tepat, dikombinasikan dengan penggunaan lampu LED hemat energi yang dilengkapi sensor gerak. Zonasi pencahayaan diterapkan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap area kerja, dengan sistem kontrol otomatis berbasis waktu dan okupansi yang memastikan energi hanya digunakan saat diperlukan.

Pengelolaan suhu ruangan menjadi aspek kritis lainnya dalam efisiensi energi. Laboratorium Hijau mengimplementasikan sistem HVAC dengan teknologi inverter yang dapat menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan. Pengaturan suhu dilakukan secara optimal untuk berbagai area laboratorium, didukung oleh sistem insulasi yang efektif dan pemantauan suhu otomatis. Peralatan laboratorium dipilih dengan mempertimbangkan sertifikasi hemat energi, dan penggunaannya dijadwalkan untuk menghindari beban puncak. Program pemeliharaan preventif dilaksanakan secara rutin untuk menjaga efisiensi operasional peralatan.

Konservasi air menjadi fokus penting berikutnya dalam konsep Laboratorium Hijau. Implementasinya mencakup instalasi sistem daur ulang air, teknologi pengolahan air limbah yang efektif, dan sistem pemanenan air hujan. Praktik hemat air diterapkan dalam setiap aktivitas laboratorium, mulai dari prosedur pembersihan peralatan yang efisien hingga penggunaan air destilasi secara bijak. Program deteksi dan perbaikan kebocoran dilakukan secara rutin, didukung dengan pelatihan staf tentang pentingnya konservasi air.

Pengelolaan material dalam Laboratorium Hijau dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Sistem tracking digital untuk bahan kimia memungkinkan optimalisasi

pemesanan dan penyimpanan, menghindari pemborosan akibat kadaluarsa atau kerusakan. Pemilihan bahan kimia ramah lingkungan menjadi prioritas, dengan prosedur penanganan material yang efisien untuk meminimalkan risiko pencemaran. Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan secara konsisten, didukung dengan sistem pemisahan dan pengolahan limbah yang terpadu.

Minimalisasi dampak lingkungan menjadi pilar kedua yang tak kalah pentingnya. Pengendalian polusi dilakukan melalui sistem ventilasi dengan filter efisiensi tinggi dan pemantauan kualitas udara secara berkala. Penggunaan bahan kimia dengan VOC rendah dan sistem penangkapan gas buang yang efektif memastikan kualitas udara tetap terjaga.

Pengurangan dampak lingkungan menjadi fokus utama dengan mengimplementasikan praktik-praktik ramah lingkungan dalam operasional laboratorium. Ini meliputi penggunaan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, pengolahan limbah yang tepat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penerapan sistem manajemen limbah yang efektif. Laboratorium juga menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan material dan menggunakan teknologi yang lebih bersih dalam proses pengujian.

Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem pengolahan mandiri dengan pemisahan saluran berdasarkan karakteristik limbah. Program monitoring kualitas effluent dilaksanakan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Perlindungan ekosistem menjadi aspek integral dalam Laboratorium Hijau. Program penanaman vegetasi di area laboratorium tidak hanya berkontribusi pada estetika, tetapi juga mendukung biodiversitas lokal. Pemilihan tanaman adaptif dan penciptaan habitat mikro menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Optimalisasi penggunaan lahan dan pencegahan erosi dilakukan melalui manajemen air limpasan yang efektif dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Mitigasi perubahan iklim mendapat perhatian khusus melalui program pengurangan emisi gas rumah kaca. Perhitungan dan monitoring jejak karbon dilakukan secara sistematis, didukung dengan program efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Optimalisasi transportasi dan logistik turut berkontribusi pada pengurangan emisi. Adaptasi terhadap perubahan iklim diwujudkan melalui desain bangunan yang tangguh, sistem drainase berkelanjutan, dan program tanggap darurat yang komprehensif.

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan menjadi pilar ketiga yang mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan produktivitas. Kualitas udara dalam ruangan dijaga melalui sistem ventilasi yang adequate dengan pemantauan parameter IAQ secara rutin. Aspek ergonomi diperhatikan melalui desain stasiun kerja yang nyaman dan pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Sistem keselamatan kerja diterapkan secara komprehensif, meliputi deteksi bahaya, peralatan pelindung diri, dan prosedur tanggap darurat.

Produktivitas dan kenyamanan kerja ditingkatkan melalui desain ruang yang mendukung alur kerja efisien. Optimalisasi pencahayaan alami dan zonasi berdasarkan fungsi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kenyamanan termal dijaga melalui sistem pengkondisian udara yang optimal dan pemantauan kondisi ruangan secara berkala. Aksesibilitas menjadi perhatian penting, dengan sirkulasi yang efisien dan fasilitas yang ramah difabel. Keberlanjutan

operasional didukung oleh sistem manajemen yang kuat, meliputi kebijakan laboratorium hijau, prosedur operasional standar, dan program audit internal.

Pengembangan SDM dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan. Inovasi dan perbaikan terus didorong melalui program riset dan pengembangan, serta adopsi teknologi baru yang relevan. Integrasi dengan sistem yang lebih luas menjadi aspek penting dalam konsep Laboratorium Hijau. Keterlibatan pemangku kepentingan diwujudkan melalui program edukasi dan sosialisasi, serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Dampak sosial diperhatikan melalui penciptaan lapangan kerja dan program pemberdayaan masyarakat lokal.

Aspek ekonomi dikelola melalui efisiensi biaya operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya, menciptakan nilai tambah bagi institusi. Implementasi konsep Laboratorium Hijau dilakukan secara terencana dan terukur. Tahap perencanaan meliputi penetapan target dan indikator, penyusunan roadmap, dan alokasi sumber daya yang tepat. Pelaksanaan program diawali dengan pilot project, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator kuantitatif seperti konsumsi energi dan air, serta indikator kualitatif seperti kepuasan pengguna dan kualitas lingkungan kerja.

Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan ditunjukkan melalui pengembangan dan implementasi kebijakan lingkungan yang komprehensif. Laboratorium mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk penggunaan energi terbarukan, konservasi air, pengurangan limbah, serta edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan bagi seluruh personel. Program-program inovatif untuk mendukung keberlanjutan terus dikembangkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektifitasnya.

BAB

2



Perencanaan Kinerja

- Uraian Singkat Renstra
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
- Metode Pengukuran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Visi & Misi Badan POM RI Tahun 2025-2029

“ Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 **”**

Visi

Misi

- “**
- Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
 - Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- ”**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik,

dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, BBPOM di Palangka Raya menyusun Renstra 2025-2029 sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan.

Renstra BBPOM di Palangka Raya 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Palangka Raya bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Renstra 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari periode Renstra tahun 2020-2024, yang telah menjadi landasan bagi BBPOM di Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029, visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih dari itu, BBPOM di Palangka Raya berkomitmen untuk menyelaraskan perencanaan strategis ini dengan delapan misi utama (Asta Cita) yang dicanangkan oleh Presiden pada sektor kesehatan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta akan dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. RKT tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 20 September 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26 %
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.02
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.18
		Nilai AKIP UPT BPOM	85.77
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91.30
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.4

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja sesuai Rencana Strategis BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025- 2029 serta alokasi anggaran sesuai DIPA BBPOM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 22.128.308.000,- (Dua Puluhan Dua Miliar Seratus Dua Puluhan Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan diwujudkan pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 10.102.234.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82.8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.87
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun berdasarkan PK dan memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-Performance dan Evaluasi Internal untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Berikut RAPK Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768.855.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41.950.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204.620.000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37.842.000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204.620.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51.722.500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10.344.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10.344.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163.552.750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163.552.750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23.290.000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.208.000
3.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan			69,5	69,5	69,5	71	71	71	72	72	72	72,5	7.479.574.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Olahan di wilayah kerja UPT	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	87,19	272.628.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	90	8	344.372.000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501.455.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137.071.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8,5	19	29,5	39,5	55	65	78	85,5	90,5	98,5	82,8	43.762.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	28	33	39	52	62	67	72	85	96	358.335.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72.439.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145.537.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,83	9.001.834.500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,87	83.990.550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.867.427.650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134.981.300
Total															22.128.308.000

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai manual indikator kinerja, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM nomor: PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja
 - 1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
 - 2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
- b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Untuk mengukur capaian periodik dari Kinerja Organisasi dilakukan dengan menjumlahkan Indikator kinerja yang capaiannya dinormalisasi dan dibagi dengan Indikator kinerja yang terdapat target pada periode tersebut. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e- Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

- e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

BBPOM di Palangka Raya mengatur penanggung jawab pengumpulan data dalam rangka mendukung pengukuran dan pelaporan data yang akuntabel dalam Surat Keputusan Pembentukan TIM Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025 dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Susunan Tim SAKIP terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua I (perencanaan dan pengukuran), Ketua II (evaluasi internal), Ketua III (Laporan Kinerja), Ketua IV (Laporan Tahunan), Sekretaris, Anggota I (perencana target dan penyusun analisis capaian kinerja), Anggota II (mereview analisis capaian kinerja), Anggota III (operator RHPK), dan Anggota IV (sekretariat tim laporan).
2. Tugas Pengarah (Kepala Balai): memberikan arahan pelaksanaan SAKIP dan memimpin rapat SAKIP.
3. Tugas Penanggung Jawab: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SAKIP dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai.
4. Tugas Ketua I (perencanaan dan pengukuran): mengkoordinir penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja sesuai pedoman, memastikan perencanaan kinerja menantang, dapat dicapai, dan realistis, mensosialisasikan manual IKU, memastikan data kinerja tertelusur dan andal, serta memastikan anggota tim mengikuti pengembangan kompetensi SAKIP.
5. Tugas Ketua II (evaluasi internal): mengkoordinir pelaksanaan evaluasi internal program dan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjut sesuai pedoman, dan memastikan laporan evaluasi internal disusun sesuai pedoman dan tepat waktu.
6. Tugas Ketua III (Laporan Kinerja): mengkoordinir penyusunan laporan kinerja sesuai pedoman dan memastikan pengiriman laporan kinerja interim dan tahunan tepat waktu.
7. Tugas Ketua IV (Laporan Tahunan): mengkoordinir penyusunan laporan tahunan sesuai pedoman dan memastikan pengirimannya tepat waktu.
8. Tugas Sekretaris: bertanggung jawab atas data kinerja, membuat format database, verifikasi dan mengolah data kinerja, menginput data kinerja dan analisis kendala pada aplikasi monev BPOM, serta menyediakan data kinerja untuk penyusunan laporan.
9. Tugas Anggota I (perencana target dan penyusun analisa capaian kinerja): verifikasi data output dan kinerja sebelum input RHPK, reviu capaian output dan indikator kinerja, menyusun rencana target indikator kinerja tahunan dan turunannya, melakukan evaluasi dan menyusun analisis (pelaksanaan kegiatan dan anggaran, capaian output dan indikator kinerja, identifikasi kendala, rekomendasi rencana aksi tindak lanjut) untuk berbagai laporan, serta menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut.
10. Tugas Anggota II (mereview analisis capaian kinerja): mereview dan menganalisis Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja, dan input data Simetris, serta mereview analisis Anggota I dalam Laporan Kinerja per Bab.
11. Tugas Anggota III (operator RHPK): mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari pelaksana kegiatan, melakukan input data pada RHPK, serta mengumpulkan dan mengkompilasi analisis untuk Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
12. Tugas Anggota IV (sekretariat tim laporan): mengumpulkan dan mengkompilasi analisis capaian kinerja yang telah diverifikasi dan direviu, memastikan kesesuaian data kinerja dan kriteria, menyunting, mengolah, dan menyusun laporan kinerja interim dan tahunan, membuat desain tampilan laporan yang mudah dimengerti dan menarik, mempublikasikan dokumen SAKIP pada subsite BBPOM Palangka Raya tepat waktu, dan mengirimkan

laporan kinerja ke esr.menpan.go.id, subsite BBPOM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan tepat waktu.

13. Data kinerja output dan indikator digunakan untuk mengisi data monev stakeholder dan membuat laporan: RHPK BPOM, Monev Capaian Output SAKTI Kemenkeu, RAPK, E-performance SIMETRIS BPOM, BAPPENAS, evaluasi internal bulanan dan triwulanan, laporan kinerja interim dan UPT BPOM (triwulan), dan laporan kinerja tahunan.
14. Pengisian data kinerja, pembuatan evaluasi capaian kinerja, dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai jenis laporan.
15. Tim SAKIP melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya.

BAB

3



Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Organisasi
- Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis
- Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya
- Pemanfaatan Informasi Kinerja
- Realisasi anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya di tahun 2025 memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan melakukan pengukuran capaian per sasaran strategis dengan menghitung rata-rata capaian dalam sasaran kinerja, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Berikut pengukuran Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya triwulan 1 tahun 2025.

No	Sasaran	Indikator	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Triwulan 1	Normalisasi Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	100	114.61%	110.00%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0%	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.69	116.11%	110.00%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0%	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92%	109.92%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64	72.41	113.14%	110.00%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0%	0.00%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0%	

No	Sasaran	Indikator	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Triwulan 1	Normalisasi Capaian
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	0	0%	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71%	110.00%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.21	112.74%	110.00%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00%	100.00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69.5	75	107.91%	107.91%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	89.83	103.03%	103.03%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	100.00%	100.00%
		Jumlah desa pangan aman	5	5	100.00%	100.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	100.00%	100.00%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	19	21.67	114.05%	110.00%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	18	33.33	185.17%	110.00%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	100.00%

No	Sasaran	Indikator	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Triwulan 1	Normalisasi Capaian
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0%	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0%	
		Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0%	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0%	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0%	
	Total Capaian PK					1590.86%
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)					99.43%
	Predikat NKO					Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di triwulan 1 tahun 2025 Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh NKO senilai 99,43% dari hasil rata-rata 16 Indikator kinerja yang dapat dinilai capaiannya di triwulan 1 tahun 2025 dengan predikat Baik. Berikut pembahasan capaian setiap Sasaran Kegiatan di Balai Besar POM di Palangka Raya di Triwulan 1 tahun 2025. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut.



Sasaran Kegiatan

*Meningkatnya Efektivitas Pengawasan
Produk Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan di Wilayah Kerja UPT*

Sasaran Kegiatan I yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87.25	87.25	100	114.61	114.61	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun	Belum ada target bulan ini	▼ Perlu Upaya Keras	Belum ada target
3.	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	85	98.69	116.11	116.11	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
4.	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	0	0.00	0.00	▼ Perlu Upaya Keras	Kurang
5.	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	85	93.43	109.92	109.92	▲ Tercapai	Sangat Baik
6.	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	84	64	72.41	86.20	113.14	▲ Akan Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
7.	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	87	0	0.00	0.00	▼ Perlu Upaya Keras	Kurang
8.	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	0	0.00	0.00	▼ Perlu Upaya Keras	Kurang

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
9.	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	73.88	73.88	0	0.00	0.00	▼ Perlu Upaya Keras	Kurang
10.	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	80	88.57	110.71	110.71	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
11.	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	88	88	99.21	112.74	112.74	▲ Tercapai	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Sasaran Kegiatan					108.38	112.87	▲ Tercapai	N/A

1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Adapun target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 87,25 %.

Jumlah Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar merupakan faktor utama yang mendukung indikator kinerja ini. Jumlah sampel yang akan disampling pada tahun 2025 adalah sebanyak 985 sampel, dengan rincian sebagai berikut :

Sampel Obat	= 274 sampel
Sampel Obat Tradisional	= 227 sampel
Sampel Kosmetik	= 424 sampel
Sampel Suplemen Kesehatan	= 60 sampel

Dalam menentukan capaian terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terdapat beberapa kriteria sebagai berikut :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kewajiban melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Berikut adalah perhitungan sehingga diperoleh persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	=	$\frac{A + B + C + D}{4}$
--	---	---------------------------

Unsur-unsur perhitungan :

- A** = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B** = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C** = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- D** = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Definisi “Sesuai Ketentuan” untuk masing-masing komoditi berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Komoditi Obat:

- Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
- Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
- Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)
- Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
- Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%)

2. Komoditi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (bobot sama):

- Pemenuhan target pengawasan
- Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- Kesesuaian parameter uji
- Akurasi dalam penentuan Kesimpulan
- Tanggapan atas surat tindak lanjut

3. Komoditi Kosmetik (bobot sama):

- Pemenuhan target pengawasan
- Kesesuaian pelaksanaan sampling
- Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
- Tanggapan atas surat tindak lanjut

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	100	114.61	Tidak dapat disimpulkan

Pada triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya melakukan re-targeting terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Target sampel yang akan disampling dan diuji pada triwulan I awalnya sebanyak 184 sampel, setelah dilakukan re-targeting menjadi sebanyak 56 sampel dan seluruhnya telah terlaksana, berikut adalah rincian jumlah sampel tiap komoditi :

- Obat, sebanyak 18 sampel
- Obat Bahan Alam, sebanyak 5 sampel
- Suplemen Kesehatan, sebanyak 2 sampel
- Kosmetik, sebanyak 31 sampel

Perhitungan realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan tabel RHPK yang telah ditetapkan yang telah mengakomodir semua aspek penilaian masing-masing komoditas dari indikator ini, maka diperoleh realisasi persentase sampling sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Target indikator ini bersifat *flat* yaitu sebesar 87,25%. Adanya gap yang cukup jauh antara target dan realisasi berkaitan dengan efisiensi anggaran pada triwulan I, sehingga jumlah target sampel pada triwulan I menjadi lebih sedikit dan seluruhnya terlaksana sesuai target. Jika realisasi triwulan I dibandingkan terhadap target triwulan I akan memberikan angka capaian sebesar 114,61% dengan kriteria **“tidak dapat disimpulkan”**.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum ada data pencapaian pada periode sebelumnya, sehingga belum bisa ditetapkan target indikator sesuai trend. Penetapan indikator ini didasarkan pada usulan dari UPT yang berdasarkan analisa risiko dan kondisi di lokasi sampling ke Direktorat Pengawasan Peredaran sediaan farmasi komoditi obat, obat bahan alam, kosmetika dan suplemen kesehatan yang akan di reviu dan dituangkan pada Renstra 2025-2029. Belum adanya baseline dalam menetapkan target indikator kinerja, sehingga target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pengawasan yang sebenarnya. Untuk selanjutnya dapat dilakukan reviu terhadap target indikator kinerja, sehingga target indikator kinerja lebih mencerminkan kondisi pengawasan yang dilakukan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja triwulan sebelumnya, karena indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan di tahun 2025. Untuk mendapatkan gambaran kinerja yang berkesinambungan, perbandingan realisasi kinerja triwulan dilakukan mulai triwulan II sampai triwulan IV tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	100	114.61	Tercapai/Melampaui 

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target kinerja tahunan menunjukkan capaian dengan kriteria tercapai/melampaui, yaitu sebesar 114,61 %. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan sampling dan pengujian yang direncanakan telah terlaksana seluruhnya pada triwulan I. Jika realisasi pelaksanaan sampling dan pengujian dapat terlaksana seperti yang direncanakan sebagaimana realisasi pada triwulan I, maka dapat dipastikan target tahunan akan tercapai/melampaui pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hal yang menyebabkan capaian tidak dapat disimpulkan adalah adanya retargeting untuk sampel yang disampling dan diuji, sebagai tindak lanjut adanya efisiensi anggaran berdasarkan surat sestama tentang penyampaian data penyesuaian besaran anggaran hasil rekonstruksi efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 B-PR.05.03.2.02.25.101 14 tanggal 14 Februari 2025. Retargeting menjadi 25% untuk komoditi obat dan 20% untuk komoditi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik terhadap target awal tahun 2025. Oleh karena itu, jumlah sampel yang disampling dan diuji pada triwulan I ini menjadi sedikit dan seluruhnya sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi :

- Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya supaya bisa masuk laboratorium di awal bulan
- Melakukan pengujian sampel sesuai dengan timeline yang ditetapkan
- Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan untuk mencapai target

Rencana aksi yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai target indikator kinerja adalah dengan menjaga konsistensi realisasi sesuai dengan perencanaan dan menyusun ulang perencanaan karena pengembalian anggaran dan pengembalian target berdasarkan surat sestama tentang revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

1. Adanya komunikasi yang optimal antara petugas sampling dan petugas pengujian. Terutama dalam hal menyusun rencana pelaksanaan sampling dan pengujian serta realisasinya. Rencana pelaksanaan sampling dan pengujian dibuat dalam bentuk *spreadsheets* yang

- dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Pengisian RHPK bersama sehingga dapat saling mengevaluasi antara petugas sampling dan petugas pengujian terhadap data yang disajikan. RHPK tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara online bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
 3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja. Evaluasi internal ini juga tersedia dalam bentuk *spreadsheets* yang dapat diakses secara *online* bagi yang memiliki akses, sehingga memudahkan dalam pengisiannya.
 4. Adanya kebijakan yang tepat dan efektif terkait efisiensi anggaran pada triwulan I, sehingga realisasi target indikator dapat tercapai. Berikut adalah kebijakan yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan :
 - Digitalisasi pelaporan hasil pengujian
 - Perubahan sistem kerja WFO-WFH
 - Pekerjaan simultan
 5. Efektivitas dalam pencapaian target indikator kinerja sangat berpengaruh terhadap sasaran kegiatan, jika capaian indikator kinerja memenuhi target maka dapat disimpulkan jika efektivitas sasaran kegiatan meningkat.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.624.440	11.624.440	100,00	114,61	1,15	0,15	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,15 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,15 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 718.855.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 576.203.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 142.652.000.

Dalam pengawasan keamanan obat beredar, salah satu program yang dilaksanakan BPOM adalah farmakovigilans. Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas terkait deteksi dini, penilaian, pengkajian dan upaya pencegahan terhadap dampak risiko merugikan sehubungan dengan penggunaan obat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini melibatkan banyak *key player* penting, antara lain tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, industri farmasi selaku pemegang izin edar dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPOM dalam program farmakovigilans, BPOM melakukan upaya penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini.

Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya adalah sebesar 26% yang diukur pada akhir tahun 2025.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan UPT BPOM adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing *catchment area* UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Indikator ini diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM} = \frac{(A / B) \times 100\%}{}$$

Keterangan:

- A** : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B** : Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

KIE Farmakovigilans akan dilaksanakan kepada tenaga kesehatan/tenaga medis dengan target 45 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	Belum ada target triwulan ini

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan target sebesar 26 % Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelaporan KTD/ESO setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, dengan target RO yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 45 fasyankes. Pada Triwulan I ini, belum dilaksanakan KIE Farmakovigilans sehingga pengukuran indikator tidak dapat dilakukan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pada dokumen tersebut, target indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ditetapkan diukur pada bulan duabelas tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	0	0	Penilaian dilakukan di akhir tahun

Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan inisiatif baru BPOM yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025-2029. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan. BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* dari tenaga kesehatan/tenaga medis terkait pentingnya farmakovigilans, sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengintensifkan peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis tersebut melalui kegiatan peningkatan kompetensi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) farmakovigilans. Mengingat luasnya cakupan wilayah dan sebaran sarana pelayanan kesehatan di Indonesia, maka diperlukan dukungan pelaksanaan

kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak hanya dilakukan oleh Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional namun juga oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM di daerah. Salah satu dukungan kegiatan peningkatan kompetensi melalui KIE farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM adalah berupa Bimbingan Teknis/KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Pada Triwulan I Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya melakukan koordinasi dan menyusun rencana pelaksanaan KIE Farmakovigilans bagi Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Berdasarkan target yang ditetapkan, KIE Farmakovigilans akan dilaksanakan kepada tenaga kesehatan/tenaga medis dari 45 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Atas capaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, untuk perbaikan kinerja pada triwulan 1 direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan KIE Farmakovigilans
2. Melaksanakan KIE Farmakovigilans pada Triwulan II sesuai perencanaan
3. Melakukan Pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Pada Triwulan I tahun 2025, dalam rangka pencapaian kinerja indikator ini dilakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 yang disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Rencana Pelaksanaan KIE Farmakovigilans direncanakan pada minggu ke-3 bulan April 2025 dengan mengundang narasumber pakar Farmakologi dan peserta sebanyak 45 orang dari 25 Rumah Sakit, 10 Klinik Pratama/Utama dan 10 Puskesmas.
- Melakukan Monitoring Evaluasi Farmakovigilans Triwulan I pada poin kegiatan melakukan koordinasi dan komunikasi identifikasi awal dalam penyusunan rencana pelaksanaan KIE KTD ESO bagi tenaga kesehatan Tahun 2025 dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut regulatori di lapangan berdasarkan hasil kajian keamanan obat beredar, seperti perubahan penandaan dan penarikan obat (recall obat) periode triwulan I tahun 2025.

Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD TA 2025 menyebabkan rekonstruksi anggaran dan penyesuaian target output yang mempengaruhi penyusunan perencanaan kegiatan KIE Farmakovigilans Tahun 2025. Pada periode ini, masih dilakukan banyak pembahasan, revisi dan blokir anggaran pada bulan Januari-Februari 2025. Selain itu, pembahasan definisi operasional untuk RO KIE Farmakovigilans tahun 2025 baru dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2025, serta Juknis KIE Farmakovigilans Tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan Maret 2025.

Adanya kebijakan efisiensi anggaran ini tentu saja memerlukan penyesuaian, khususnya pada format pelaksanaan kegiatan, dari tatap muka (luring) menjadi jarak jauh (daring). Dalam hal penyesuaian dengan kebijakan ini, maka strategi kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyediakan infrastruktur dan akses internet yang optimal
- Memperhatikan keterampilan digital peserta, fasilitator, moderator maupun narasumber
- Menciptakan kualitas interaksi dan *engagement* yang efektif
- Melakukan evaluasi efektivitas kegiatan yang memadai

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%, Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di TW 1 tahun 2025.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada realisasi anggaran yang digunakan dan belum ada capaian yang dapat dinilai karena penilaian baru dilakukan di akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 41.950.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 37.650.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 4.300.000

3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang telah mengalami proses pengolahan tertentu. Proses ini bisa melibatkan berbagai metode, seperti pengeringan, pemanasan, pendinginan, fermentasi, penambahan bahan pengawet atau perasa, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk meningkatkan daya simpan, mengubah rasa dan tekstur, atau menciptakan produk baru yang lebih praktis dan beragam.

Pangan Olahan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Untuk definisi dari Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi antara pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Capaian atau realisasi dari indikator kinerja “ Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan :

A = Kesesuaian target sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian parameter uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C = Ketepatan pengambilan keputusan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E = Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F = Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.69	116.11	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja pada TW I dibandingkan dengan target pada TW berjalan, masuk pada kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel telah disampling sesuai Pedoman Sampling dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) sampling serta diinput dan dilaporkan pada SIPT tepat waktu. Dengan target 85% pada TW 1 serta realisasi

sebesar 98.69% menjadikan capaian sebesar 116.11%. Dengan demikian pada TW berikutnya dapat lebih dirasionalisasi kembali pelaksanaan sampling dan pengujian agar capaian tidak jauh melampaui target sehingga capaian sangat baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.69	116.11	 Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja pada TW I dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**, dengan capaian sebesar 116.11%.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi kinerja pada TW I dibandingkan dengan target pada TW berjalan masuk pada kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel telah disampling sesuai Pedoman Sampling dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) sampling serta diinput dan dilaporkan pada SIPT tepat waktu. Dengan target 85% pada TW 1 serta realisasi sebesar 98.69% menjadikan capaian sebesar 116.11%. Dengan demikian pada TW berikutnya dapat lebih dirasionalisasi kembali pelaksanaan sampling dan pengujian agar capaian tidak jauh melampaui target sehingga capaian sangat baik.

Pada pelaksanaan kegiatan terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya

1. Pemenuhan sampling yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan (pedoman tindak lanjut)
3. Pengambilan kesimpulan yang tepat terhadap hasil uji dengan parameter sesuai Pedoman sampling yang telah ditetapkan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengawasan sampling dan pengujian pangan olahan, terdapat 2 (dua) sampel yang TMS pengujian yaitu kadar siklamat pada jenis pangan jelly dan telah dilaporkan pada Direktorat Sarana Peredaran Pangan Olahan BPOM. Dari hasil pengawasan label dan penandaan terdapat 3 sampel yang Tidak memiliki Izin Edar (TIE) dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan kepada pelaku usaha untuk dapat mengurus izin edarnya. Dengan melakukan tindak lanjut sesuai dengan pedoman pengawasan, diharapkan dapat menunjang capaian kinerja berikutnya. Untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja pada TW berikutnya, perlu dilakukan strategi

kinerja dan pelaporan agar capaian kinerja dapat dalam kriteria **Sangat Baik** sesuai dengan pedoman operasional yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan manajemen sumber daya sampling dan pengujian yang efektif dan efisien agar capaian kinerja tidak masuk pada kategori Tidak Dapat Disimpulkan (N/A).

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Adanya komunikasi yang optimal antara petugas sampling dan petugas pengujian. Terutama dalam hal menyusun rencana pelaksanaan sampling dan pengujian serta realisasinya.
2. Pengisian RHPK bersama sehingga dapat saling mengevaluasi antara petugas sampling dan petugas pengujian terhadap data yang disajikan.
3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja.

4

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

an

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.645.858	7.645.858	100,00	116,11	1,16	0,16	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,16 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,16 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 243.541.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 212.101.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 31.440.000.

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi

agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)

Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

- Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0	Kurang

Realisasi kinerja pada Triwulan I dibandingkan dengan target pada Triwulan I Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian **Kurang**. Hal ini disebabkan target pada Triwulan I telah ditetapkan sebesar 100 % namun hingga Bulan Maret 2025 tidak diterima sampel KLB keracunan pangan. Selain itu Definisi Operasional (DO) terkait *tools* cara perhitungan indikator kinerja belum ditetapkan. Oleh karena itu realisasi Indikator ini juga telah dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan *progress* indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja pada TW I dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian **"Perlu upaya keras"**. Secara umum, pada Triwulan I tidak terdapat laporan Kejadian Luar Biasa akibat Keracunan Pangan (KLB-KP) sehingga realisasi tidak dapat dilaporkan. .

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tidak adanya laporan Kejadian Luar Biasa akibat Keracunan Pangan (KLB-KP) belum tentu menunjukkan tidak adanya kasus keracunan di masyarakat. Perlu upaya lebih berkesinambungan terutama dengan tim terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) agar sering mengingatkan kepada masyarakat dalam pemilihan, penyiapan dan penyimpanan pangan yang aman maupun dalam konsumsinya sehingga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Jika terjadi keracunan akibat makanan juga diharapkan masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkannya pada Puskesmas terdekat. Tindakan tersebut dilakukan agar KLB-KP lebih cepat tertangani dan investigasi penyebabnya dapat dilakukan dengan baik sehingga

menjadi pembelajaran. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas Kesehatan daerah termasuk petugas pada Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) juga menjadi kunci penting agar berikutnya tetap siap dan waspada jika sewaktu-waktu terdapat laporan kejadian keracunan dari masyarakat.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja terkait KLB-KP ini merupakan IK baru pada Renstra 2025 - 2029. Analisis yang dapat dilakukan diutamakan pada persiapan sarana prasarana untuk dilakukannya pengujian sampel KLB-KP. Selain itu perlu segera ditetapkan Definisi Operasional (DO) pada indikator terkait agar penilaian kinerja dapat dilakukan sehingga perencanaan sumber daya guna mendukung pencapaian indikator dapat dilakukan secepatnya.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	0	0	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%, Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di TW 1 tahun 2025.

Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di TW 1 tahun 2025. Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada realisasi anggaran yang digunakan dan belum ada capaian yang dapat dinilai. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 10.000.000.



Sampling Pangan Industri rumah Tangga (PIRT) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PIRT. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, yang dikemas dalam kemasan pangan, yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP). Sampling ini merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian indikator untuk persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kategori sampling PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan.

Indikator kinerja Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 85% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian dari 35 sampel yang diambil dan dilaporkan sampai dengan akhir Triwulan I. Pengambilan sampel dilakukan pada triwulan I tahun berjalan dengan tujuan agar tidak terjadi sampling berulang (double sampling/double counting) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan yang melaksanakan menu post market dalam program Bantuan Operasional Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) TA 2025.

Keberhasilan kinerja untuk indikator ini dipengaruhi oleh jumlah produk PIRT yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dan ketersediaan reagen serta kesiapan alat untuk melakukan pengujian sampel PIRT. Selain itu kinerja pada indikator ini juga didukung oleh ketepatan perencanaan, kejelian petugas dalam mengambil kesimpulan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengujian dan evaluasi penandaan.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

$$\text{Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

dimana :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan *tools* penilaian mandiri sesuai dengan rumus perhitungan diatas dan pada Triwulan I ini Balai besar POM di Palangka Raya memperoleh realisasi sebesar 93.43%.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92	Sangat Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2025 dengan target sebesar 85 % memperoleh realisasi sebesar 90.43%. Dengan realisasi tersebut, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh Capaian sebesar 109.92%, dengan kriteria Sangat Baik.

Realisasi indikator kinerja pada Triwulan I ini dihitung dengan menggunakan baseline target yang terpengaruh oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun untuk perhitungan ketepatan waktu pelaporan tetap menggunakan target tahunan yang telah ditetapkan di awal tahun.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92	 Tercapai/ Melampaui

Sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 untuk produk PIRT hanya dilakukan sampling pada Triwulan I, sehingga realisasi jika dibandingkan dengan target tahunan telah memperoleh capaian sebesar 109.92% dengan kriteria sangat baik. Capaian indikator kinerja pada Triwulan I ini dihitung dengan menggunakan baseline target yang terpengaruh oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran, namun untuk perhitungan ketepatan waktu pelaporan tetap menggunakan target tahunan yang telah ditetapkan di awal tahun.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dari *tools* penilaian mandiri untuk menghitung realisasi kinerja indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh realisasi sebesar 93.43% dengan capaian 109.92% dengan kriteria sangat baik.

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini antara lain disebabkan oleh :

1. Ketepatan pengambilan sampel sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan
2. Pengambilan kesimpulan yang tepat terhadap hasil uji dengan parameter sesuai Pedoman sampling yang telah ditetapkan
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan
4. Adanya relaksasi dari pengampu terhadap perhitungan realisasi dengan menggunakan target sampel yang mengalami retargeting akibat adanya efisiensi anggaran.

Walaupun capaian indikator telah memenuhi kriteria sangat baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh :

1. Penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran
2. Pembahasan definisi operasional dan cara pengisian *tools* penilaian mandiri yang dilakukan pada bulan April
3. Jumlah sampel yang tidak mencukupi untuk pengujian.
4. Perubahan pada *tools* pelaporan hasil sampling yang belum final

Untuk meningkatkan kinerja kedepannya maka perlu adanya perbaikan pada :

1. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM Lokal dalam penerapan CPPOB IRT dan kesesuaian label pangan olahan
2. retargeting sampel PIRT

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

1. Program pengawalan BOK POM TA 2025 dengan bimtek penilaian mandiri SPPIRT oleh Dinas Kesehatan kabupaten/Kota yang meningkatkan pembinaan pelaku usaha PIRT untuk dapat memenuhi komitmen izin penerapan SPPIRT.
2. Program UMKM Berdikari yang bersinergi tidak hanya untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan BPOM MD namun juga mendampingi pelaku usaha PIRT
3. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk PIRT
4. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan khususnya pelaku usaha PIRT.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4.208.000	4.208.000	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,10 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,10 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien).

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 243.541.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 212.101.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 31.440.000.



Definisi indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi obat dan makanan, mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi dan Pemeriksaan Sarana Pelayanan Farmasi (saryanfar) baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan).
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Indikator kinerja ini bukan merupakan indikator kinerja yang baru karena pada periode renstra sebelumnya indikator ini juga telah diukur dengan definisi operasional yang sama.

Target yang ditetapkan bersifat kumulatif dan diukur sepanjang tahun yaitu sebesar 64% pada Triwulan I dan 84% pada Triwulan IV tahun 2025.

Target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 sebanyak 336 sarana, sedangkan target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 sebanyak 26 sarana. Kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) dan atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) serta penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan masing-masing komoditi/keputusan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder} = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

$$A : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

$$B : \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64	72.41	113.14	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya sebesar **72.41%** telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan I yaitu sebesar 64%. Realisasi yang melebihi target ini diperoleh karena adanya *feedback* dari rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan adanya monev CAPA yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Penetapan target sebesar 64% berdasarkan *trend* pencapaian indikator ini pada tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan. Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah memberikan keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan kepada *stakeholder* yaitu pelaku usaha sebanyak 145 rekomendasi termasuk *carry over* tahun 2024. Dari 145 rekomendasi yang diterbitkan, sebanyak 105 rekomendasi telah mendapat *feedback* dari pelaku usaha. Selama Triwulan I belum ada rekomendasi yang diterbitkan kepada lintas sektor dan tidak terdapat *carry over* dari tahun sebelumnya. Berikut tabel perbandingan jumlah rekomendasi pada bulan Januari-Maret 2025.

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Januari	98,00	142,00	69,01
Februari	101,00	143,00	70,63
Maret	105,00	145,00	72,41

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	84	72.41	86.20	 Akan Tercapai

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* selama 1 tahun bersifat kumulatif dengan target tahun 2025 sebesar 84%, sehingga capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar **72.41%** jika dibandingkan dengan target tahun 2025 akan memberikan angka capaian 86.20% dengan kategori **“Akan Tercapai”**. Target sebesar 84% pada akhir tahun optimis akan tercapai karena BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan dan monev yang ketat terhadap *feedback* rekomendasi yang diterbitkan kepada *stakeholder*.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi yang diperoleh sebesar **72.41%** melebihi target dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah memberikan keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan kepada *stakeholder* yaitu pelaku usaha sebanyak 145 rekomendasi termasuk *carry over* tahun 2024. Dari 145 rekomendasi yang diterbitkan, sebanyak 105 rekomendasi telah mendapat *feedback* dari pelaku usaha. Realisasi yang melebihi target ini diperoleh karena adanya *feedback* dari rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan adanya monev CAPA yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Namun demikian masih harus dilakukan *continuous improvement* untuk mencapai target akhir tahun. Rekomendasi perbaikan kinerja agar pelaku usaha/ lintas sektor memberikan *feedback* terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yaitu dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap respon *feedback* dari rekomendasi yang telah diterbitkan dengan rencana aksi sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat inspeksi, agar memberikan *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dan pola tindak lanjut hasil pengawasan.
- Aktif berkoordinasi dengan IAI untuk melakukan sosialisasi tentang pembuatan CAPA dari hasil pemeriksaan BBPOM di Palangka Raya
- Melakukan desk/konsultasi/monev CAPA secara berkala dengan pelaku usaha/penanggung jawab dengan cara petugas aktif melakukan konfirmasi sekaligus memberikan konsultasi secara terus menerus melalui telepon dan *whatsapp* ke pelaku usaha terkait *progress* CAPA yang harus dikirimkan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *timeline feedback* CAPA dari surat tindak lanjut yang telah diterbitkan.
- Menerapkan pola tindak lanjut sesuai dengan juknis masing-masing kedeputian/komoditi.
- Melakukan sosialisasi Pola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian kepada pelaku usaha/penanggung jawab sarana
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka sinergisme pengawasan obat dan makanan dan memaksimalkan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan) masing-masing kabupaten/kota.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha dan lintas sektor terhadap peraturan perundang-undangan. Di samping itu, koordinasi yang baik dengan lintas sektor juga menunjang keberhasilan dari indikator ini. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM mendorong pelaku usaha untuk secara aktif melakukan tindakan perbaikan melalui penyusunan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai salah satu bentuk tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Adanya site “SI PAMELA” yang difungsikan untuk penyimpanan data pada fungsi pemeriksaan termasuk data hasil pemeriksaan sarana, tindak lanjut, *timeline/respon/evaluasi* CAPA
- Kegiatan monitoring dan evaluasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi
- Kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
- Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Kegiatan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemeriksaan sarana

Keberhasilan capaian indikator ini mendukung keberhasilan sasaran kegiatan I yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), salah satunya adalah indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder”.

Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran dilanjutkan dengan blokir anggaran pada bulan Februari 2025 tidak berpengaruh pada pencapaian indikator ini. Penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target output pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan serta koordinasi dengan unit pusat (pengampu)
- Penetapan prioritas sarana yang diperiksa dengan melakukan analisis risiko kembali terhadap target sarana yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan instruksi kegiatan pengawasan tematik ataupun serentak dari Badan POM
- Pengawasan pada 2 kabupaten yang berdekatan dilakukan dengan 1 trip lanjutan
- Optimalisasi pemanfaatan site “SI PAMELA” sebagai media monitoring dan evaluasi matriks perencanaan, hasil pemeriksaan sarana, tindak lanjut dan evaluasi respon CAPA/rekomendasi
- perubahan sistem kerja (WFO-WFH)
- penggunaan *co working space*

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	8.799.000	8.799.000	100,00	113.14	1.13	0.13	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,13 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,13 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 22.332.000.

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Ruang lingkup dari sarana produksi sediaan farmasi sendiri terdiri dari :

- a) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- b) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- c) Fasilitas produksi kosmetik: industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Indikator ini merupakan indikator baru namun serupa dengan indikator tahun lalu yaitu persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dimana perbedaan mendasar ada pada ruang lingkup sarana produksi yang diperiksa dan juga cara pengukuran yang ditetapkan dalam manual IKU.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah: rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
 - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
 = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa)
 × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
 = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak)
 X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 87% yang diukur menggunakan Tools Assesment mandiri dengan rincian output sebanyak 3 sarana sesuai dengan cakupan sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0	Kurang

Pengukuran kinerja Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya memperoleh realisasi sebesar 0% hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya pengawasan sarana produksi sediaan farmasi. Dengan cakupan 3 sarana dan belum tuntasnya pembahasan manual IKU serta cara pengukuran menyebabkan perencanaan terhadap pengawasan sarana produksi sediaan farmasi akan dilaksanakan pada Triwulan II.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0	Perlu Upaya Keras

Besaran target indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat sama sampai dengan akhir tahun. Pengukuran kinerja Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya memperoleh realisasi sebesar **0%** hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya pengawasan sarana produksi sediaan farmasi. Dengan cakupan 3 sarana dan belum tuntasnya pembahasan manual IKU serta cara pengukuran menyebabkan perencanaan terhadap pengawasan sarana produksi sediaan farmasi akan dilaksanakan pada Triwulan II. Besaran cakupan pengawasan sarana produksi dan perencanaan yang dilakukan maka target 87% dari kinerja ini akan tercapai di Triwulan IV sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenendasi perbaikan kinerja)

Hal yang menyebabkan capaian pada indikator ini mendapat kriteria kurang adalah belum terlaksananya pengawasan sarana produksi sediaan farmasi pada Triwulan I. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Insruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang menyebabkan perubahan pada perencanaan maupun target pengawasan.
2. Pembahasan definisi operasional yang masih dilakukan sampai bulan Maret, sehingga penentuan kriteria penilaian sarana belum final

Untuk dapat memperbaiki kinerja pada triwulan selanjutnya maupun perbaikan kinerja untuk tahun depan akan dilakukan antara lain :

1. Melakukan perbaikan perencanaan dengan melakukan pengawasan di tiap triwulan.
2. Perbaikan kinerja dengan melaksanakan pengawasan ke sarana UMOT di bulan April. Dengan jumlah target ada 3 sarana maka akan dibagi merata satu sarana disetiap triwulan selama tahun 2025.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

1. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
2. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi sediaan farmasi dalam tindak lanjut hasil pengawasan dan perijinan.
3. Evaluasi internal yang dilaksanakan setiap bulan sehingga dapat segera diambil langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi pencapaian pernyataan kinerja.
4. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Evaluasi/Bimtek/Pelatihan di Bidang Pemeriksaan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%, Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di Triwulan I tahun 2025. Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada realisasi anggaran yang digunakan dan belum ada capaian yang dapat dinilai. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 10.344.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 6.684.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 3.660.000.



A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0.00	Kurang

Persentase sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ialah % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (A+B+C/3) yaitu:

- a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya.
- b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
 - pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK);
 - pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK);
 - kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT ialah dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut.
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0.00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja pada Triwulan I dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian **“Perlu Upaya Keras”** akibat belum ditetapkan Definisi Operasional (DO) hingga Triwulan I berakhir serta adanya perubahan Definisi Operasional (DO) dari tahun sebelumnya disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) terbaru untuk pengukuran dan pelaporan kinerja Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana industri pangan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Perlu segera ditetapkan Definisi Operasional (DO) pada indikator terkait agar penilaian kinerja dapat dilakukan sehingga perencanaan sumber daya guna mendukung pencapaian indikator dapat dilakukan secepatnya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan telah dilakukan setiap TW hingga TW III dengan pertimbangan pada TW IV akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pada TW sebelumnya. Untuk menunjang pencapaian target tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan secara rinci yaitu selain jumlah sarana perlu juga ditetapkan target sarana berdasarkan kajian analisis risiko atau riwayat hasil pemeriksaan sebelumnya.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya **100%**, Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di Triwulan 1 tahun 2025. Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada realisasi anggaran yang digunakan dan belum ada capaian yang dapat dinilai. Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 10.344.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 6.684.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 3.660.000.



Definisi berdasarkan rancangan manual IKU, sebagai berikut :

- Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;

- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
 - c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
 - d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus :

A. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A + B+C)/3$

Keterangan :

- Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b)

a. Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

- Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
- Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

b. Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan. Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan

distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

- c. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjuti.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjuti hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjuti) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjuti hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjuti) x 100%.

Namun demikian perhitungan indikator ini masih dikecualikan dari perhitungan kinerja Triwulan I tahun 2025, karena masih dalam tahap pembahasan/revisi Definisi Operasional (DO).

Target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 sebanyak 250 sarana, terdiri dari:

NO.	JENIS SARANA	TARGET
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	11
2.	Apotek	54
3.	Toko Obat	12
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	11
5.	Rumah Sakit (RS)	11
6.	Puskemas	19
7.	Klinik	16
8.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	30
9.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	13
10.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	73

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	0	0.00	Kurang

Perhitungan indikator ini masih dikecualikan dari perhitungan kinerja Triwulan I tahun 2025, karena masih dalam tahap pembahasan/revisi Definisi Operasional (DO).

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 73.88% yang mempunyai arti bahwa sebesar 73.88% dari total jumlah sarana sediaan farmasi harus memenuhi kaidah seperti yang tersebut dalam rancangan manual IKU, di mana kaidah tersebut berbeda-beda antar komoditi.

Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan sarana sebagai berikut:

- Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 13 sarana
- Sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 4 sarana
- Sarana distribusi kosmetik sebanyak 14 sarana

Seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan perencanaan, ditindaklanjuti sesuai dengan juknis/pedoman tindak lanjut dan telah dilaporkan melalui SIPT dengan tepat waktu.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	0	0.00	 Perlu Upaya Keras

Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 73,88% sehingga target tahun 2025 sama sebesar 73,88%. Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan sarana sebagai berikut:

- Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 13 sarana
- Sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 4 sarana
- Sarana distribusi kosmetik sebanyak 14 sarana

Seluruh hasil pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan perencanaan, ditindaklanjuti sesuai dengan juknis/pedoman tindak lanjut dan telah dilaporkan melalui SIPT dengan tepat waktu. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan upaya dan pengawalan yang ketat untuk mencapai target tersebut.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Perhitungan indikator ini masih dikecualikan dari perhitungan kinerja Triwulan I tahun 2025, karena masih dalam tahap pembahasan/revisi Definisi Operasional (DO).

Pada periode Triwulan I tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi meliputi sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, obat bahan alam dan suplemen kesehatan dengan total sebanyak 31 sarana. Seluruh tahapan dari kegiatan pemeriksaan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mengikuti petunjuk teknis pemeriksaan dari masing-masing direktorat/kedeputian. Pemeriksaan yang dilakukan pada 31 sarana pada Triwulan I tahun 2025 tersebut, seluruhnya telah sesuai dengan petunjuk teknis dan timeline pelaporan.

Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran dilanjutkan dengan blokir anggaran pada bulan Februari 2025 tidak berpengaruh pada pencapaian indikator ini. Penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target output pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan serta koordinasi dengan unit pusat (pengampu)
- Penetapan prioritas sarana yang diperiksa dengan melakukan analisis risiko kembali terhadap target sarana yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan instruksi kegiatan pengawasan tematik ataupun serentak dari Badan POM
- Pengawasan pada 2 kabupaten yang berdekatan dilakukan dengan 1 trip lanjutan
- Optimalisasi pemanfaatan site “SI PAMELA” sebagai media monitoring dan evaluasi matriks perencanaan, hasil pemeriksaan sarana, tindak lanjut dan evaluasi respon CAPA/rekomendasi

- perubahan sistem kerja (WFO-WFH)
- penggunaan *co working space*

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja adalah dengan mengikuti progress pembahasan DO dengan rencana aksi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi yang ketat serta kompetensi dan pemahaman petugas. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Kegiatan Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana.
- Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Evaluasi/Bimtek/Pelatihan di Bidang Pemeriksaan.

Keberhasilan capaian indikator ini mendukung keberhasilan sasaran kegiatan I yaitu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), salah satunya adalah indikator “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”.

Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran dilanjutkan dengan blokir anggaran pada bulan Februari 2025 tidak berpengaruh pada pencapaian indikator ini. Penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penyesuaian target output pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan famasi dan pangan olahan serta koordinasi dengan unit pusat (pengampu).
- Penetapan prioritas sarana yang diperiksa dengan melakukan analisis risiko kembali terhadap target sarana yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan instruksi kegiatan pengawasan tematik ataupun serentak dari Badan POM.
- Pengawasan pada 2 kabupaten yang berdekatan dilakukan dengan 1 *trip* lanjutan.
- Optimalisasi pemanfaatan site “SI PAMELA” sebagai media monitoring dan evaluasi matriks perencanaan, hasil pemeriksaa sarana, tindak lanjut dan evaluasi respon CAPA/rekomendasi
- perubahan sistem kerja (WFO-WFH).
- penggunaan *co working space*.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.540.500	6.540.500	100,00	0,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana

untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya **100%**. Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada capaian yang dapat dinilai.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 189.165.500 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 174.329.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 14.836.500.

10

**Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT)
yang Diperiksa Sesuai Ketentuan**

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap artinya dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan artinya mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- 1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- 2) Ketepatan waktu pelaporan
- 3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut = A+B+C

A : jumlah sarana yang diperiksa sesuai target,

B : ketepatan waktu pelaporan, serta

C : ketepatan tindak lanjut,

Dengan nilai proporsi dari ketiga komponen tersebut yaitu:

- $A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- $B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- $C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja pada Triwulan I dibandingkan dengan target pada TW berjalan masuk pada kriteria capaian **“Tidak dapat Disimpulkan”**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan telah dilakukan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan Tahun 2025. Dengan target 80% pada TW 1 dan realisasi sebesar **88.57%** menjadikan capaian sebesar 110.71%.

Dengan demikian pada triwulan berikutnya dapat direview kembali pelaksanaan pengawasan sarana dan pelaporannya agar capaian dapat sesuai yang diinginkan dengan lebih menitikberatkan pada ketajaman pengawasan dan evaluasi tindak lanjut perbaikan temuan ketidaksesuaian oleh pelaku usaha.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan target 80% pada tahun 2025 dan realisasi kinerja pada Triwulan I sebesar **88.57%** menjadikan capaian sebesar 110.71% masuk pada kriteria capaian **Tercapai/Melampaui**. Dengan demikian pada triwulan berikutnya dapat di evaluasi kembali pelaksanaan pengawasan sarana dan pelaporannya agar capaian pada triwulan berikutnya dapat ditingkatkan kembali sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK. 02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 dan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Olahan Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 88.57% dari target 80%.

Hal ini salah satunya disebabkan karena kegiatan pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan Intensifikasi Pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri sebanyak 32 sarana yang terdiri dari 15 sarana ritel modern, 13 sarana ritel tradisional, 4 gudang distributor. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 21 sarana (65,63%) yang menjual produk TMK berupa pangan TIE, kadaluarsa, dan rusak, dengan jumlah total temuan pangan TMK sebanyak 97 jenis produk atau 1101 pieces. Jenis temuan pangan terbesar merupakan pangan kadaluarsa (53,61%), disusul pangan rusak (29,90%) dan pangan TIE (16,49%). Dari kegiatan pengawasan tersebut, terdapat 7 sarana yang diperiksa menggunakan formulir 33 atau formulir Cara Distribusi Pangan Olahan Yang Baik (CDPOB) dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

Hasil pengawasan yang dilakukan dari 7 sarana yang dilaporkan, terdapat 4 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 3 sarana telah Memenuhi Ketentuan (MK) terhadap persyaratan CDPOB. Dalam pelaporannya terdapat 1 (satu) sarana yang mengalami keterlambatan pelaporan diakibatkan adanya pelaporan selain melalui SIPT yaitu melalui bit.ly Intensifikasi Pangan sehingga perlu diperhatikan oleh petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan ialah perlunya penekanan kembali kepada petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan sarana pada SIPT selain pada laporan bit.ly Inwas untuk sarana yang dilakukan pemeriksaan terhadap penerapan CDPOB.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam capaian kinerja indikator ini ialah dikarenakan adanya pengurangan target pada awal tahun dengan adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi, maka dilakukan penyesuaian terhadap target pengawasan. Namun demikian, pada awal Triwulan II telah ditetapkan tidak adanya pengurangan target tahunan dengan telah dibukanya kembali blokir anggaran sehingga target pemeriksaan sarana distribusi pangan pada Tahun 2025 kembali pada jumlah semula yaitu 86 sarana. Dengan demikian, maka perlu adanya perencanaan kembali yaitu minimal dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 6 sarana tiap bulan dan menggabungkan pelaporan hasil pemeriksaan kegiatan intensifikasi berikutnya yaitu pada Inwas Natal dan Tahun Baru ke dalam pelaporan SIPT dengan menggunakan formulir pemeriksaan 33 Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB).

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.540.500	6.540.500	100,00	110,71	1,11	0,11	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,11 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,11 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 189.165.500 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 174.329.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 14.836.500.

11

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Persentase sarana Iklan sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi salah satu Indikator dalam mengukur kinerja efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya.

Defenisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Presentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi Sesuai Ketentuan adalah:

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = **(A+B+C+D+E)/5**

$$A. \text{Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan} = \frac{a+b}{2}$$

- Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

- B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
 - Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
 - Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$
- Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$.
 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$.
- Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
- Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
 - Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan $((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
 - Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru yang tidak ada pada periode Renstra sebelumnya. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 88% dengan jumlah 913 iklan yang diukur menggunakan Tools Assesment mandiri dengan rincian output sebagai berikut:

- iklan Obat 163
- iklan Obat Bahan Alam 85
- iklan Obat Kuasi 15
- iklan Suplemen Kesehatan 50
- iklan Kosmetik 330
- iklan pangan 270

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan menggunakan *tools* penilaian mandiri sesuai dengan rumus perhitungan diatas dan pada Triwulan I ini Balai besar POM di Palangka Raya 112,74%.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99,21	112,74	Tidak dapat Disimpulkan

Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebanyak 247 iklan dengan rincian sebagai berikut:

- Obat sebanyak 43 iklan
- Obat Bahan Alam sebanyak 52 iklan
- Suplemen Kesehatan sebanyak 24 iklan
- Kosmetik sebanyak 72 iklan
- Pangan Olahan sebanyak 56 iklan

Jika dihitung menggunakan semua aspek penilaian masing-masing komoditi dari indikator ini, maka diperoleh realisasi persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan sebesar 99,21%. Target indikator ini bersifat *flat* yaitu sebesar 88%. Jika realisasi TW I dibandingkan terhadap target TW I akan memberikan angka capaian sebesar **112,74%** dengan kriteria “**Tidak dapat Disimpulkan**”.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99,21	112,74	 Tercapai/ Melampaui

Target bulanan dari indikator ini bersifat *flat* sebesar 88% sehingga target tahun 2025 sama sebesar 88%. Pada Triwulan I tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah melakukan pengawasan iklan sebagai berikut:

- Obat sebanyak 43 iklan
- Obat Bahan Alam sebanyak 52 iklan
- Suplemen Kesehatan sebanyak 24 iklan
- Kosmetik sebanyak 72 iklan
- Pangan Olahan sebanyak 56 iklan

Seluruh hasil pengawasan iklan tersebut telah dilaporkan melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dengan tepat waktu. BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan upaya dan pengawasan yang ketat untuk indikator ini sehingga dapat memperoleh capaian sangat baik.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hal yang menyebabkan capaian tidak dapat disimpulkan adalah dengan adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 yang menurunkan target sampling dan pengawasan sarana distribusi sehingga kegiatan pengawasan dialihkan ke pengawasan iklan.

Untuk dapat memperbaiki kinerja pada triwulan selanjutnya akan dilakukan antara lain dengan konsisten melakukan realisasi pengawasan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target. Pengawasan iklan pangan olahan pada Tahun 2025 telah mengacu pada mekanisme pengawasan iklan terbaru yaitu sesuai dengan Surat Edaran Nomor PW.04.05.5.02.25.06 tanggal 18 Februari 2025 tentang Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Olahan Tahun 2025. Berdasarkan surat edaran tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pengawasan iklan pangan sesuai dengan jenis media iklan dengan persentase jumlah iklan sesuai dengan persentase kategori pangan yang telah ditetapkan, terdiri dari media online (37%) yaitu pada website, youtube, marketplace shopee dan media sosial TikTok; media penyiaran (25%) yaitu media televisi SCTV dengan detail dengan jam tayang iklannya sehingga dibagi per bulan kepada petugas masing-masing untuk melakukan pengawasan; media luar ruang (25%) serta media cetak (12.5%).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu :

- Kegiatan Pengawasan iklan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan
- Kegiatan pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
- Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Kegiatan Koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.455.000	1.455.000	100,00	112,74	1,13	0,13	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini

indeks efisiensinya adalah 1,13 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,13 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 1.455.000.

Sasaran Kegiatan II yaitu Meningkatkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh Lintas Sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
12.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	 Akan Tercapai	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					100	100	 Akan Tercapai	Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan inisiatif baru yang dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029. Target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang diukur berdasarkan pemenuhan beberapa poin penilaian yang telah ditetapkan dalam manual IKU.

Wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, maka cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi hanya dilakukan terhadap 1 sarana tersebut.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menggunakan Rumus :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Tindak lanjut yang dilakukan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100,00	Baik

Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2025 dengan target sebesar 100 % memperoleh realisasi sebesar 100%. Dengan realisasi tersebut, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh Capaian sebesar 100%, dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan tahunannya.

Realisasi indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja triwulan sebelumnya, karena indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan di tahun 2025. Untuk mendapatkan gambaran kinerja yang berkesinambungan, perbandingan realisasi kinerja triwulan dilakukan mulai triwulan II sampai triwulan IV tahun 2025.

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	▲ Akan Tercapai

Sesuai dengan definisi operasional dalam manual IKU untuk cakupan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja dimana Balai Besar POM di Palangka Raya hanya memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi sehingga capaian pada indikator ini adalah 100% dan telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan kriteria **Baik**.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan kinerja pada indikator persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengambilan kesimpulan yang tepat terhadap hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan.
2. Ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan

Meski capaian indikator telah memenuhi kriteria Baik, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh :

1. Penyesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan akibat adanya efisiensi anggaran
2. Pembahasan definisi operasional yang dilakukan pada bulan Maret

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

1. Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha pangan olahan.
2. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan produk.
3. Kegiatan pengawasan sarana produksi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
4. Kerjasama Lintas Sektor dalam pengawasan dan pengawalan sarana produksi pangan fortifikasi

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.645.858	7.645.858	100,00	109,92	1,10	0,10	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,00 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,00 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 4.208.000.



Sasaran Kegiatan ketiga yaitu Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
13.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.50	69.50	75	103.45	107.91	▲ Tercapai / Melampaui	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					103.45	107.91	▲ Tercapai / Melampaui	Sangat Baik



Laboratorium pengawasan obat dan makanan menjadi bagian penting dari sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. *Grand Design* Penguatan Laboratorium pengawasan obat dan makanan 2024-2025 menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM salah satunya melalui penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Standar Kemampuan Laboratorium adalah standar yang ditetapkan Badan POM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM pada 4 komponen penilaian antara lain pemenuhan Standar Ruang Lingkup, pemenuhan Standar Kompetensi, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Pemenuhan SKL Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1 dengan pembagian dan fungsi sebagai berikut :

a. Tingkat 4 : Laboratorium Balai Regional

Terdiri dari 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya.

b. Tingkat 3 : Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi

Terdiri dari sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang berada di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tingkat di bawahnya. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya termasuk dalam laboratorium tingkat 3.

c. Tingkat 2 : Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Komponen dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan laboratorium tingkat 3 sebagai berikut :

- 1) Standar Ruang Lingkup (SRL);
- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
- 4) Standar Metode Analisis yang terverifikasi.

***Cara perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 =
(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)***

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL Biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69.50	75.00	107.91	Sangat Baik

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari nilai asesmen yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Pada triwulan I 2025 didapatkan hasil penilaian sebesar 75.00 dengan capaian sebesar 107.91% dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 69.50 dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progres indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.50	75.00	103.45	 Tercapai/Melampaui

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah melebihi target tahunan sebesar 72.50 dengan capaian 103.45% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan perhitungan, nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan mendapat realisasi sebesar 75.00 dan capaian sebesar 107.91% dengan kriteria capaian terhadap target "Sangat Baik". Komposisi penilaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium yang diperoleh pada triwulan I 2025 sebagai berikut :

- Nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 78.1
- Nilai pemenuhan Peralatan sebesar 77.6
- Nilai pemenuhan Kompetensi sebesar 90
- Nilai pemenuhan Metode terverifikasi 24.1

Pencapaian target kinerja didukung oleh perencanaan pemenuhan standar kemampuan Laboratorium yang disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti tersedianya reagensia, media, baku pembanding, alat laboratorium, ketersediaan suku cadang, bahan habis pakai serta program pemeliharaan alat

Perencanaan ini disusun dalam bentuk *roadmap* pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang akan dilaksanakan setiap bulan dan dievaluasi setiap akhir triwulan.

Selain perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap *roadmap* yang disusun juga telah dilakukan untuk memastikan pencapaian target indikator sesuai dengan yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk mengendalikan faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan antara lain

- Terselenggaranya program uji verifikasi metode pada triwulan I 2025 sesuai dengan perencanaan pada *roadmap* pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium, hal ini meningkatkan nilai pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Metode Analisis Terverifikasi.

Standar Kemampuan Laboratorium	Realisasi TW I 2025
Ruang Lingkup	Kosmetik : penambahan 2 ruang lingkup
Peralatan	-
Kompetensi	Kosmetik : penambahan 2 kompetensi untuk 4 penguji Obat : penambahan 2 kompetensi untuk 1 penguji OBA : penambahan 19 kompetensi untuk 1 penguji, 3 kompetensi untuk 1 penguji, 4 kompetensi untuk 1 penguji
Metode Analisis Terverifikasi	Kosmetik : penambahan 3 metode analisis terverifikasi OBA : penambahan 1 metode analisis terverifikasi Obat : penambahan 2 metode analisis terverifikasi

- Adanya inovasi Kahayan Tutu Bahalap yang dirancang oleh laboratorium BBPOM di Palangka Raya dimana salah satu tujuan khusus inovasi ini adalah membangun digitalisasi sistem manajemen mutu dengan memanfaatkan aplikasi *open source* untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan juga dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Salah satu manfaat inovasi ini sebagai media monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan standar kompetensi laboratorium secara *online* seperti monev dan tindak lanjut pelaksanaan Program Pengecekan Antara Alat dan Instrumen sehingga dapat tertelusur kondisi peralatan terkini, percepatan pembuatan dan verifikasi Lampiran Catatan Pengujian (LCP) karena dibuat dalam bentuk LCP *online*, serta sebagai bank data elektronik bagi laporan hasil uji sampel, laporan verifikasi metode analisa dan laporan lainnya yang dibutuhkan sebagai data dukung dalam penilaian pemenuhan SKL.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Capaian IK (%)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.239.900	1.239.900	100 %	107.91%	1.08	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,08 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,08 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 7.479.574.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 3.050.135.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 4.429.439.000.



Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran pada Triwulan I sebesar **100.75** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
14.	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	87.19	89.83	103.03	103.03	▲ Tercapai/ Melampaui	Sangat Baik
15.	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	5	5	N/A	100.00	N/A	Baik
16.	Jumlah Desa Pangan Aman	3	5	5	N/A	100.00	N/A	Baik

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
17.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	5	5	N/A	100.00	N/A	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					N/A	100.75	N/A	Sangat Baik



G. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	89.83	103.03	Sangat Baik

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan, Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) kepada masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran KIE BPOM mewakili kumpulan individu atau komunitas seperti komunitas lokal/masyarakat adat, komunitas sekolah, komunitas profesi, organisasi masyarakat dan atau komunitas berbasis kepentingan tertentu lainnya.

Tujuan Pelaksanaan KIE di lingkungan BPOM, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan BPOM;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep dan pembagian peran dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih informasi Obat dan Makanan dari BPOM sebagai sumber informasi yang valid dan terpercaya;
4. Meningkatkan pengetahuan serta mendorong sikap dan perilaku positif masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan KIE yang dilaksanakan oleh BPOM diukur melalui indikator kinerja Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Tingkat Efektivitas KIE adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE yang dilaksanakan meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Pengukuran Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei dan Jumlah responden dihitung berdasarkan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap Triwulan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE pada Triwulan I tahun 2025 BBPOM di Palangka Raya diperoleh nilai 89.83 dengan capaian sebesar 103.03% dengan kriteria Sangat Baik.

H. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	96.88	89.83	92.72

Apabila dilakukan perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi triwulan sebelumnya yaitu Triwulan IV Tahun 2024, capaian Triwulan I Tahun 2025 relatif rendah. Dalam hal ini, capaian realisasi Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung terhadap kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena terdapat perubahan mekanisme pengukuran tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Tahun 2025. Perubahan ini meliputi perubahan *tools* survei, cara pengukuran, serta target nilai Efektivitas KIE yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Untuk mendapatkan gambaran kinerja yang berkesinambungan Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT perbandingan realisasi kinerja Triwulan dilakukan mulai Triwulan II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

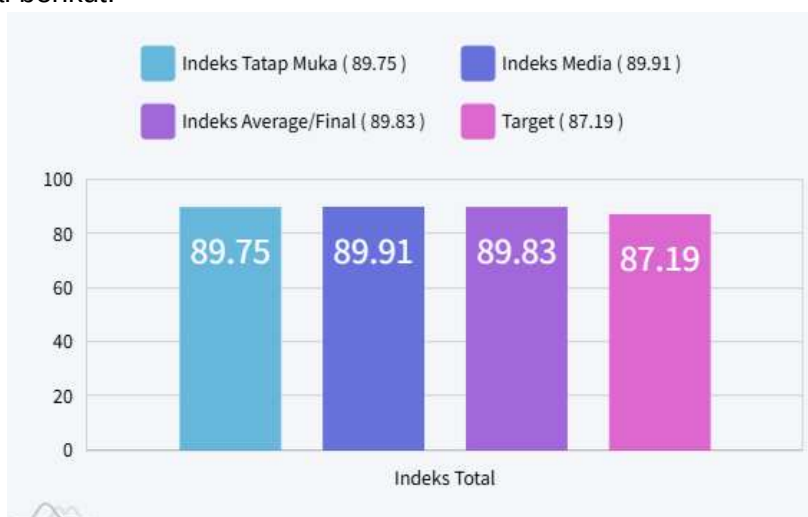
I. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	87.19	89.83	103.03	▲ Tercapai/ Melampaui

Capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Triwulan I Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahun 2025, telah tercapai sebesar 103.03% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui”.

J. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I tahun 2025, tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei pada 83 (delapan puluh tiga) responden yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) responden survei KIE Tatap Muka dan 19 (sembilan belas) responden KIE Media. Tingkat efektivitas KIE Triwulan I diperoleh dengan capaian sebagai berikut:



Pengukuran kriteria penilaian pada masing-masing jenis KIE adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas, rata-rata responden menilai narasumber/petugas KIE/sumber informasi yang disajikan bagus sehingga audiens dapat memahami materi dengan baik dan

merasakan manfaatnya. Responden juga menilai konten/materi yang disajikan sangat menarik, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi KIE merupakan kunci penting untuk menjangkau masyarakat luas dari berbagai generasi sesuai dengan media sosial yang digemari.

Materi KIE yang sangat diingat oleh responden adalah:

1. Tugas dan wewenang BPOM;
2. Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan;
3. Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM Mobile;
4. Tanya HALOBPOM/Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan;
5. Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM;
6. Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan;
7. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Responden juga memberikan masukan materi KIE yang dibutuhkan, antara lain:

1. Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman;
2. Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di Masyarakat;
3. Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM.

Atas capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Palangka Raya tahun 2025, untuk perbaikan kinerja pada Triwulan I direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE Obat dan Makanan melalui pengembangan ragam kegiatan sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal, melibatkan *influencer/public figure* serta mitra strategis BPOM lainnya;
2. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025;
3. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41.4%), media sosial (13.9%), dan webinar/daring (9.5%).

K. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa agenda KIE dan pemberdayaan masyarakat yang sudah berlangsung dan dilaksanakan oleh BBPOM POM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2025, antara lain:

1. KIE Sosialisasi Keamanan Pangan Siap Saji kepada 2 SPPG dalam Rangka Program MBG di Kota Palangka Raya, jumlah peserta 82 (delapan puluh dua) orang;
2. KIE Kepada Pedagang Takjil di kelurahan Palangka dan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, jumlah peserta 50 (lima puluh) orang;
3. KIE Bersama Generasi Muda dengan tema “Cek Produkmu Bersama BPOM” di Car Free Day (CFD) Jl. Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, jumlah peserta 20 (dua puluh) orang mahasiswa D3 Farmasi, 30 (tiga puluh) orang pedagang di area CFD;
4. KIE pada National Halal Fair Kalteng 2025 dengan jumlah pengunjung 36 (tiga puluh enam) orang;
5. KIE melalui media sosial (Facebook, Instagram, X/Twitter dan TikTok) tentang Obat dan Makanan aman selaras dengan Agenda Setting Nasional periode Januari sampai dengan Maret 2025;
6. KIE dan Laboratorium keliling dalam rangka pengawasan Takjil Ramadhan di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Katingan dan Kotawaringin Timur) kepada 124 (seratus dua puluh empat) pedagang takjil;

7. Pemberian informasi dan edukasi lainnya juga diberikan kepada masyarakat melalui Podcast dan Dialog pada media elektronik lokal seperti Tribunkalteng dan RRI Pro 1 Palangka Raya sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

L. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	22.036.600	22.036.600	100.00	103.03	1.03	0.03	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1.03 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0.03 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien).

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 272.628.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 170.411.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 102.217.000.



G. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	5	5	100	Baik

Kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2025 dilaksanakan di Kota Palangka Raya. Penetapan pemilihan wilayah pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain itu,

penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap Triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan I Tahun 2025 tahapan kegiatan Pembudayaan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman yang telah dilakukan adalah tahapan koordinasi pra advokasi komitmen lintas sektor di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah awal guna mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan Advokasi Komitmen Lintas Sektor yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2025. Persentase Realisasi tahapan program desa pangan aman pada Triwulan I ini sebesar 5% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

H. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	N/A	5	N/A

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% belum dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2024) karena perbedaan penilaian. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra pada tahun 2029. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan evaluasi dan analisis keberhasilan pada tahun sebelum guna menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

I. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	8	5	N/A	N/A

Jumlah sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria sekolah yang melakukan pembudayaan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 5% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi Triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2025. Akan

tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

J. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I ini, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian triwulan I ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Atas capaian indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan I tahun 2025 ini, untuk mempertahankan realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

K. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan I 2025 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan antara lain:

1. Melaksanakan tahapan Koordinasi Pra Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2025 dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sektor terkait untuk mensukseskan Program Terpadu Prioritas Nasional menuju kemandirian pangan.

L. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100.000	100.000	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1.00 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0.00 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien).

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 344.372.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 311.747.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 32.625.000.

16

Jumlah Desa Pangan Aman

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk pemenuhan konsumsi pangan yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi. Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat desa di bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

Jumlah Desa Pangan Aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan Desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas Desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana Desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi Desa maju, Desa berkembang, Desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, Desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Desa di daerah destinasi wisata. Dalam program Desa Pangan Aman, Desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu Desa yang menjadi target adalah Desa. Tahapan program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan Advokasi, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi keamanan pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman Ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program Desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

G. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Desa Pangan Aman	5	5	100	Baik

Penetapan pemilihan wilayah pada tahun 2025 ini didasarkan pada tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut serta merupakan wilayah yang menjadi lokus *stunting* sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Selain

itu, penetapan wilayah target intervensi ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor: B-PR.05.02.2.12.24.925. Capaian pada tiap Triwulan dihitung dari tahapan kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Pada Triwulan I 2025 tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang telah dilakukan adalah tahapan koordinasi pra advokasi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi. Kegiatan ini merupakan langkah awal guna mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan Advokasi Komitmen Lintas Sektor yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2025. Persentase Realisasi tahapan program desa pangan aman pada Triwulan I ini sebesar 5% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

H. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024
Jumlah Desa Pangan Aman	N/A	5	N/A

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% belum dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya (Triwulan IV 2024) karena perbedaan penilaian. Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan evaluasi dan analisis keberhasilan pada tahun sebelum guna menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

I. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Desa Pangan Aman	3	5	N/A	N/A

Jumlah Desa Pangan Aman dihitung berdasarkan jumlah Desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

J. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I ini, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian triwulan I ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Atas capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Palangka Raya Triwulan I Tahun 2025 ini, untuk mempertahankan capaian kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan.
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor.

K. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Desa Pangan Aman antara lain:

1. Melaksanakan tahapan Koordinasi Pra Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2025 dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sektor terkait untuk mensukseskan Program Terpadu Prioritas Nasional menuju kemandirian pangan.

L. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	0	0	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di Triwulan I tahun 2025.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada realisasi anggaran yang digunakan.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 501.455.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 461.650.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 39.805.000,-

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	5	5	100	Baik

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Sedangkan komunitas pasar adalah kelompok yang meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar dan anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar di Pasar Rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada Triwulan I Tahun 2025 tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas yang telah dilakukan adalah tahapan koordinasi pra advokasi komitmen lintas sektor di Kota Palangka Raya yang menjadi lokus intervensi tahun 2025 ini. Kegiatan ini merupakan langkah awal guna mempersiapkan pelaksanaan tahapan kegiatan Advokasi Komitmen Lintas Sektor yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2025. Persentase Realisasi tahapan program pasar aman berbasis komunitas pada TW I ini sebesar 5% dari seluruh tahapan yang dilakukan dan persentase capaian 100% dengan kriteria Baik.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW IV Tahun 2024
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	12	5	N/A

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% belum dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan sebelumnya (Triwulan IV 2024). Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029. Akan tetapi

dalam hal ini diperlukan evaluasi dan analisis keberhasilan pada tahun sebelum guna menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	5	N/A	N/A

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% belum dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan target dan realisasi Triwulan memiliki satuan berbeda dengan target tahunan. Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas bersifat kumulatif sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2025. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi target dan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan I ini, capaian BBPOM di Palangka Raya mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian triwulan I ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Ketepatan perencanaan yang mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi lapangan;
2. *Team work* dan koordinasi internal dalam pelaksanaan rencana kerja;
3. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Atas capaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Palangka Raya Triwulan I tahun 2025 ini, untuk peningkatan kinerja pada Triwulan mendatang direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Menyusun langkah strategis guna percepatan dan ketepatan pencapaian target output dan realisasi anggaran yang telah direncanakan;
2. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah dan lintas sektor;
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan I 2025 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk dalam mewujudkan Pasar Aman Berbasis Komunitas antara lain:

1. Melaksanakan tahapan Koordinasi Pra Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2025 dalam upaya mendapatkan dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta lintas sektor terkait untuk mensukseskan program Terpadu Prioritas Nasional menuju kemandirian pangan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	9.700.000	9.700.000	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,00 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,00 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien).

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 137.071.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 110.536.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 26.535.000.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Pendampingan
UMKM dalam Pemenuhan Standar
Keamanan dan Mutu

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran pada Triwulan I sebesar **114,05** dengan kategori **“Tidak dapat disimpulkan”**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
18.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82.80	19.00	21.67	N/A	114.05	N/A	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Sasaran Kegiatan					N/A	114.05	N/A	Tidak dapat disimpulkan



Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Selaku institusi pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai salah satu misi dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Badan POM berperan penting dalam pendampingan pelaku usaha untuk memenuhi aspek keamanan, mutu dan khasiat/manfaat sehingga dapat memenuhi ketentuan izin edar. Dalam menjalankan misi tersebut maka ditetapkanlah pengukuran indikator kinerja terhadap Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM telah melaksanakan kegiatan pendampingan UMKM guna mendukung indikator tersebut dengan realisasi sebesar 21.67%. Indikator ini merupakan indikator yang sama dengan indikator yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya (2024) namun dengan definisi operasional yang berbeda sesuai dengan Petunjuk Teknis pendampingan yang telah ditetapkan.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19.00	21.67	114.05	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja Triwulan I Balai Besar POM di Palangka Raya dalam melakukan pendampingan UMKM sesuai dengan juknis yang ditetapkan sebesar 21,67% dengan capaian sebesar 114,05% telah melampaui target yang ditetapkan pada Triwulan I sehingga Tidak dapat disimpulkan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Realisasi TW IV Tahun 2024
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	N/A	21.67	N/A

Indikator ini merupakan indikator yang sama dari tahun sebelumnya, namun realisasi tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang merupakan Triwulan IV tahun 2024, karena perbedaan penilaian. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III penilaian realisasi dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM, sedangkan penilaian realisasi Triwulan IV merupakan penilaian jumlah UMKM yang memenuhi standar yang dibuktikan dengan terbitnya Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82.80	21.67	N/A	N/A

Realisasi Triwulan I yang merupakan hasil penilaian terhadap pemenuhan tahapan pendampingan UMKM sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan yang merupakan hasil penilaian jumlah UMKM yang memenuhi standar yang dibuktikan dengan terbitnya Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik dan atau IP CPPOB Pangan Olahan, karena kedua penilaian tersebut berbeda satuan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi tahapan pendampingan pada Triwulan I sebesar 21,67% dan telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya *carry over* pendampingan tahun sebelumnya, yang tetap dilanjutkan pada tahun berjalan;
2. Komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pendaftaran menguat;
3. Kesadaran pelaku usaha dalam mengurus legalitas produk meningkat;
4. Kapasitas dan kompetensi fasilitator/pendamping UMKM meningkat dengan mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh Unit Pengampu.

Meski capaian indikator tidak dapat disimpulkan, namun tetap terjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja, yang disebabkan oleh:

1. Penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran;
2. Pembahasan definisi operasional dan sosialisasi juknis yang dilaksanakan pada bulan April, yang mengakibatkan tahapan dilaksanakan tidak berurutan.

Dengan capaian kinerja pada Triwulan I tidak dapat disimpulkan, perlu adanya perbaikan kinerja antara lain:

1. Mengikuti sosialisasi juknis pendampingan yang dilakukan oleh Unit Pengampu;
2. Pelaksanaan tahapan pendampingan yang berurutan sesuai dengan petunjuk teknis;
3. Libatkan lintas sektor yang memiliki program serupa guna peningkatan kinerja dan efisiensi kegiatan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan antara lain:

1. Program UMKM Berdikari untuk pendampingan pelaku usaha UMKM;
2. Program inovasi Smart Laura yang meningkatkan layanan informasi kepada pelaku usaha melalui Mall Pelayanan publik terkait tata cara perizinan dan persyaratan pendaftaran produk;
3. Kegiatan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan oleh tim inspeksi secara rutin, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dibidang obat dan makanan khususnya dalam pemenuhan legalitas usaha;
4. Kegiatan koordinasi Lintas sektor terutama dalam pembentukan Fasilitator eksternal (fasilitator Mahasiswa) guna pendampingan pelaku usaha secara mandiri.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran



Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW I Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW I 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	0	0	N/A	114.05	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan I dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sehingga capaiannya 100%, Namun untuk Indikator ini tidak ada target dan realisasi di Triwulan I tahun 2025.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber dayanya karena belum ada realisasi anggaran yang digunakan.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 43.762.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 36.162.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 7.600.000.

Sasaran Kegiatan Keenam yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja UPT. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
19.	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	96	18	33,33	34.72	185.17	Perlu Upaya Keras	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Sasaran Kegiatan					34.72	185.17	Perlu Upaya Keras	Tidak dapat disimpulkan

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja UPT, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut :

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$(Jumlah\ perkara\ SPDP \times 0.15 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ I \times 0.55 + Jumlah\ perkara\ P21 \times 0.85 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ II \times 1) / Jumlah\ Target\ Perkara \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut termasuk di dalamnya tahapan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara *carryover* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	18%	33.33%	185.17%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai **33,33%**, yang menunjukkan bahwa satu perkara telah berhasil diselesaikan hingga tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan) dari total target tahunan sebanyak tiga perkara.

Jika dibandingkan dengan target capaian Triwulan I sebesar **18%**, maka realisasi ini setara dengan **185,17%** dari target triwulanan. Capaian tersebut dikategorikan dalam kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan"**, karena keberhasilan 1 (satu) perkara pada awal tahun belum menggambarkan tren capaian yang stabil atau representatif terhadap kinerja tahunan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di BBPOM di Palangka Raya	96.0 %	33.33 %	34.72 %	 Perlu Upaya Keras

Pada Triwulan I Tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya mencatat realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 33,33%. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan), dari total target tahunan.

Target tahunan yang ditetapkan sebesar 96%, yang berarti dari 3 perkara yang direncanakan untuk ditangani sepanjang tahun, diharapkan semuanya dapat diselesaikan hingga tahap 2. Pada Triwulan I ini, baru 1 perkara yang berhasil dituntaskan, sehingga angka capaian indikator kinerja berada pada 34,72% dari target tahunan.

Capaian ini dikategorikan dalam **kriteria “Perlu Upaya Keras”**, yang menunjukkan bahwa meskipun telah ada progres, namun dibutuhkan intensifikasi kegiatan dan percepatan proses penanganan perkara agar target akhir tahun dapat tercapai.

Indikator ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan penyidikan oleh BBPOM di Palangka Raya, baik dari segi kuantitas penyelesaian perkara maupun kualitas penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada periode triwulan 1 tahun 2025 dengan nilai capaian 185.17% dan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan.”**

Pencapaian ini didukung oleh target penanganan terhadap perkara sebanyak 1 (satu) perkara dalam triwulan 1 tahun 2025. Namun pada triwulan 1 tahun 2025, BBPOM di Palangka Raya telah berhasil menangani 1 (satu) perkara, dengan rentang waktu penyelesaian pemberkasan adalah 1 (satu) bulan. Dengan demikian, pada akhir triwulan 1 tahun 2025, perkara yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Palangka Raya telah mencapai tahap 2, hal ini merupakan suatu kelebihan atau hal positif dalam pengelolaan kinerja yang ada dalam kontrol Balai, yaitu penyelesaian Berkas Perkara yang semakin baik dan cepat, karena dukungan lintas sektor yang bersedia melakukan penahanan terhadap tersangka sehingga penyelesaian berkas perkara menjadi lebih cepat.

Analisis penyebab capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Besar POM di Palangka Raya periode TW 1 tahun 2025 **Tidak dapat disimpulkan**, antara lain :

1. Informasi kasus yang ditindaklanjuti menjadi perkara didapatkan pada awal bulan Februari 2025 berdasarkan informasi intelijen dari BPOM RI sehingga didapatkan 1 (satu) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
2. Pada Triwulan I tahun 2025, target penanganan perkara direncanakan sesuai *Plan of Action* sebanyak 1 (satu) perkara hingga tahap 1. Namun, dalam realisasinya progres penanganan perkara yang cepat dikarenakan terhadap Tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Direktorat Tahti Polda Kalimantan Tengah, hal ini mendorong efektivitas penanganan perkara karena adanya batas waktu penahanan yang mendorong penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Palangka Raya untuk bekerja lebih cepat dan terstruktur sesuai ketentuan hukum acara pidana sehingga sampai dengan akhir bulan Februari 2025 berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejati Kalimantan Tengah;
3. Progres penanganan perkara pada awal bulan Maret 2025 dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) sejumlah 1 (satu) perkara dari PPNS BBPOM di Palangka Raya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalteng di Kejari Buntok Kabupaten Barito Selatan;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) fungsi penindakan BBPOM di Palangka Raya aktif melakukan koordinasi dan memiliki strategi koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* (CJS) yaitu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Negeri di Kab/Kota,

- Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan jajaran di wilayah yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan perkara (s.d. Tahap 2);
5. Komitmen dan dukungan pimpinan yang tinggi terhadap keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;
 6. Dukungan dan kerja sama internal yang baik antara fungsi penindakan dan fungsi terkait lainnya di BBPOM di Palangka Raya (pemeriksaan, laboratorium, ahli, anggaran, SDM dll);

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan pada TW 1 tahun 2025 adalah :

1. Pada periode awal tahun (bulan januari) tim penindakan BBPOM di Palangka Raya dalam tahap pendalaman informasi kasus pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kegiatan/operasi intelijen baik online dan offline sehingga belum didapatkan perkara di awal bulan januari 2025;
2. Adanya Informasi kasus pelanggaran di bidang sediaan farmasi (obat ilegal) dari BPOM RI dan lintas sektor yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh tim penindakan BBPOM di Palangka Raya bersama Sie Korwas PPNS Polda Kalimantan Tengah dikarenakan terduga pelaku kejahatan merupakan residivis yang sangat berhati-hati dalam bertindak dan diduga mengetahui menjadi target petugas sehingga terduga pelaku kejahatan melarikan diri.

Rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Dilakukan intensifikasi koordinasi dan kolaborasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya (Kepolisian dan pihak2 lain) dalam cara bertindak saat melakukan operasi penindakan ketika didapatkan informasi bahwa target adalah residivis;
2. Intensifikasi penggalangan dengan lintas sektor/ APH lainnya.

Dalam rangka untuk mencapai target indikator kinerja yang telah direncanakan pasca pengembalian anggaran sekaligus pengembalian target berdasarkan surat sestama tentang revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 adalah dengan menerapkan rencana aksi untuk menjaga konsistensi penggalangan, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dalam pengungkapan kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan Keenam, yaitu *"Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya"*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palangka Raya melaksanakan program pengawasan intensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan utama berupa pengukuran Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang menjadi indikator kinerja utama dalam upaya penegakan hukum. Kegiatan ini mencerminkan komitmen BBPOM di Palangka Raya dalam menindak secara tegas dan profesional terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal, guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas

Obat dan Makanan. Peraturan ini mengatur struktur organisasi serta tata kerja UPT BPOM, termasuk pelaksanaan fungsi intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Melalui peraturan tersebut, BBPOM di Palangka Raya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan, sebagai upaya untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengendalian peredaran produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai Besar POM di Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan intelijen dan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BBPOM di Palangka Raya untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan/Operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sumber hasil pengawasan, patroli siber, laporan masyarakat dan informasi intelijen lintas sektor yang ditindaklanjuti.
Hasil kegiatan/operasi intelijen yang diperoleh di dominasi dengan temuan pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan belum banyak ditemukan pelanggaran bidang pangan olahan yang bernilai A1 yaitu informasi yang menunjukkan bahwa sumbernya sangat dapat dipercaya dan kebenaran informasi tersebut memiliki tingkat keyakinan tertinggi berdasarkan indikator yang tersedia serta verifikasi di lapangan untuk ditindaklanjuti menjadi perkara.
2. Kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan rangkaian kegiatan pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya dengan tujuan untuk memperoleh data, informasi, dan bukti awal atas dugaan pelanggaran di bidang peredaran obat dan makanan. Kegiatan ini mencakup berbagai metode, antara lain observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan pengambilan sampel. Wasmatlitrik dilakukan terhadap pelaku usaha atau sarana yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan ini menjadi dasar dalam penentuan langkah lanjutan, termasuk upaya penindakan hukum. Secara umum, Wasmatlitrik berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum atas peredaran produk ilegal atau produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat..
Hasil kegiatan Wasmatlitrik diperoleh 2 (dua) laporan informasi dari lintas sektor dan BPOM RI yang ditindaklanjuti oleh PPNS BBPOM di Palangka Raya secara *non Pro Justitia* dengan tindak lanjut pemusnahan barang temuan berupa obat keras jenis Obat-obat Tertentu (Tramadol Tablet) Tanpa Izin Edar dan Trihexyphenidyl Tablet Tanpa izin Edar dikarenakan jumlah barang temuan yang sedikit (indikasi penyalahgunaan pribadi) dan pemilik obat TIE tidak bisa ditemukan petugas karena diduga merupakan Residivis pada kasus yang sama pada tahun-tahun sebelumnya yang ditangani PPNS BBPOM di Palangka Raya.
3. Operasi penindakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya melalui unit penegakan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Operasi ini dilakukan berdasarkan informasi hasil pengawasan, patroli siber, laporan masyarakat dan informasi intelijen lintas sektor yang ditindaklanjuti dan bertujuan untuk menghentikan peredaran produk ilegal atau berisiko, mengamankan barang bukti, serta memproses pelaku melalui jalur hukum.

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan operasi penindakan terhadap peredaran obat tanpa izin edar BPOM. Operasi ini dilakukan terhadap seorang pelaku yang diduga mengedarkan obat ilegal tanpa memiliki izin edar serta tidak memiliki kewenangan dan keahlian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penindakan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Kasus yang didapatkan ditingkatkan statusnya menjadi perkara ke tahap *Pro Justitia*. Capaian ini merupakan bagian dari pemenuhan target perkara penindakan yang didasarkan atas informasi intelijen berkualifikasi A1 dari BPOM RI dan ditindaklanjuti secara responsif oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Palangka Raya.

Didapatkan barang bukti dengan total keekonomian mencapai Rp. 5.216.000,-. (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) Adapun jenis komoditi yang melanggar Undang-Undang Kesehatan meliputi Obat Keras Golongan Obat-obat Tertentu (OOT) yang tidak memiliki izin edar atau ilegal dan diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan, yang melanggar UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan sangkaan pasal "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436.*"

Barang Bukti yang dikelola Petugas Pengelola Barang Bukti (PPBB) melalui aplikasi Sangprabu (sistem pengelolaan dan pendataan barang bukti secara elektronik) milik BBPOM di Palangka Raya untuk memudahkan dalam pengendalian secara digital.

Rincian Daftar Barang Bukti sbb :

No.	Nama Produk	No. Pendaftaran	Kelompok Temuan	Pabrik	Jumlah
1	Obat-obat tertentu jenis Triheksifenidil Tablet (Tanpa Izin Edar)	-	Obat TIE	-	1.988 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) tablet
2	Obat-obat tertentu Jenis Tramadol Tablet (Tanpa Izin Edar)	-	Obat TIE	-	30 (tiga puluh) tablet
3	Kardus pembungkus paket	-	Pembungkus paket	-	1 pcs/buah
4	Handphone (Alat komunikasi)	-	Alat Komunikasi	-	1 pcs/buah
5	Kartu provider (Alat Komunikasi)	-	Alat Komunikasi	-	1 pcs/buah

Penyidikan kejahatan sediaan farmasi dengan melakukan proses penyelesaian berkas perkara mulai dari proses penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)), P21 (Berkas

Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Pada pelaksanaan penyidikan terhadap 1 (satu) perkara di bidang sediaan farmasi ilegal tersebut terhadap tersangka dilakukan penahanan oleh Penyidik Polri Sie Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah atas permohonan bantuan penahanan dari PPNS BBPOM di Palangka Raya, yang ditempatkan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalteng, telah berdampak positif terhadap percepatan proses pemberkasan dan penyidikan perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Kalteng dan pelimpahan di Kejaksaan Negeri di Kabupaten (Tahap 2); Pemanfaat teknologi dalam aplikasi e-berpadu (Elektronik Berkas Pidana terpadu) milik Mahkamah Agung RI dalam hal ini Pengadilan Negeri Buntok Kabupaten Barito Selatan memberikan layanan jarak jauh dengan penggunaan aplikasi untuk Penetapan persetujuan Penyitaan, Pengeledahan serta pelimpahan berkas perkara dan barang bukti PPNS BBPOM di Palangka Raya kepada Jaksa Penuntut Umum serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan Persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri Buntok di kabupaten Barito Selatan secara online (via zoom) untuk perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan negeri memberikan kemudahan di era efisiensi anggaran.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	27.047.000	27.047.000	100,00	185,17	1,85	0,85	88% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,85 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,85 dan kriteria capaian efisiensi 88% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 358.335.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 285.711.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 72.624.000,-



Sasaran Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Siber dan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Adapun target yang ditetapkan untuk BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2025 adalah sebesar 90%. Hasil realisasi dan capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
20.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	55.56	100	Perlu Upaya Keras	Baik
Capaian Sasaran Kegiatan					55.56	100	Perlu Upaya Keras	Baik

20	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar
----	--

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling Siber*) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Cara perhitungan dan Formula :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik

Realisasi persentase *Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* pada Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar **50%**, yang berarti bahwa dari total target tahunan, setengahnya telah berhasil disusun dan disampaikan hingga triwulan ini.

Capaian ini sejalan dengan **target triwulan I sebesar 50%**, sehingga menghasilkan **angka capaian indikator kinerja sebesar 100%**. Dengan capaian ini, kinerja pada indikator tersebut masuk dalam **kriteria “Baik”**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan analisis kejahatan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengukuran keberhasilan progress indikator kinerja ini dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja akan dilakukan pada triwulan II dan III mendatang.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55.56	 Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 90% akan memberikan angka capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 55,56% dengan kriteria **“Perlu Upaya Keras”**.

Indikator kinerja persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan gambaran *progress* pembuatan laporan Analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan sekaligus pencapaian output Laporan Analisis.

Target sebesar 50% pada akhir TW 1 didapatkan jika terpenuhinya laporan analisis penelusuran siber yaitu Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (*Profiling Siber*) yang dilakukan setiap bulan berjalan dan dilaporkan.

Target sebesar 90% pada akhir tahun 2025 tercapai jika terselesaikannya laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, laporan hasil penelusuran di ranah siber dan tindak lanjut atas rekomendasi cegah tangkal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Palangka Raya periode TW 1 tahun 2025 dengan nilai capaian 100% dan kriteria **Baik**.

Analisis pendukung penyebab capaian persentase keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Besar POM di Palangka Raya periode TW 1 tahun 2025 dengan kategori **Baik**, antara lain :

1. Sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring, BBPOM di Palangka Raya membentuk Tim Patroli Siber (Patroli Siber) lintas fungsi. Tim ini dibentuk atas inisiatif Kepala BBPOM di Palangka Raya dan melibatkan berbagai unit kerja di luar fungsi penindakan, seperti Tata Usaha, Infokom, Pemeriksaan, dan Pengujian. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat antara fungsi penindakan dan fungsi-fungsi lainnya, mempercepat pengumpulan informasi, serta memperkaya basis data pengawasan. Melalui kerja sama ini, pengawasan daring dapat dilakukan secara lebih optimal, akurat, dan responsif terhadap ancaman kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Pembentukan Patroli Siber menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi lintas fungsi mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan menegaskan komitmen BBPOM di Palangka Raya dalam melindungi masyarakat dari produk ilegal dan berbahaya;
2. Pada Triwulan I Tahun 2025, target penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditetapkan sebesar 50%. Target ini dihitung berdasarkan

- persentase ketepatan waktu pelaporan hasil Analisis Penelusuran Siber yang dilakukan selama periode Januari hingga Maret 2025. Ketepatan waktu pelaporan menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja dan efektivitas proses analisis siber yang dilaksanakan;
3. Anggota Tim Patroli siber lintas fungsi telah memahami jenis pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di ranah siber sehingga dalam pelaksanaan patroli siber didapatkan hasil patroli siber yang telah memenuhi kualifikasi;
 4. Dukungan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan patroli siber dan *profiling* kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Palangka Raya. Dukungan ini memperkuat tindak lanjut rekomendasi *takedown* terhadap konten ilegal melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan *Indonesian E Commerce Association* (IdEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing, sehingga mempercepat proses penanganan pelanggaran di platform digital.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian penyusunan Laporan Analisis Kejahatan kinerja sediaan farmasi dan pangan olahan pada TW 1 tahun 2025 adalah Tim Patroli siber lintas fungsi memiliki kelemahan dalam hal basic keilmuan berbeda-beda menyebabkan pemahaman terhadap pelaksanaan patroli siber pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan memiliki kualitas/hasil patroli siber yang belum semuanya memenuhi standar yang ditetapkan

Rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Melakukan *coaching clinic* dan sosialisasi teknis pelaksanaan Patroli Siber pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan dalam tim Patroli Siber lintas fungsi di lingkungan BBPOM di Palangka Raya
2. Monitoring dan reviu secara berkelanjutan terhadap hasil patroli siber

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan ketujuh, yaitu " *Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif*", BBPOM di Palangka Raya melaksanakan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui satu kegiatan utama yaitu Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Palangka Raya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini mengatur struktur organisasi serta tata kerja UPT BPOM, termasuk pelaksanaan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka Penyusunan laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Palangka Raya pada TW 1 tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. *Patroli Siber* terhadap pelanggaran atau kejahatan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring merupakan salah satu upaya strategis yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh Tim Patroli Siber BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau, mendeteksi, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum di dunia maya yang berkaitan dengan peredaran produk obat dan makanan. Hasil dari patroli siber ini kemudian dilaporkan dalam bentuk link atau tautan melalui Aplikasi *Dashboard Crawler* (ADC) yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan

takedown kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI, sebagai bagian dari langkah perlindungan masyarakat terhadap produk ilegal atau berisiko.

2. *Profiling* kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di media daring merupakan langkah lanjutan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim Patroli Siber BBPOM di Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menelusuri secara lebih mendalam berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan di dunia maya, serta menggali informasi yang lebih komprehensif. Melalui *profiling* ini, akan dianalisis apakah pelanggaran yang terjadi memenuhi unsur pasal dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat ditentukan langkah tindak lanjut yang tepat, baik berupa tindakan *Pro Justitia* (penegakan hukum melalui jalur pidana) maupun *Non Pro Justitia* (penanganan administratif atau lainnya). *Profiling* menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kasus mendapatkan respons yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya;
3. Pelaksanaan penyusunan Laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui analisis penelusuran Siber TW 1 tahun 2025 yang telah dilakukan tindak lanjut oleh Direktorat Siber Obat dan makanan berdasarkan hasil monev bulanan, dengan data sbb :

No.	Bulan	Jumlah Link yang dilaporkan	Rekomendasi Pengajuan		Keterangan
			<i>Takedown</i>	<i>Profiling</i>	
1	Januari	18	18	3	Link/akun/tautan
2	Februari	18	18	3	Link/akun/tautan
3	Maret	29	29	4	Link/akun/tautan

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.000	100.000	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%. Dari hasil pengukuran efisiensi indikator ini indeks efisiensinya adalah 1,00 dan termasuk dalam kegiatan yang efisien dengan tingkat efisiensi 0,00 dan kriteria capaian efisiensi 100% (efisien). Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 72.439.000 dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 71.339.000 sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 1.100.000,-



Sasaran Kegiatan

Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran Kegiatan 8 yaitu Layanan Publik UPT yang Prima di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
21.	Layanan Publik UPT yang Prima	4.7	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
Capaian Sasaran Kegiatan					0	0	N/A	N/A

21

Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) di instansi pemerintah merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Untuk memantau kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan BPOM dilaksanakan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Implementasi PEKPPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023, memiliki peran krusial sebagai bagian integral dari indikator kinerja bagi UPT BPOM dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Mengukur Efektivitas dan Akuntabilitas Pelayanan:** PEKPPP menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengukur sejauh mana UPT BPOM telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator-indikator yang diukur dalam PEKPPP, seperti kepuasan pengguna layanan, waktu penyelesaian layanan, dan penanganan pengaduan, secara langsung mencerminkan efektivitas operasional dan akuntabilitas UPT BPOM kepada masyarakat.

2. **Identifikasi Area Peningkatan:** Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, UPT BPOM dapat mengidentifikasi area-area dalam penyelenggaraan pelayanan yang masih memerlukan perbaikan. Hasil PEKPPP menjadi *feedback* berharga untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyempurnakan infrastruktur pelayanan. Dengan demikian, PEKPPP bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
3. **Transparansi dan Kepercayaan Publik:** Informasi mengenai kinerja pelayanan publik yang dihasilkan melalui PEKPPP dapat menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data kinerja pelayanan, mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh UPT BPOM. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
4. **Keselarasan dengan Tujuan Strategis Nasional:** Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengimplementasikan PEKPPP secara efektif, UPT BPOM turut berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
5. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Data dan informasi yang dihasilkan dari PEKPPP menjadi landasan yang kuat bagi pimpinan UPT BPOM dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan kualitas pelayanan. Keputusan yang didasarkan pada data kinerja yang valid akan lebih terukur dampaknya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan kepada seluruh unit pelayanan publik di Lingkungan BPOM dan diukur berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Untuk seluruh UPT BPOM pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik dihitung melalui:

$75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$

Kategori nilai Indeks:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Tahun pertama di periode renstra ini, target nilai Indeks Pelayanan Publik untuk Balai Besar POM di Palangka Raya ditetapkan sebesar 4.7.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya dilakukan pada triwulan III tahun 2025 dengan target sebesar 4,7. Pada Triwulan I belum dilaksanakan PEKPPP Tahun 2025, sehingga pengukuran indikator belum dapat dilakukan.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pada dokumen tersebut, target indikator 4.7 ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	4.7	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya diperoleh setelah mengikuti PEKPPP Tahun 2025, sehingga capaian realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target tahunan belum dapat diperoleh. Namun demikian, dengan pelaksanaan program pelayanan publik yang optimal dan berkesinambungan maka target tahun 2025 optimis dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dalam mengawal pelaksanaan Pelayanan Publik yang prima di BBPOM di Palangka Raya, strategi keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Mendalam Terhadap Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, dilakukan dengan :
 - Survei dan Konsultasi: Melakukan survei berkala, forum diskusi, atau kotak saran untuk mengumpulkan umpan balik langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
 - Analisis Data Pengaduan: Memanfaatkan data pengaduan sebagai sumber informasi berharga untuk mengidentifikasi area layanan yang perlu diperbaiki (misalnya terkait sarana prasarana, koneksi internet dan digitalisasi layanan).
 - Segmentasi Pengguna Layanan: Memahami dan menyediakan layanan publik bagi kelompok rentan/pelanggan prioritas
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayan Publik, dilakukan dengan:
 - Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi: Memberikan pelatihan yang relevan terkait keterampilan pelayanan, komunikasi, teknologi informasi, dan pemahaman peraturan perundang-undangan baik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan dan sosialisasi
 - Penilaian Kinerja dan Sistem Penghargaan: Menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik dalam memberikan pelayanan publik
 - Membangun Budaya Pelayanan Prima: Mendorong nilai-nilai empati, responsivitas, profesionalisme, dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan.
3. Optimalisasi Proses dan Prosedur Pelayanan, dilakukan dengan:
 - Penyederhanaan Alur Layanan: Mengidentifikasi dan menghilangkan tahapan yang tidak efisien atau berbelit-belit.
 - Digitalisasi Layanan: Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan secara daring (online), mempermudah akses, mengurangi waktu dan biaya.
 - Standarisasi Layanan: Menyusun standar pelayanan yang jelas, terukur, dan transparan bagi setiap jenis layanan.
 - Implementasi Sistem Manajemen Mutu: Menerapkan standar mutu seperti ISO 9001 atau standar pelayanan publik yang ditetapkan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten.
4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas, dilakukan dengan:
 - Mekanisme Pengaduan yang Efektif: Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan transparan dalam penanganannya melalui kanal resmi BBPOM di Palangka Raya

- Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pelayanan: Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur melalui survei SKM dan Layanan Petugas
 - Transparansi dan Akses Informasi: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait jenis layanan, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian.
 - Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan dengan:
- Pengembangan Aplikasi Layanan Publik: Membangun aplikasi yang user-friendly untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan secara daring.
 - Penyediaan Informasi Melalui Website dan Media Sosial: Memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi penting terkait layanan kepada masyarakat.
 - Sistem Informasi Manajemen Pelayanan: Mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk mengelola data pelayanan, memantau kinerja, dan menghasilkan laporan yang akurat
 - Pemanfaatan Data Analitik: Menganalisis data pelayanan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perbaikan.

Atas capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya, untuk perbaikan kinerja pada triwulan 1 direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik
4. Mengembangkan Inovasi Layanan Publik
5. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang Layanan Publik pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan Review Standar Layanan Publik dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.26 TAHUN 2025 tentang Standar Layanan Publik di BBPOM di Palangka Raya Tahun 2025 serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya
- Telah dilakukan review Maklumat Pelayanan dan ditetapkan melalui SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor: OT.03.04.16A.01.25.27 TAHUN 2025 dengan menambahkan komitmen dalam memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui serta anak-anak) serta telah dipublikasikan pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya
- Telah membuat publikasi hasil SKM Mandiri bulan Januari-Maret tahun 2025 pada kanal informasi resmi BBPOM di Palangka Raya

- Telah memperhatikan kebijakan jam pelayanan/kerja bagi pelanggan dan aturan pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan
- Telah menerapkan aturan terkait penerapan 5S di di area layanan publik
- Telah melaksanakan sosialisasi terkait konsultasi dan pengaduan menggunakan SP4N-LAPOR kepada masyarakat/publik
- Melaksanakan pelaporan layanan melalui www.simpellpk.pom.go.id
- Menyusun Usulan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagai PPID Pelaksana BBPOM di Palangka Raya
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam implementasi Inovasi Tele Public Service SMART LAURA pada MPP Kabupaten barito Selatan, MPP Kabupaten Katingan dan DPMPTSP Kabupaten Kapuas
- Melaksanakan Perencanaan dan Implementasi Inovasi Tele Public Service SMART LAURA pada MPP target (MPP Kotim, MPP Katingan, MPP Gumus, MPP Pulang Pisau, MPP Babel, MPP Kota Palangka Raya), sampai Triwulan I Tahun 2025, Tele Public Service telah terpasang dan beroperasi di MPP Habaring Hurung Kabupaten Kotawaringin Timur, MPP Kabupaten Katingan, MPP Kabupaten Gunung Mas dan DPMPTSP Kabupaten Kapuas.
- Melakukan peningkatan sarana prasarana melalui renovasi pada ruang layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan prioritas/kelompok rentan (on progres)

Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD TA 2025 menyebabkan rekonstruksi anggaran dan penyesuaian target output yang mempengaruhi penyusunan perencanaan kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja indikator ini. Beberapa bentuk penyesuaian pelayanan publik dilakukan akibat efisiensi anggaran antara lain:

- **Digitalisasi dan Otomatisasi Layanan:**
Ini adalah langkah yang diambil untuk mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan efisiensi. Optimalisasi layanan SIPT Terintegrasi dalam pelayanan pengujian serta inovasi *tele public service* Smart Laura merupakan upaya-upaya yang sangat mendukung dalam situasi efisiensi anggaran.
- **Penyesuaian Jam Operasional, khususnya layanan di hari libur:**
Dalam kondisi efisiensi, penting untuk mengkomunikasikan kepada pengguna layanan terkait jam operasional yang berlaku, sehingga pengguna layanan dapat memanfaatkan saluran komunikasi yang ada untuk melakukan konsolidasi layanan.
- **Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):**
Selain digitalisasi layanan, pemanfaatan TIK juga dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyampaian informasi dan penanganan keluhan masyarakat. Optimalisasi layanan melalui kanal resmi BBPOM di Palangka Raya sangat berdampak positif dalam memberikan layanan. Respon yang baik melalui Halo Infokom, SP4N Lapor, Media sosial dan subsite dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif bagi pengguna layanan.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya	200	200	100	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi TW 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi nya karena perhitungan output baru dapat dinilai diakhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp. 145.537.000,- dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp. 127.812.000,- sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp. 17.725.000,-

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Sasaran Kegiatan 9 yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di Wilayah Kerja BBPOM di Palangka Raya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Kriteria Capaian terhadap Target	
		1 Tahun	TW I		1 Tahun	TW I	1 Tahun	TW I
22.	Nilai Pembangunan ZI UPT	87.83	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
23.	Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
24.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
25.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	0	0	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya
Capaian Sasaran Kegiatan					0	0	N/A	N/A

22 Nilai Pembangunan Zona Integritas UPT BPOM

Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang mencakup berbagai aspek, seperti organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi melibatkan perubahan fundamental dalam cara pemerintah beroperasi, termasuk struktur organisasi, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan.

Reformasi birokrasi mencakup berbagai aspek penting, seperti :

- **Organisasi:**
 - Memastikan kelembagaan pemerintah efisien dan terstruktur.
- **Tata Laksana:**
 - Menyederhanakan prosedur kerja dan meningkatkan efisiensi.
- **Peraturan Perundang-undangan:**
 - Memastikan adanya dasar hukum yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
- **Sumber Daya Manusia:**
 - Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur negara.
- **Pengawasan:**
 - Memperkuat mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan.
- **Akuntabilitas:**
 - Menegakkan prinsip pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- **Pelayanan Publik:**
 - Meningkatkan kualitas dan menjangkau masyarakat.
- **Pola Pikir dan Budaya Kerja:**
 - Mengubah mindset dan perilaku aparatur negara menuju yang lebih positif dan berintegritas.

Tujuannya adalah :

- **Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel:**
 - Melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- **Birokrasi yang Efektif dan Efisien:**
 - Meningkatkan produktivitas dan hasil kerja.
- **Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas:**
 - Menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
- Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan Zona Integritas	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada Triwulan I dibandingkan dengan target pada Triwulan berjalan masuk pada kriteria capaian Belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan Indikator Kinerja ini memiliki target yang bersifat tahunan yang capaiannya akan diketahui pada Triwulan III - Triwulan IV. Terdapat perubahan kriteria dari pengukuran sebelumnya dimana kriteria Tidak Dapat Disimpulkan mulai pada capaian di atas 120% diturunkan menjadi di atas 110% disesuaikan dengan SE terbaru untuk Pengukuran dan pelaporan Kinerja 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pada dokumen tersebut, target indikator 87.83 ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Pembangunan Zona Integritas	87.83	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Realisasi kinerja pada Triwulan I dibandingkan dengan target pada Tahun 2025 masuk pada kriteria capaian Belum dapat dinilai capaiannya dikarenakan belum adanya realisasi pada Triwulan I sebagaimana sudah dijelaskan di poin A di atas. Mempertimbangkan progres kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja RB di tiap Pokja dan pemenuhan persyaratan yang tertuang pada LKE disertai data dukungnya, maka indikator ini kemungkinan akan tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Meskipun pada Triwulan I belum ada realisasi pada indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas dikarenakan indikator ini realisasinya bersifat tahunan, namun Implementasi Zona Integritas akan dilakukan sepanjang tahun. Implementasi ZI berarti BBPOM di Palangka Raya berkomitmen melaksanakan program yang ada di area perubahan yang ada pada 6 kelompok kerja (Pokja), yaitu :

- Pokja I Manajemen Perubahan
- Pokja II Penataan Tata Laksana
- Pokja III Penataan Sistem SDM Aparatur
- Pokja IV Penguatan Akuntabilitas
- Pokja V Penguatan Pengawasan
- Pokja VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Implementasi ZI juga dilengkapi dengan rencana kerja prioritas dan disusun berdasarkan *road map* oleh setiap Pokja yang bertujuan mengoptimalkan pembangunan ZI sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa terwujud dan meningkat sehingga dampak positifnya bisa dirasakan.

Pada Triwulan I ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan/program kerja yang mendukung indikator ini. Hal ini terlihat dengan dukungan peran aktif setiap anggota pokja dan *Agent of Change* (AoC), rencana kerja yang disandingkan dengan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai jadwal dan berjalan lancar, pengisian LKE dan data dukung yang tidak melebihi *deadline* dan sosialisasi aktif di berbagai *platform* media kepada masyarakat dan lintas sektor merupakan hal positif yang telah dilaksanakan BBPOM di Palangka Raya.

BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2024 berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pada Surat Inspektur Utama Badan POM No : B-PI.06.06.7.11.24.657 tanggal 28 November 2024.

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Palangka Raya yang memuat saran perbaikan/rekomendasi untuk dibuat rencana dan tindak lanjutnya sebagai berikut :

NO	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Belum seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilakukan dan hasil pemantauan secara berkala belum dilengkapi dengan kendala serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL tersebut;	Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta RATL dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun tersebut	Menyusun ulang rencana kerja (Renja) Pembangunan ZI sesuai yang memuat target-target yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk tahun 2025. Akan disusun format pemantauan Renja yang baru versi tahun 2025, yang lebih lengkap dengan menambahkan kolom berisikan kendala serta Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan tindak lanjut atas RATL.
2	Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Menyusun peta kompetensi dan gap kompetensi kebutuhan organisasi dan existing sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi.
3	Pemenuhan SDM pengelola pengembangan kompetensi dimana pada tahun 2024, pengembangan kompetensi belum optimal dikelola karena ketidaktersediaan Analis SDM Aparatur	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara berkala	Refreshment terhadap SOP Monitoring dan Evaluasi pengaduan masyarakat agar dapat dilaporkan secara konsisten.
4	Belum terdapat reviu standar pelayanan terhadap standar pelayanan berdasarkan FKP Tahun 2023	Melakukan reviu standar pelayanan berdasarkan hasil FKP	Melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan berdasarkan rekomendasi hasil Forum Konsultasi Publik. Telah dilakukan reviu terhadap standar Pelayanan Publik berdasarkan hasil FKP tanggal 25 September 2024 yang menghasilkan SK Standar Pelayanan Publik No OT.03.04.16A.01.25.26 tanggal 02 Januari 2025

NO	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
5	Belum seluruhnya Inovasi yang dikembangkan didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak dari penerapan inovasi tersebut	Melakukan pemantauan seluruh rencana kerja pembangunan ZI secara berkala dan memadai dengan disertai kendala serta RATL dan tindak lanjut atas RATL yang telah disusun tersebut	<i>Continuous improvement</i> dilaksanakan antara lain dengan melakukan : 1. Penyempurnaan tampilan inovasi Kahayan Tutu Bahalap untuk pemberian informasi terkait jenis parameter uji, tarif layanan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan PMK No. 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan pengawas Obat dan Makanan, 2. Melakukan identifikasi penambahan parameter uji dengan timeline 1x24 jam 3. Penyempurnaan tampilan Learning Center Inovasi Elamahamen (E-Commerce dan pelaku Usaha Nakal Masyarakat Harap Melaporkan) terus dipertahankan dengan terus dilakukannya publikasi pada media daring milik BBPOM di Palangka Raya dan pada kegiatan-kegiatan <i>offline</i> yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya. Dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kemanfaatan dan keefektifan inovasi Elamahamen itu sendiri. Inovasi Elamahamen pada bulan November 2024 dikembangkan oleh tim AoC dengan mekanisme "jemput bola" yakni menempelkan poster Elamahamen di Sarana Distribusi diawali dengan Sarana Distribusi Kosmetik untuk semakin membumikan Elamahamen pada masyarakat di Kalimantan Tengah agar berani melaporkan jika ada pelanggaran di bidang obat dan makanan latarbelakang dan <i>Continuous improvement</i> dalam inovasi Monelaku dilakukan upaya peningkatan ketelusuran data terkait pelaporan kinerja dan output yang dihasilkan dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. dengan cara sheet kertas kerja akan dibuatkan tautan yang terkoneksi dengan laporan kertas kerja sehingga data tertelusur dengan jelas 11 Inovasi yang dikembangkan oleh AOC telah didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak dari penerapan inovasi tersebut yang tertuang dalam Laporan Akhir Pelaksanaan Rencana Aksi (Inovasi) AOC Tahun 2024

NO	KONDISI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
6	Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;	Menyusun peta kompetensi dan gap kompetensi kebutuhan organisasi dan existing sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Implementasi ZI merupakan indikator kinerja yang program kegiatannya tersebar di setiap fungsi/bagian, sehingga pengukuran capaian keberhasilan mempertimbangkan banyak aspek. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang tinggi agar tercapai realisasi melebihi target. Inventarisir kegiatan tersebut dituangkan dan dievaluasi oleh masing-masing Pokja agar pengukuran terhadap indikator bisa terlihat.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian indikator ini, pada TW I telah dilaksanakan berbagai kegiatan/aktivitas yang diinisiasi oleh Balai maupun kegiatan pusat yang diikuti Balai, sebagai berikut :

1. Survei dalam rangka menjangring minat pegawai terkait pokja yang diminati dan diharapkan mampu berkontribusi aktif mengimplementasikan ZI. Hasilnya dituangkan dalam SK Kepala BBPOM di Palangka Raya Nomor OT.01.03.16A.01.25.07 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RB DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA
2. Penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaannya beserta mitigasi risikonya di masing-masing Pokja
3. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2025 secara daring oleh Inspektorat Badan POM
4. Bimtek Implementasi Zona Integritas dengan narasumber Inspektorat Badan POM yang bertujuan sebagai refreshing bagi pegawai dan menyatukan komitmen bersama demi meraih WBBM, materinya berisi evaluasi hasil penilaian meraih WBK, temuan/gap dan rekomendasi serta upaya dalam mengembangkan inovasi
5. Pengisian mandiri LKE ZI dan pemenuhan data dukungnya sesuai waktu yang dijadwalkan sebagai wujud komitmen dan konsistensi BBPOM di Palangka Raya mengimplementasikan ZI.

Atas pelaksanaan kegiatan di atas, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Implementasi road map RB untuk TW II 2025
2. Implementasi road map AoC untuk TW II 2025

Tahun 2025 diawali dengan kebijakan pemerintah yang meminta Kementerian/Lembaga/Badan untuk melaksanakan efisiensi anggaran sehingga memengaruhi pelaksanaan program kegiatan, tidak terkecuali BBPOM di Palangka Raya terkhusus implementasi reformasi birokrasi. Rencana kerja yang disusun membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya sekaitan dengan hal ini.

Dibutuhkan strategi yang matang agar tujuan melindungi masyarakat dari obat dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat masih tetap bisa dijalankan. Beberapa diantaranya adalah penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan dijalankan lebih banyak secara daring, sosialisasi program, KIE dan publikasi lebih banyak memanfaatkan media elektronik (sosial, subsite) dibandingkan media luar ruang/cetak, pembuatan surat dan pelaporan, monitoring dan evaluasi diupayakan 100% *paperless*. Pelaksanaan sistem kerja dimodifikasi dengan metode WFO/WFH yang secara nyata berdampak pada efisiensi keuangan namun tidak menurunkan kualitas kinerja. Pada implementasinya, meskipun hal tersebut terlihat sulit dilakukan namun sebagai lembaga yang terbiasa menghadapi perubahan, BBPOM di Palangka Raya berhasil menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai Pembangunan Zona Integritas	2.063.659.567	2.063.659.567	100	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi nya karena perhitungan output baru dapat dinilai diakhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp.8.994.600.900,- dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp.1.009.548.150,- sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp.7.985.052.750,-

23

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Palangka Raya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya yang mencakup :

- a. Perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Pencapaian kinerja atas output maupun outcome.

Dengan rentang nilai pemenuhan sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2025 diperoleh hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi penilaian AKIP yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum ada target pada TW I Tahun 2025	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menilai terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada semester I tahun 2025 dengan pelaksanaan evaluasi pada awal triwulan III. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai AKIP ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pada dokumen tersebut, target indikator 83.87 ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	83.87	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menilai terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan SAKIP berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya pada semester I tahun 2025 dengan pelaksanaan evaluasi pada awal triwulan III. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai AKIP ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta seluruh pegawai BBPOM di Palangka Raya menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam pelaksanaan SAKIP. Berdasarkan evaluasi capaian Nilai

AKIP tahun 2024, BBPOM di Palangka Raya belum berhasil mencapai target, namun terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

Penilaian tahun 2024 terhadap masing-masing komponen SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Dokumen revisi RAPK tanggal 8 Mei 2024 dan laporan evaluasi paruh waktu Renstra belum dipublikasikan pada subsite BBPOM di Palangka Raya
- b. Terdapat perubahan Kepala BBPOM di Palangka Raya pada bulan September 2024 namun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 belum dilakukan proses perubahan

2. Pengukuran Kinerja

Pemenuhan kriteria komponen pengukuran kinerja berupa tersedianya manual IKU dan SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja dan dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja. Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. SOP Mikro Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja serta Penyusunan Laporan telah mencantumkan tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan data, namun belum mencantumkan tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan setelah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
- b. Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) / kertas kerja capaian indikator tidak dapat ditelusur / berbeda dengan dokumen monev (sumber data).
- c. Perbedaan realisasi indikator kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja.
- d. Belum tertib dalam mengisi kolom kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS tahun 2024
- e. Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS belum optimal yaitu belum mencantumkan kendala yang memadai atas kegagalan pencapaian target.

3. Pelaporan Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja pada laporan kinerja telah disajikan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Belum disajikan perbandingan realisasi kinerja yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya pada laporan kinerja triwulan II dan III tahun 2023 dan 2024.
- b. Perbedaan penyajian realisasi indikator kinerja pada SKP pimpinan, SIMETRIS, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja
- c. Laporan kinerja tahun 2023 tidak menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.
- d. Terdapat realisasi indikator kinerja periode berjalan dengan capaian menurun terus menerus namun belum disusun rencana aksi secara memadai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Laporan evaluasi internal telah disusun setiap triwulan, namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP
- b. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya

- c. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan
- d. Laporan Evaluasi Internal Triwulan III tahun 2024 belum menyajikan identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjutnya per indikator kinerja
- e. Perbedaan penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut pada SIMETRIS B09 tahun 2024, Laporan Evaluasi Internal Triwulan III tahun 2024 dan Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2024
- f. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan identifikasi kendala untuk indikator yang belum mencapai target dan/atau kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target.
- g. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan rencana aksi yang spesifik/relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi

Atas capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya tahun 2024, untuk perbaikan kinerja pada tahun 2025, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite satuan kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat
 - b. Melakukan pemutakhiran Perjanjian Kinerja saat terjadi perubahan pimpinan unit kerja
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Menyempurnakan SOP Mikro pengumpulan dan pengukuran data kinerja serta penyusunan laporan dengan mencantumkan tahap perbaikan data kinerja dan/atau laporan saat terjadi kesalahan/perubahan data
 - b. Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/ kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monitoring dan evaluasi (sumber data)
 - c. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
 - d. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
 - e. Menyusun identifikasi kendala pada aplikasi SIMETRIS secara memadai
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya
 - b. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
 - c. Menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran
 - d. Menyusun rencana aksi yang memadai terhadap realisasi indikator kinerja yang menurun terus menerus tiap triwulannya
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Merencanakan pengembangan kompetensi personel Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja terkait implementasi SAKIP
 - b. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
 1. Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya

2. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan bulan dalam triwulan bersangkutan
3. Identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjut per indikator kinerja secara memadai
- c. Memastikan keselarasan penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut pada SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan serta indikator kinerjanya, jika pada Renstra 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dengan tiga perspektif yaitu stakeholder, internal process dan *learning and growth*. Pada Renstra 2025-2029 menggunakan pendekatan *logical frame*. Sampai dengan triwulan I ini, dokumen Renstra 2025-2029 belum ditetapkan, masih dalam bentuk draft rancangan awal, dan masih dilakukan reviu target serta penyusunan manual indikator kinerja. Pada triwulan I ini terdapat kebijakan pemerintah dengan terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga mempengaruhi agenda perencanaan kegiatan dengan dilakukannya beberapa kali reviu target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan triwulan I, kegiatan SAKIP yang telah dilaksanakan dari setiap komponen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Penyusunan rancangan awal Renstra 2025-2029
 - b. Sosialisasi manual IKU 17 Januari 2025
 - c. Desk penetapan target Renstra 2025-2029 pada tanggal 22-24 Januari 2025
 - d. Penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 10 Februari 2025
 - e. Reviu target rincian output tahun 2025 pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - f. Desk pra rakernas pembahasan usulan target rancangan awal rencana kerja tahun 2026 pada 03-05 Maret 2025
 - g. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait perencanaan kinerja, berupa publikasi dokumen perencanaan SAKIP pada subsite satuan kerja (dokumen PK, RAPK 2025)
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran kinerja tahunan 2024
 - b. Penerbitan surat edaran pengukuran dan pelaporan kinerja tahun 2025, pada 12 Maret 2025
 - c. Sosialisasi pengisian RHPK 2025, pada 10 April 2025
 - d. Permintaan pelaporan capaian kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan I, pada 10 April 2025
 - e. Pengisian RHPK dan E-performance kinerja tahun 2024 dan triwulan I 2025
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait pengukuran kinerja, berupa pengendalian perhitungan capaian kinerja pada RHPK; penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja; pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi

SIMETRIS secara tertib dan pengisian identifikasi kendala pada aplikasi SIMETRIS secara memadai

3. Pelaporan Kinerja
 - a. Bimtek Sakip dan penyusunan laporan kinerja tahun 2024, pada 10-12 Februari 2025
 - b. Penyusunan laporan kinerja tahun 2024, pada 26 Februari 2025.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait pelaporan kinerja berupa, pengendalian keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SKP Pimpinan, SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Pelaksanaan evaluasi internal tahunan 2024, pada 14 Januari 2025
 - b. Pelaksanaan evaluasi internal triwulan I tahun 2025, pada 25 April 2025
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP terkait evaluasi akuntabilitas kinerja berupa, pengembangan kompetensi personel Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja terkait implementasi SAKIP, penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya, evaluasi atas RAPK terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan dan menuangkan identifikasi kendala dan/atau rencana tindak lanjut per indikator kinerja secara memadai.

Keberhasilan penerapan SAKIP BBPOM di Palangka Raya didukung antara lain:

1. Penetapan dan pembagian peran dalam tim SAKIP yang mengawal pelaksanaan SAKIP secara menyeluruh dari mulai perencanaan, pengukuran, evaluasi kinerja, dan laporan kinerja sampai dengan terbitnya laporan kinerja tahunan dikirimkan.
2. Komitmen Kepala Unit, ketua tim kerja dan seluruh anggota tim SAKIP dalam melaksanakan tugas sesuai peran dalam tim SAKIP dan mengawal ketepatan waktu penyelesaiannya.
3. Menyediakan form-form melalui inovasi Monelaku yang dapat diakses secara online.

Dengan penerapan SAKIP BBPOM di Palangka Raya memberikan efektivitas yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SAKIP membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. SAKIP mendorong pemerintah dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga dapat mencegah inefisiensi anggaran dan meningkatkan kinerja.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya	90,000	90,000	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensinya karena perhitungan output baru dapat dinilai diakhir tahun.

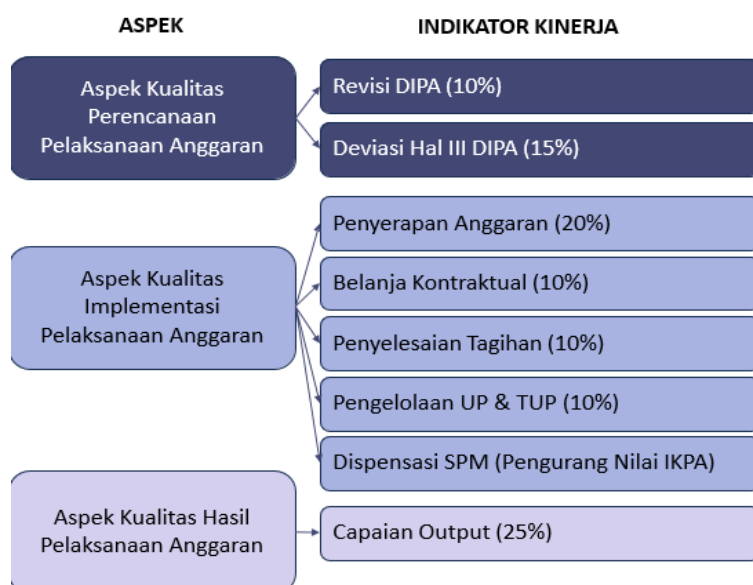
Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp.87.373.400,- dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp.84.673.400,- sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp.2.700.000,-

24

Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian EKA pada tingkat satuan kerja dilakukan terhadap aspek kinerja perencanaan anggaran diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), dimana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran.

Penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Penilaian IKPA dilakukan terhadap 3 aspek yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran (25%), aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran (50%) dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%), sebagai berikut:



Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$(Nilai\ EKA \times 50\%) + (Nilai\ IKPA \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

Nilai NKA	Kategori	Konversi
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50.01 s.d 60	Kurang	2
60.01 s.d 80	Cukup	3
80.01 s.d 90	Baik	4
90.01 s.d 1000	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya tahun 2025 diperoleh dari aplikasi OMSPAN untuk nilai IKPA yang dapat diukur setiap bulan, aplikasi Smart DJA untuk nilai EKA yang dapat diukur setiap bulan berjalan. Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 mengalami perubahan frekuensi pengukuran. Pada tahun 2024, diukur setiap bulan, sedangkan pada tahun 2025 dilakukan pada akhir tahun (bulan kedua belas) tahun 2025.

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran menilai kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hasil dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pada dokumen tersebut, target indikator 5 ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	5	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran menilai kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hasil dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diukur pada akhir tahun 2025. Pada triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa kali revisi anggaran sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025 yang ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan RI dengan diterbitkannya Surat Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 oleh Sekretaris Utama BPOM tanggal 04 Februari 2025. Berdasarkan surat tersebut dari total alokasi anggaran sebesar Rp22.128.308.000,- efektif menjadi Rp8.877.527,-.

Sebelumnya, setelah DIPA Tahun Anggaran 2025 terbit tanggal 02 Desember 2024, telah dilakukan revisi blokir mandiri belanja perjalanan dinas sebesar Rp 1.294.901.000,- sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Sekretaris Utama BPOM tentang Penyampaian Data Pemblokiran dalam rangka Efisiensi Perjalanan Dinas dan *Non Quick Win* Tahun 2025 tanggal 09 Desember 2024. Setelah beberapa kali mengalami revisi dengan revisi terakhir pada triwulan I berdasarkan Surat Sekretaris Utama tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 tanggal 21 Maret 2025, terhadap blokir belanja barang dan belanja modal, pagu anggaran BBPOM di Palangka Raya yang efektif dapat digunakan menjadi Rp 17.235.978.000,-

Sebagai tindak lanjut atas dinamika pelaksanaan anggaran pada triwulan I dengan dilakukannya beberapa kali revisi anggaran berupa pemblokiran mandiri pada belanja barang, belanja modal dan pemenuhan gaji PPNPN calon PPPK, terbit surat Direktur Pelaksana Anggaran nomor S-50/PB.2/2025.

Hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 pada tanggal 20 Februari 2025 dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama triwulan I TA 2025.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	043	003	432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.

- Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan perencanaan kegiatan.
- Melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan memastikan dokumen telah sesuai.
- Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.
- Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2025 diukur pada bulan keduabelas (akhir tahun) berbeda dengan pengukuran sebelumnya. Perbedaan frekuensi pengukuran ini sebagai tindak lanjut perbaikan evaluasi atas pelaksanaan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran yang lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- Nilai indikator NKA diperoleh dari Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam pengukurannya, frekuensi dinamika perubahan sangat tinggi mengikuti kebutuhan penilaian kedua direktorat tersebut, yang dapat berubah sewaktu-waktu serta sangat dipengaruhi oleh kebijakan penganggaran yang terjadi pada waktu tersebut.
- Indikator Nilai Kinerja Anggaran pada periode Renstra 2020-2024 setiap tahunnya berubah dari sisi pengukuran, tata cara penilaian serta sulit dicapai.

Mempertimbangkan dinamika penilaian tersebut, pada tahun 2025, indikator NKA diukur pada akhir tahun anggaran. Pada triwulan I tahun 2025, seiring dengan dinamika kebijakan terkait pengelolaan anggaran, diterbitkan Surat Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 nomor S-50/PB.2/2025 oleh Direktur Pelaksana Anggaran pada tanggal 20 Februari 2025 sehingga nilai IKPA pada triwulan I direlaksasi menjadi 100.

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2025 yang mempengaruhi kinerja pengawasan Obat dan Makanan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, dan penggunaan anggaran dilakukan perubahan proporsi besaran uang persediaan. Dimana semula uang persediaan sebesar 300 juta untuk tunai, dan 200 juta untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP), diubah menjadi 36 juta tunai dan 24 juta untuk

KKP. Dengan diturunkannya besaran uang persediaan, hal tersebut belum diikuti dengan frekuensi pengembalian pertanggungjawaban keuangan seiring dengan diberlakukannya efisiensi anggaran, perubahan lokus pengawasan, perubahan target, perubahan sistem kerja WFO-WFH, digitalisasi pada beberapa sistem, termasuk menekan penggunaan ATK menjadi *paperless*.

Faktor keberhasilan yang lain, adalah pada pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan percepatan proses pengadaan barang dan jasa berupa penyelesaian belanja modal pada triwulan I berupa pelaksanaan pengadaan dan pembayaran untuk pengadaan sarana prasarana perkantoran dan alat pengadaan data. Pada pengadaan belanja modal alat laboratorium telah selesai dilakukan sampai dengan tahap kontrak dengan estimasi barang datang pada triwulan II.

Dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan I, meski telah dilakukan relaksasi penilaian, beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Adanya efisiensi anggaran, yang diikuti dengan penurunan besaran uang persediaan, dimana salah satunya adalah penggunaan uang bersediaan KKP. Meski telah diturunkan, masih kesulitan dalam hal penggunaannya, karena menurunnya jumlah anggaran, dan jenis barang yang dapat dibelanjakan menggunakan KKP berdampak efisiensi.
- Perubahan proses pengadaan yang beralih dari e-katalog versi 5, menjadi e-katalog versi 6 sehingga dibutuhkan penyesuaian sistem, dimana pada versi 6 dilakukan integrasi pembayaran dan belum mendukung pembayaran sistem termin terhadap barang yang telah diterima sehingga tidak mendorong penyerapan anggaran dan pemenuhan RPD Halaman III DIPA.
- Target penyerapan anggaran yang tinggi meski telah mengacu pada pagu efektif yang dapat digunakan, khususnya belanja barang. Pagu efektif belanja barang cukup tinggi namun itu merupakan anggaran operasional dengan pembayaran termin setiap bulan untuk jasa outsourcing dan jasa langganan dan daya.
- Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan. Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun.

Atas kendala yang dihadapi tersebut, kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan perlu diikuti dengan perubahan penilaian IKPA dalam hal ini target penyerapan anggaran yang sulit untuk dicapai khususnya pada belanja barang.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektivitas pengelolaan anggaran berperan dalam memastikan APBN digunakan secara optimal dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut dinilai melalui pencapaian output yang diukur setiap bulan dengan pemberian bobot tertinggi.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palangka Raya	461,215,174	461,215,174	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikatozr IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi nya karena perhitungan output baru dapat dinilai diakhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp1.876.549.600,- dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp842.201.350.- sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp1.034.348.250.-

25

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatur kerangka kerja dan proses yang digunakan pemerintah untuk mengelola, mengawasi, dan memantau operasional dan sumber daya yang dimilikinya.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, SPIP mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini mencakup identifikasi dan analisis risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pada Renstra tahun 2025-2029, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, manajemen risiko menjadi salah satu indikator kinerjanya.

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Dalam penerapannya dilakukan penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi mengimplementasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Tingkat maturitas risiko digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan implementasi manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Penilaian manajemen risiko mencakup semua aspek kegiatan dan proses yang dijalankan, mulai dari tingkat strategis hingga operasional. Penilaian mencakup lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Lima kategori tingkat maturitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dalam tabel berikut:

Kategori Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai diatur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan.

Indikator Nilai Maturitas Manajemen Risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang dilakukan penilaiannya pada akhir tahun.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Dengan Target Triwulan Yang Bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target TW I Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	0	0	Belum dapat dinilai capaiannya	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko menilai tingkat maturitas manajemen risiko yang meliputi komunikasi dan konsultasi; penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, revidi dan pemantauan BBPOM di Palangka Raya pada semester II tahun 2025. Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Indeks Manajemen Risiko ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Yang Bersangkutan Dengan Realisasi Triwulan Sebelumnya

Triwulan I tahun 2025 merupakan triwulan pertama pengukuran indikator kinerja atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pada dokumen tersebut, target indikator 3 ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan Dengan Target Tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Tahun 2025	Kriteria Capaian Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	3	0	Penilaian dilakukan diakhir tahun	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko menilai tingkat maturitas manajemen risiko yang meliputi komunikasi dan konsultasi; penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, revidi dan pemantauan BBPOM di Palangka Raya pada semester II tahun 2025.

Pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, target indikator Indeks Manajemen Risiko ditetapkan diukur pada bulan kedua belas tahun 2025, sehingga akan diukur realisasinya pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka raya merupakan indikator kinerja baru pada dokumen Renstra 2025-2029 untuk mengukur tata kelola pemerintahan BBPOM di Palangka Raya yang mulai diukur menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025. Meskipun demikian, Manajemen Risiko telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2024 BBPOM di Palangka Raya adalah 2.938 dengan tingkat maturitas *Risk Aware*, di dalamnya masih menunjukkan terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut:

- Belum seluruh tim yang mengelola manajemen risiko mengikuti pelatihan manajemen risiko dan belum terdapat perencanaan pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai
- Belum menyusun kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak dan belum terdapat kertas kerja yang disertai dengan justifikasi penentuan level risiko
- Masih terdapat tindakan mitigasi pada Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang sama dengan aktivitas pengendalian yang telah dilakukan (*existing control*)

- Belum memanfaatkan Rapat Evaluasi Kinerja maupun Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melakukan reviu/pembahasan manajemen risiko yang dikaitkan dengan capaian kinerja
- Belum menindaklanjuti masukan Auditor Internal sistem manajemen terintegrasi terkait manajemen risiko

Terhadap beberapa kelemahan penerapan Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya tahun 2024, direkomendasikan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- Menyusun rencana pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai secara berkesinambungan, serta memastikan seluruh tim yang mengelola manajemen risiko telah mendapatkan pelatihan terkait manajemen risiko
- Menyusun kriteria kemungkinan dan dampak dan kertas kerja yang disertai dengan justifikasi penentuan level risiko
- Melakukan reviu tindakan mitigasi dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- Melakukan pembahasan manajemen risiko dikaitkan dengan capaian kinerja pada rapat evaluasi misalnya pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) atau rapat evaluasi kinerja
- Menindaklanjuti seluruh masukan Auditor Internal terkait manajemen risiko

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Atas rekomendasi perbaikan pada penilaian tahun 2024, beberapa hal yang telah di tindaklanjuti oleh BBPOM di Palangka Raya pada triwulan I adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi risiko pada masing-masing Indikator kinerja utama tahun 2025 berupa laporan manajemen risiko semester I tahun 2025, pada 20 Januari 2025
- Melakukan dialog kinerja dan identifikasi risiko terhadap 15 indikator kinerja pada Renstra 2025-2029, pada 11-17 Februari 2025
- Melakukan integrasi manajemen risiko dengan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN, pada 15 Maret 2025
- Menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko untuk seluruh pegawai dan tim pengelola manajemen risiko, pada 24 Februari 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2025-2029. Pada Renstra 2025-2029 terdapat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan serta indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja tahun 2025 disusun pada tanggal 22-24 Januari 2025 dengan kegiatan desk penetapan target Renstra 2025-2029, diikuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tanggal 10 Februari 2025. Manajemen risiko diintegrasikan dengan manajemen kinerja pada Sasaran Kinerja Pegawai yang baru dilaksanakan sosialisasinya pada tanggal 3 Maret 2025. Pelaporan manajemen risiko semester I tahun 2025 dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025 sehingga laporan manajemen risiko yang dilaporkan masih mengacu pada sasaran kegiatan yang terdapat pada dokumen Renstra 2020-2024. Terhadap perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut, perlu segera direncanakan reviu daftar risiko masing-masing indikator kinerja.

Keberhasilan penerapan manajemen risiko BBPOM di Palangka Raya didukung oleh komitmen Kepala Unit kerja, ketua tim kerja dan seluruh pegawai di lingkungan BBPOM di Palangka Raya dalam membangun budaya risiko, pemantauan dan pengendalian risiko serta komunikasi yang efektif. Dengan penerapan manajemen risiko membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui identifikasi, analisis dan pengelolaan berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi dan layanan publik. Dengan manajemen risiko dapat

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintah, serta membangun kepercayaan publik.

F. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Per Sasaran

Indikator Kinerja	Target Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Realisasi Anggaran TW 1 Tahun 2025	Capaian Realisasi Anggaran TW 1 2025	Capaian Indikator Kinerja TW I Tahun 2025	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Palangka Raya	90,000	90,000	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA Triwulan 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100 maka target RPD telah kami disesuaikan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2025 sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini belum dapat dihitung efisiensi nya karena perhitungan output baru dapat dinilai di akhir tahun.

Alokasi Anggaran untuk indikator ini adalah senilai Rp.129.710.100,- dan telah dilakukan blokir anggaran senilai Rp.127.010.100,- sehingga pagu aktif yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp.2.700.000,-

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan 1 Tahun 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang diindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Retargeting sampel akibat adanya efisiensi anggaran	1. Melaksanakan sampling di akhir bulan untuk target bulan berikutnya supaya bisa masuk kelaboratorium di awal bulan 2. Melakukan pengujian sampel sesuai dengan timeline yang ditetapkan 3. Konsisten menjaga realisasi sesuai perencanaan untuk mencapai target	TW II	-	Menjaga konsistensi realisasi sesuai dengan perencanaan dan menyusun ulang perencanaan karena pengembalian anggaran dan pengembalian target	TW IV	Capaian indikator kinerja tidak dapat disimpulkan (>110%)
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTDESO		1. Menyusun rencana pelaksanaan KIE Farmakovigilans 2. Melaksanakan KIE Farmakovigilans pada Triwulan II 3. Melakukan Pemantauan pelaporan e-MESO secara berkala oleh sarana kesehatan	TW II	Menyusun rencana pelaksanaan KIE Farmakovigilans	Pelaksanaan KIE Farmakovigilans	TW II	Telah dilakukan persiapan KIE Farmakovigilans yang akan dilaksanakan tanggal 24 April 2025, dengan mengundang 45 peserta tenaga kesehatan/tenaga medis.

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampling pangan targeted dan PIRT dilakukan bersamaan oleh petugas yang sama	Sampling pangan targeted MD/ML dan sampel pangan PIRT dilakukan dalam waktu yang berbeda atau oleh petugas berbeda untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kategori sampling.	TW II	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.	Manajemen dalam pembagian penugasan sampling antar indikator agar tidak tumpang tindih	TW II	Perencanaan dalam pembagian tugas sampling TW 2 dilakukan oleh petugas yang berbeda.
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	Belum diperoleh angka capaian indikator kinerja	Mengikuti progress pembahasan DO	TW IV	Mempersiapkan sarana prasarana untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan	Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu	TW II	Dikecualikan dari perhitungan kinerja TW I tahun 2025,
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	penyesuaian target akibat adanya efisiensi anggaran	1. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan UMKM Lokal dalam penerapan CPPOB IRT dan kesesuaian label pangan olahan 2. Retargeting sampel PIRT	1. TW IV 2. TW I	Retargeting sampling	1. pembinaan pelaku usaha PIRT dalam pembuatan label bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) 2. pengembangan inovasi terkait pembuatan label yang benar menurut peraturan perundang-undangan	TW IV	Sampling produk PIRT yang Berisiko terlaksana sesuai target pada Triwulan 2
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Persentase pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sebesar 27,59% pada akhir TW 1	Meningkatkan monev	TW IV		Melakukan desk/konsultasi/monev CAPA secara berkala dengan pelaku usaha/penanggung jawab	TW IV	Capaian indikator kinerja tidak dapat disimpulkan (>110%)
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan	Belum melakukan pengawasan ke sarana produksi karena cuma	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian	TW II		Segera melakukan pengawasan ke saran produksi pada bulan April	TW II	Pemeriksaan sarana produksi sediaan famasi mulai

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	ada 3 target direncanakan di TW2	adalah akumulatif setiap TW					dilakukan pada TW2 di bulan April
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana industri pangan olahan	Melakukan pengawasan di tiap triwulan karena capaian adalah akumulatif setiap TW	TW II	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi pangan olahan di Kab. Kotawaringin Timur pada bulan April 2025	Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan di tiap TW hingga TW 3	TW III	Jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah diperiksa sebanyak 7 sarana.
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum bisa dihitung capaian IK	Mengikuti progress pembahasan DO	TW II		Koordinasi dan konsultasi dengan roren dan unit pengampu	TW II	dikecualikan dari perhitungan kinerja TW I tahun 2025,
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan bersamaan dengan Intensifikasi Pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri	Perlunya menekankan kembali kepada petugas untuk segera melaporkan hasil pemeriksaan sarana pada SIPT, selain pada laporan bit.ly Inwas.	TW II	Penekanan terhadap petugas agar pelaporan hasil pemeriksaan tidak melebihi timeline	Pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan di TW 2 belum dilakukan hingga minggu ketiga bulan April 2025	TW II	Pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan di TW 2 mulai akan dilakukan pada minggu keempat bulan April 2025
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan		Konsisten dengan realisasi perencanaan untuk mencapai target	TW IV		Memperhatikan realisasi dan target yang ditetapkan supaya capaian baik/sangat baik	TW IV	Capaian indikator kinerja tidak dapat disimpulkan (>110%) baik
12	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan pengawasan dilakukan hanya pada 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja	- melakukan efisiensi perjadin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan - meningkatkan pembinaan dan pengawasan	TW I	Efisiensi perjadin luar kota dengan menggabungkan beberapa target kegiatan	-	-	pengawasan terlaksana sesuai juknis dengan metode Luring

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			produk pangan fortifikasi yang beredar di Provinsi Kalimantan Tengah					
13	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" merupakan lanjutan penilaian Indikator Kinerja terkait Standar Kemampuan Laboratorium pada periode renstra sebelumnya yaitu "Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP". Namun kedua indikator ini mempunyai cara perhitungan dan formula yang berbeda yang terletak pada baseline perhitungan serta persentase komposisi penilaian yang dimana sebelumnya dihitung menggunakan rata-rata namun pada tahun 2025 perhitungan menggunakan proporsi penilaian yang berbeda	Diperlukan strategi untuk mencapai target indikator dengan menyusun perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengendalikan faktor-faktor risiko penyebab kegagalan pencapaian target indikator.	TW I-TW IV	1. Pembuatan roadmap pemenuhan SKL tahun 20252. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW 1	1. Monitoring dan evaluasi terhadap roadmap pemenuhan SKL pada TW II-TW IV	TW II-TW IV	Nilai realisasi indikator pada TW 1 sebesar 75 telah mencapai target triwulan I sebesar 69,5 dengan capaian 107,91 dan telah melampaui target tahunan sebesar 72,5 dengan Capaian 103,45 %

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		pada masing-masing komponen. Nilai realisasi indikator “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP” pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,57 % dengan capaian 102,49 % telah mencapai target tahun 2024 yang ditetapkan.						
14	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Realisasi melampaui target dengan kriteria sangat baik	1. Penyusunan konten KIE dan Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan Agenda Setting Nasional Tahun 2025.2. Memperhatikan ragam kegiatan KIE dengan merujuk pada Top 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat, yaitu KIE Penyuluhan Langsung (41,4%), media social (13,9%), dan webminar/daring (9,5%)	TW IV	1. Menyusun perencanaan KIE sesuai dengan Juknis KIE tahun 20252. Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE triwulan I tahun 2025 (nilai: 89,83)	1. Melakukan pengukuran tingkat efektivitas KIE secara berkala2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIE secara berkala3. Meningkatkan social media management melalui konten yang menarik dan selaras dengan Agenda Setting 20254. Melaksanakan KIE dan menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, influencer, dan tema serta pelaksanaan kegiatan yang menarik. 5. Meningkatkan penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan tagline “bukan kata orang pastikan kataBPOM”	TW IV	1. Telah tersusun rencana KIE Tahun 20252. Telah dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Triwulan I3. Telah dilaksanakan KIE dan publikasi media sosial sesuai dengan agenda setting 2025 periode Januari - Maret 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi TW I mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi TW I mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria kurang	Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran	TW IV		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap bulannya	TW IV	Realisasi TW I mencapai target yang telah ditetapkan dengan kriteria tercapai/melampaui
18	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. adanya carry over pendampingan UMKM Kosmetik dari tahun sebelumnya 2. perubahan tahapan pendampingan UMKM Pangan Olahan	Mengikuti Sosialisasi Juknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan	TW II	Melanjutkan pendampingan UMKM kosmetik yang carry over dari tahun sebelumnya	melaksanakan tahapan pendampingan yang terlompai	TW II	1. Telah terlaksananya pendampingan UMKM kosmetik sesuai juknis 2. telah terlaksananya tahapan pendampingan sesuai juknis
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Belum adanya Informasi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang bernilai A1 untuk di Tindak Lanjuti 2. Tindak Lanjut Informasi terkait pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan gagal saat	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan pihak2 lain, dalam	TW IV	-	1. Evaluasi Hasil kegiatan/operasi intelijen kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin 2. Koordinasi dan kolaborasi dengan APH dan pihak2 lain 3. Monev laporan Kemajuan Penyidikan rutin	TW IV	Telah tercapai 1 (satu) perkara dan telah sampai tahap 2 pada akhir TW 1 tahun 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		dilakukan Operasi penindakan ³ . Capaian indikator penyidikan TW 1 terkait penanganan perkara melebihi target TW 1	menentukan cara bertindak yang lebih terukur, waspada, dan sesuai prosedur untuk menjamin keberhasilan operasi serta keselamatan personel di lapangan terutama ketika informasi menunjukkan bahwa target operasi merupakan seorang residivis, ³ . Monev laporan Kemajuan Penyidikan					
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Kualitas hasil Patroli Siber oleh Tim Patber Lintas Fungsi tidak semuanya memenuhi standar yang ditetapkan	dilakukan monitoring dan reviu secara berkelanjutan terhadap hasil patroli siber	TW IV	-	Monev dan reviu secara rutin dari hasil Patroli Siber	TW IV	Telah tercapai hasil patroli siber sesuai standar yang ditetapkan sd akhir TW 1 tahun 2025
21	Indeks Pelayanan Publik UPT		1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan layanan ² . Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik	TW IV	1. Melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan Tahun 2025 pada berbagai media (SP dan Maklumat Layanan) pada area layanan publik, media sosial, media luar ruang, dan sub	1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayan publik melalui pembelajaran mandiri, pelatihan, mengikuti sosialisasi terkait pelayanan publik, coaching dan mentoring 2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan	TW IV	1. Telah terlaksana pengukuran SPAK, SPKP dan SKM mandiri Triwulan I dan telah dipublikasikan ² . Telah terlaksana sosialisasi SP Tahun 2025 pada kanal resmi BBPOM di Palangka Raya ³ . Ruang Pelayanan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			4. Mengembangkan Inovasi Layanan Publik5. Mengembangkan Layanan Publik Inklusif bagi Kelompok Rentan		site BBPOM di Palangka Raya	pelayanan pelanggan prioritas/kelompok rentan 3. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Tele Public Service Smart Laura pada MMP Target (Kab Barito Selatan, Kab. Pulang Pisau) dan kabupaten potensial lainnya4. Melaksanakan pemberdayaan kelompok rentan melalui pembentukan kader, fasilitator UMKM dan KIE		Publik sedang dalam proses renovasi.
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		1. Implementasikan Road Map RB utk TW II 2025 2. Implementasikan Road Map AOC utk TW II 2025	TW II				
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1. Laporan evaluasi internal masih belum sesuai dengan pedoman SAKIP 2. Penyajian kendala dan/atau rencana tindak lanjut masih belum selaras antara simetris, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja3. Belum semua SDM yang terlibat SAKIP mengikuti pelatihan implementasi SAKIP	1. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 20242. Memperbaiki kualitas pelaksanaan akuntabilitas Balai3. Perencanaan pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP	TW III	1. Pengembangan kompetensi SDM tim SAKIP	1. Laporan Evaluasi internal TW I memperhatikan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 20242. Penyusunan lakip interim tw I 20253. Finalisasi tindak lanjut evaluasi SAKIP 20244. Persiapan penilaian indikator AKIP 2025 melalui SAPA APIP	TW III	rencana aksi yang dicanangkan pada triwulan I yaitu pengembangan kompetensi tim SDM telah tercapai

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT	blokir anggaran perjadi, belanja barang dan belanja modal dalam rangka efisiensi anggaran	efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, perubahan sampling dan pengujian, digitalisasi	TW IV	perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan lokus, perubahan sistem kerja, digitalisasi	pengawasan RPD halaman III DIPA, pengawasan pencapaian target output dan pengawasan pengelolaan UP dan TUP	TW IV	rencana aksi yang dicanangkan selesai pada triwulan IV
25	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	Daftar risiko disusun sebelum penetapan PK 2025, cascading IKU pusat ke Balai dan IKU Direktif	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	TW II	N/A	Reviu daftar risiko pasca penyusunan MPH/SKP	TW II	rencana aksi yang dicanangkan selesai pada triwulan IV

3.3 Realisasi Anggaran

A. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) Selama tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran melalui 4 (empat) kali Revisi DIPA, terdiri dari 2 Revisi kewenangan KPA dan 2 Revisi Kewenangan DJA sebagai berikut :

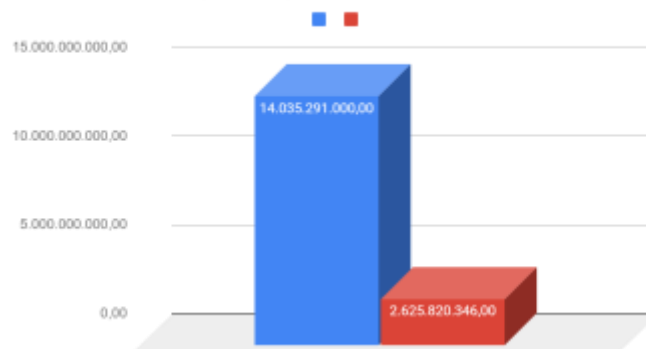
- Revisi pertama kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian anggaran dengan rencana kegiatan di tahun 2025.
- Revisi kedua kewenangan DJA dalam rangka Revisi Efisiensi Belanja BPOM Tahun Anggaran 2025. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Sekretaris Utama BPOM no B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 tanggal 04 Februari 2025. Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan Blokir anggaran mandiri senilai Rp Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola menjadi Rp 14.035.291.000,-
- Revisi ketiga kewenangan KPA dalam rangka penambahan anggaran untuk pembayaran gaji PPNPN di tahun 2025.
- Revisi keempat Kewenangan DJA dalam rangka pemenuhan sesuai gaji PPNPN dan Realokasi anggaran Reagensia dari Sediaan farmasi ke Pangan Rp 50.000.000,- Revisi anggaran dalam KRO yang sama sehingga tidak mempengaruhi total pagu.

Pada akhir triwulan 1 tahun 2025 pagu yang dikelola Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 14.035.291.000,-

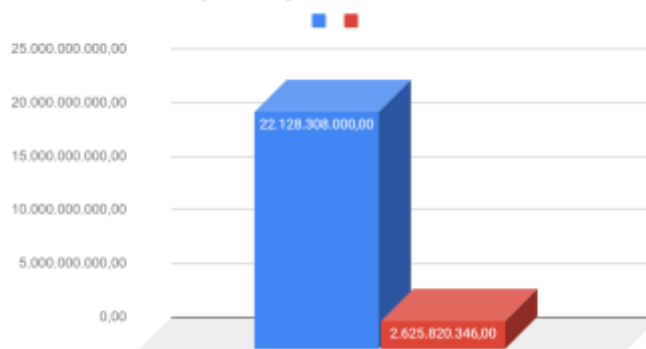
Program	Pagu Anggaran	Blokir anggaran	Pagu Aktif	Realisasi Anggaran	Persenta se terhadap Pagu Awal	Persenta se terhadap Pagu Aktif
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.026.074.000	6.448.951.000	5.577.123.000	352.064.528	2,93%	6,31%
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.102.234.000	1.644.066.000	8.458.168.000	2.287.872.868	22,65%	27,05%
Total	22.128.308.000	8.093.017.000	14.035.291.000	2.639.937.396	11,93%	18,81%

Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 1 tahun 2025 adalah Rp 2.625.820.346,- yang berarti 11.87% dari pagu awal dan 18.71% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya

Realisasi dibandingkan Pagu Aktif



Realisasi dibandingkan Pagu Awal



Berikut realisasi anggaran per jenis belanja BBPOM di Palangka Raya sampai dengan triwulan 1 tahun 2025.

Jenis Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu Awal	5.530.734.000	10.694.106.000	5.903.468.000
Realisasi	1.332.126.142	1.074.194.204	219.500.000
Capaian	24,09%	10,04%	3,72%

Strategi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran sebagai berikut:

- Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
- Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.
- Memastikan target tercapai dengan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil kerja output dan pengeluaran anggaran. Sehingga dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah yang bisa menghambat pencapaian target.

B. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Output

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya didukung dengan 22 Rincian Output dan berikut hasil pengukuran realisasi output dibandingkan dengan realisasi anggaran triwulan 1 tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output			Anggaran				
		Target Triwulan 1	Realisasi sd Triwulan 1	Capaian thd Target Triwulan 1	Pagu Tahun 2025	Target Anggaran Triwulan 1	Realisasi Anggaran sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1
a	b	d	e	$g = (e/d) \times 100$	h	i	j	$k = (j/h) \times 100$	$l = (j/i) \times 100$
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	3	3	100,00	72.439.000	100.000	100.000	0,14	100,00
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	182	182	100,00	145.537.000	200.000	200.000	0,14	100,00
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	318	318	100,00	193.733.000	19.755.000	19.755.000	10,20	100,00
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*	30,77%	30,77%	100,00	736.000.000	17.681.873	17.681.873	2,40	100,00
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	6	6	100,00	78.895.000	2.281.600	2.281.600	2,89	100,00
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia*	83,33%	83,33%	100,00	150.000.000	119.500.000	119.500.000	79,67	100,00
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	100,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	25,39%	25,39%	100,00	1.707.506.000	1.239.900	1.239.900	0,07	100,00
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	1	1	100,00	358.335.000	27.047.000	27.047.000	7,55	100,00
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	5,00%	5,00%	100,00	344.372.000	100.000	100.000	0,03	100,00
11	QDB.002 Desa Pangan Aman*	5,00%	5,00%	100,00	501.455.000	0	0	0,00	Belum ada target bulan ini
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya*	5,00%	5,00%	100,00	137.071.000	0	0	0,00	Belum ada target bulan ini
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	0	0	Belum ada target bulan ini	41.950.000	0	0	0,00	Belum ada target bulan ini
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	19,00%	21,67%	114,05	43.762.000	0	0	0,00	Belum ada target bulan ini
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	51	51	100,00	447.082.000	15.291.715	15.291.715	3,42	100,00
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	56	56	100,00	768.855.000	11.624.440	11.624.440	1,51	100,00

No	Program/ Kegiatan/ Output	Output			Anggaran				
		Target Triwulan 1	Realisasi sd Triwulan 1	Capaian thd Target Triwulan 1	Pagu Tahun 2025	Target Anggaran Triwulan 1	Realisasi Anggaran sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1
a	b	d	e	$g = (e/d) \times 100$	h	i	j	$k = (j/h) \times 100$	$l = (j/i) \times 100$
	yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT								
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1	1	100,00	20.688.000	0	0	0,00	Belum ada target bulan ini
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	100,00	4.208.000	4.208.000	4.208.000	100,00	100,00
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	26	100,00	402.118.000	23.335.000	23.335.000	5,80	100,00
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	0	0	Belum ada target bulan ini	5.772.068.000	0	0	0,00	Belum ada target bulan ini
21	EBA.956 Layanan BMN*	8,33%	8,33%	100,00	8.000.000	107.100	107.100	1,34	100,00
22	EBA.994 Layanan Perkantoran*	8,33%	8,33%	100,00	10.094.234.000	2.287.765.768	2.287.765.768	22,66	100,00

C. Realisasi anggaran dibandingkan capaian Kinerja

Balai Besar POM di Palangka Raya dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 memiliki 25 Indikator Kinerja berikut pencapaian Kinerja dan Anggaran di Triwulan 1 tahun 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran*		
			Target	Realisasi	Capaian	pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	100	114,61	11.624.440	11.624.440	100,00
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Belum ada target bulan ini	0	0	Belum ada target bulan ini
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98,69	116,11	7.645.858	7.645.858	100,00
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0,00	0	0	Belum ada target bulan ini
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,43	109,92	7.645.858	7.645.858	100,00
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	64	72,41	113,14	8.799.000	8.799.000	100,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran*		
			Target	Realisasi	Capaian	pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
		ditindaklanjuti oleh stakeholder						
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0,00	0	0	Belum ada target bulan ini
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0,00	0	0	Belum ada target bulan ini
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	0	0,00	6.540.500	6.540.500	100,00
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88,57	110,71	6.540.500	6.540.500	100,00
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99,21	112,74	1.455.000	1.455.000	100,00
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100,00	4.208.000	4.208.000	100,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,5	75	107,91	1.239.900	1.239.900	100,00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	89,83	103,03	22.036.600	22.036.600	100,00
		15 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	100,00	100.000	100.000	100,00
		16 Jumlah desa pangan aman	5	5	100,00	0	0	Belum ada target bulan ini
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	100,00	9.700.000	9.700.000	100,00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	19	21,67	114,05	0	0	Belum ada target bulan ini

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran*		
			Target	Realisasi	Capaian	pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
		IP CPPOB Pangan Olahan						
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	18	33,33	185,17	27.047.000	27.047.000	100,00
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100.000	100.000	100,00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	Belum ada target bulan ini	200.000	200.000	100,00
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	2.063.659.567	2.063.659.567	100,00
		23 Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	90.000	90.000	100,00
		24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	461.215.174	461.215.174	100,00
		25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	90.000	90.000	100,00

D. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain, efisiensi tercapai jika persentase capaian output sama atau lebih tinggi daripada persentase capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

1) Pengukuran Efisiensi Output

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Belum ada target bulan ini	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	114,05	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Belum ada target bulan ini	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
21	EBA.956 Layanan BMN	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)

Berdasarkan hasil pengukuran 16 (enam belas) RO telah melaksanakan kegiatannya secara Efisien dan 6 (enam) RO lainnya belum dapat dinilai disebabkan Belum ada realisasi anggaran maupun Realisasi Output yang dapat dibandingkan capaiannya. Secara umum efisiensi ini terjadi karena semua RO mendapatkan relaksasi penyesuaian output dan rencana penarikan dana sesuai surat direktur pelaksana anggaran nomor S-50/PB.2/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, untuk penilaian IKPA TW 1 dimana untuk semua perhitungan IKPA diberikan nilai 100.

2) Pengukuran Efisiensi per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Capaian Realisasi	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114,61	100,00	1,15	0,15	100% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116,11	100,00	1,16	0,16	100% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,92	100,00	1,10	0,10	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	113,14	100,00	1,13	0,13	100% (efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0,00	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110,71	100,00	1,11	0,11	100% (efisien)

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Capaian Realisasi	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112,74	100,00	1,13	0,13	100% (efisien)
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	107,91	100,00	1,08	0,08	100% (efisien)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,03	100,00	1,03	0,03	100% (efisien)
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
16	Jumlah desa pangan aman	100,00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	114,05	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	185,17	100,00	1,85	0,85	88% (efisien)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi per Indikator Kinerja rentang tingkat efisiensi adalah dari -1,00 hingga 1,85 dari 25 Indikator kinerja yang ada di Balai Besar POM di Palangka Raya. 13 (tiga belas) Indikator telah Efisien dalam mencapai targetnya, 12 (dua belas) Indikator belum dapat dinilai tingkat efisiensinya karena belum ada capaian realisasi indikator maupun capaian realisasi anggaran. Untuk upaya efisiensi yang dilakukan per Indikator dibahas dalam Bab 3.1 masing-masing Indikator Kinerja.

3) Pengukuran Efisiensi per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator	Capaian Realisasi	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,75	100	0,97	-0,03	Tidak Efisien
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	107,91	100,00	1,08	0,08	100% (efisien)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,76	100,00	1,01	0,01	100% (efisien)
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	114,05	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	185,17	100,00	1,85	0,85	88% (efisien)
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	100,00	100,00	1,00	0,00	100% (efisien)
8	Layanan Publik UPT yang prima	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Belum ada target bulan ini	100,00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

Pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan 1 Tahun 2025 diukur dengan 9 sasaran kegiatan. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,03 sampai 0,08. Berikut analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan dengan indikator kinerja yang dapat diukur pada tahun 2025 :

- I. Sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 1.680.693.000,- dengan Blokir anggaran Rp 1.400.081.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 280.612.000,- terdiri atas 11 Indikator Kinerja dan hanya 7 yang capaiannya dapat dinilai sebagai pembagi dalam dalam pengukuran efisiensi sasaran kegiatan ini. Dari hasil pengukuran Efisiensi sasaran kegiatan ini tidak efisien karena dengan capaian efisiensi -0.03 secara total per kegiatan Capaian Input yang digunakan lebih besar dibandingkan Output yang dihasilkan, ini akibat satu indikator yaitu “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” yang capainya 0% sehingga mempengaruhi nilai sasaran kegiatan secara keseluruhan hal ini akibat belum terlaksanakan pengawasan ke sarana produksi pada triwulan I sehingga tidak ada realisasi dan capaian.
- II. Sasaran kegiatan 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi” pagu anggaran Rp 4.208.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di bulan ini dengan capain 100% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang digunakan
- III. Sasaran kegiatan 3 “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 7.479.574.000,- dengan blokir anggaran Rp 3.050.135.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 4.429.439.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di bulan ini dengan capain 107.91% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 1.239.900,-
- IV. Sasaran kegiatan 4 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 1.255.526.000,- dengan Blokir anggaran Rp 1.054.344.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 201.182.000,- terdiri atas 4 Indikator Kinerja dan berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dengan Tingkat Efisiensi 1,01 dimana Output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 31.836.600,-
- V. Sasaran kegiatan 5 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pagu anggaran Rp 43.762.000,- dengan blokir anggaran Rp 36.162.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 7.600.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di bulan ini dengan capain 107.91% untuk pengukuran efisiensi belum dapat dilakukan karena belum ada anggaran yang digunakan dalam mencapai output.
- VI. Sasaran kegiatan 6 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pagu anggaran Rp 358.335.000,- dengan blokir anggaran Rp 285.711.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 72.624.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di bulan ini dengan capain 185.17% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 27.047.000,-
- VII. Sasaran kegiatan 7 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” pagu anggaran Rp

72.439.000,- dengan blokir anggaran Rp 71.339.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 1.100.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan telah selesai dilaksanakan di bulan ini dengan capaian 100.00% sehingga hasil pengukuran efisiensi Sasaran kegiatan ini Efisien dimana output yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang digunakan. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 100.000,-

VIII. Sasaran kegiatan 8 “Layanan Publik UPT yang prima” pagu anggaran Rp 145.537.000,- dengan blokir anggaran Rp 127.812.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola senilai Rp 17.725.000,- terdiri atas 1 Indikator Kinerja dan untuk triwulan ini belum dapat dinilai capaiannya karena baru dilakukan penilaian Indikator di Akhir tahun. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 realisasi yang digunakan adalah senilai Rp 200.000,-

IX. Sasaran kegiatan 9 “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” pagu anggaran Rp 11.088.234.000,- dengan Blokir anggaran Rp 2.063.433.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola untuk sasaran kegiatan ini Rp 9.024.801.000,- terdiri atas 4 Indikator Kinerja dan belum dapat dinilai capaiannya karena baru dinilai di akhir tahun. untuk realisasi anggaran sasaran kegiatan ini sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 adalah Rp 2.525.054.741,-

BAB

4



Penutup

- Kesimpulan
- Rekomendasi

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 tahun 2025 merupakan triwulan pertama dalam rencana strategis 2025-2029 ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 25 (Dua Puluh Lima) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pencapaian Kinerja Organisasi BBPOM di Palangka Raya pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 99.43% dengan Kriteria BAIK.

Realisasi capaian 25 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasinya 100 dari target 87,25 dengan capaian 114,61 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
2. Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
3. Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasinya 98,69 dari target 85 dengan capaian 116,11 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan.
4. Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada triwulan ini dikecualikan dari penilaian Nilai Kinerja Organisasi.
5. Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasinya 93,43 dari target 85 dengan capaian 109,92 dan masuk kriteria Sangat Baik
6. Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasinya 72,41 dari target 64 dengan capaian 113,14 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan
7. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasinya 0 dari target 87 dengan capaian 0,00 dan masuk kriteria Kurang. Diakibatkan belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
8. Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan ini dikecualikan dari penilaian Nilai Kinerja Organisasi.
9. Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan ini dikecualikan dari penilaian Nilai Kinerja Organisasi.
10. Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasinya 88,57 dari target 80 dengan capaian 110,71 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan
11. Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan realisasinya 99,21 dari target 88 dengan capaian 112,74 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan
12. Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasinya 100 dari target 100 dengan capaian 100,00 dan masuk kriteria Baik

13. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasinya 75 dari target 69,5 dengan capaian 107,91 dan masuk kriteria Sangat Baik
14. Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT realisasinya 89,83 dari target 87,19 dengan capaian 103,03 dan masuk kriteria Sangat Baik
15. Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan realisasinya 5 dari target 5 dengan capaian 100,00 dan masuk kriteria Baik
16. Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman realisasinya 5 dari target 5 dengan capaian 100,00 dan masuk kriteria Baik
17. Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasinya 5 dari target 5 dengan capaian 100,00 dan masuk kriteria Baik
18. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan realisasinya 21,67 dari target 19 dengan capaian 114,05 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan
19. Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT realisasinya 33,33 dari target 18 dengan capaian 185,17 dan masuk kriteria Tidak dapat Disimpulkan
20. Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasinya 50 dari target 50 dengan capaian 100,00 dan masuk kriteria Baik
21. Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
22. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
23. Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
24. Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.
25. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM baru dilakukan penilaian di akhir tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran kegiatan BBPOM di Palangka Raya di triwulan 1 tahun 2025 ini 6 kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dan 1 kegiatan capaiannya masih dibawah 100% serta 2 sasaran kegiatan belum dapat diukur capaiannya

- I. Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT capaiannya 96,75 disebabkan terdapat satu indikator kinerja yang capainya rendah sehingga mempengaruhi capaian sasaran kegiatan secara signifikan.
- II. Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi capaiannya 100,00 dan kegiatan telah selesai dilaksanakan di triwulan 1 tahun 2025.
- III. Sasaran Kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT capaiannya 107,91 telah melampaui target.
- IV. Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT capaian 100,76 telah melampaui target.
- V. Sasaran Kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu capaian 114,05 telah melampaui target.

- VI. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT capaiannya 185,17 telah melampaui target.
- VII. Sasaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif capaian 100,00 sesuai target yang ditetapkan
- VIII. Sasaran Kegiatan Pelayanan Publik UPT yang prima belum dapat dinilai karena penilaian baru dilakukan di akhir tahun.
- IX. Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal belum dapat dinilai karena penilaian baru dilakukan di akhir tahun.

Berdasarkan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.432872/2025 tanggal 02 Desember 2024 satuan kerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengelola anggaran sebesar Rp.22.128.308.000. akhir triwulan 1 tahun 2025 pagu yang dikelola Rp.22.128.308.000,- dengan blokir anggaran Rp 8.093.017.000,- sehingga pagu aktif yang dikelola Balai Besar POM di Palangka Raya adalah senilai Rp 14.035.291.000,- Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan 1 tahun 2025 adalah Rp 2.625.820.346,- yang berarti 11.87% dari pagu awal dan 18.71% dari pagu Aktif yang dikelola BBPOM Palangka Raya. Yang terdiri atas Rp 1.332.126.142,- Belanja Pegawai, Rp 1.074.194.204,- Belanja barang dan 219.500.000,- Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi secara keseluruhan Tingkat Efisiensi BBPOM Palangka Raya adalah 1.15 yang berarti output kegiatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan dan capaiannya 0.15 dengan kriteria 100% efisien.

B. Rekomendasi.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Palangka Raya belum maksimal di triwulan 1 tahun 2025 akibat adanya satu indikator yang capaiannya kurang sehingga mempengaruhi capaian NKO secara keseluruhan ini indikator ini adalah Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kendalanya adalah belum adanya pengawasan sarana produksi sediaan farmasi pada triwulan pertama. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya adalah adanya efisiensi anggaran pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan dan target pengawasan. Selain itu, pembahasan definisi operasional yang baru selesai pada bulan Maret menyebabkan kriteria penilaian sarana produksi belum ditetapkan secara final. Tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja di triwulan berikutnya dan tahun depan, beberapa rekomendasi akan diimplementasikan. Pertama, perencanaan akan diperbaiki dengan menjadwalkan pengawasan rutin di setiap triwulan. Kedua, kinerja akan ditingkatkan dengan melaksanakan pengawasan ke sarana UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang dimulai pada bulan April. Dengan target tiga sarana, pengawasan akan dibagi merata satu sarana per triwulan sepanjang tahun 2025. Untuk indikator kinerja yang realisasinya sesuai target maupun telah melampaui target dan tidak dapat disimpulkan akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya untuk menjaga capaian kinerjanya

Adanya Blokir anggaran dalam rangka Efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Membuat pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja terkendala anggaran adapun Strategi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mencapai target yang ditetapkan dengan anggaran yang tersedia saat ini sebagai berikut:

- a) Memfokuskan anggaran pada kegiatan yang menghasilkan output secara langsung.
- b) Dalam rangka pengelolaan anggaran yang lebih efektif, penting untuk mengelompokkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki kesamaan lokasi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan sumber daya lainnya yang mungkin timbul jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah.
- c) Memastikan target tercapai dengan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil kerja output dan pengeluaran anggaran. Sehingga dapat mendeteksi lebih awal potensi masalah yang bisa menghambat pencapaian target.

Balai Besar POM di Palangka Raya



Lampiran

- Lampiran



Lampiran

A. Perjanjian Kinerja tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI YUDHI HARTANTO

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya  ALI YUDHI HARTANTO	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  TARUNA IKRAR
--	--

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8
		03 - Jumlah desa pangan aman	3

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPQB pangan olahan	82,8 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 02 - Nilai AKIP UPT BPOM 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	87,63 83,87 5 3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 22.128.308.000 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12.026.074.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.102.234.000

Palangka Raya, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Palangka Raya


ALI YUDHI HARTANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

B. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	768,855,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000
		04 - Persentase sampel KLS keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37,842,000
		05 - Persentase sampel PRT bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	204,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	62	64	66	70	72	74	76	78	80	82	84	51,722,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	10,344,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	10,344,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	163,552,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	163,552,750
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	23,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dilaksanakan sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan diinspeksi sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,208,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.5	69.5	69.5	71	71	71	72	72	72	72.5	7,479,574,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	87.19	372,628,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	5	35	35	35	70	70	70	75	80	8	344,372,000
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	5	50	60	70	70	70	70	80	100	3	501,455,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		5	5	25	60	70	100	100	100	100	100	1	137,071,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	8.5	19	29.5	29.5	55	65	78	85.5	90.5	96.5	82.8	43,762,000
6.	06 - Terlaksananya Perindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		5	18	28	33	39	52	62	67	72	85	96	358,335,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	72,439,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Wilayah kerja UPT														
8.	06 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	145,537,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87,83	9,001,834,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83,87	83,990,550
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,867,427,650
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	134,881,300
Total															22,125,308,000

Palangka Raya, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya


ALI YULHA HARTANTO

C. Pengukuran Capaian Output triwulan 1 tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target Triwulan 1	Realisasi sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1	Pagu Tahun 2025	Target Anggaran Triwulan 1	Realisasi Anggaran sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1
a	b	c	d	e	$f = (e/c) \times 100$	$g = (e/d) \times 100$	h	i	j	$k = (j/h) \times 100$	$l = (j/i) \times 100$
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	3	21.43	100.00	72,439,000	100,000	100,000	0.14	100.00
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	510	182	182	35.69	100.00	145,537,000	200,000	200,000	0.14	100.00
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	541	318	318	58.78	100.00	193,733,000	19,755,000	19,755,000	10.20	100.00
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT*	1	30.77%	30.77%	30.77	100.00	736,000,000	17,681,873	17,681,873	2.40	100.00
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	25	6	6	24.00	100.00	78,895,000	2,281,600	2,281,600	2.89	100.00
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia*	1	83.33%	83.33%	83.33	100.00	150,000,000	119,500,000	119,500,000	79.67	100.00

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target Triwulan 1	Realisasi sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1	Pagu Tahun 2025	Target Anggaran Triwulan 1	Realisasi Anggaran sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1
a	b	c	d	e	$f = (e/c) \times 100$	$g = (e/d) \times 100$	h	i	j	$k = (j/h) \times 100$	$l = (j/i) \times 100$
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	8	100.00	100.00	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	25.39%	25.39%	25.39	100.00	1,707,506,000	1,239,900	1,239,900	0.07	100.00
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	3	1	1	33.33	100.00	358,335,000	27,047,000	27,047,000	7.55	100.00
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman*	8	5.00%	5.00%	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	100.00	344,372,000	100,000	100,000	0.03	100.00
11	QDB.002 Desa Pangan Aman*	3	5.00%	5.00%	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	100.00	501,455,000	0	0	0.00	Belum ada target bulan ini
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya*	1	5.00%	5.00%	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	100.00	137,071,000	0	0	0.00	Belum ada target bulan ini
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan	45	0	0	0.00	Belum ada	41,950,000	0	0	0.00	Belum ada

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target Triwulan 1	Realisasi sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1	Pagu Tahun 2025	Target Anggaran Triwulan 1	Realisasi Anggaran sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1
a	b	c	d	e	$f = (e/c) \times 100$	$g = (e/d) \times 100$	h	i	j	$k = (j/h) \times 100$	$l = (j/i) \times 100$
	(RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans					target bulan ini					target bulan ini
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT*	13	19.00%	21.67%	Tidak dapat dibandingkan karena satuan berbeda	114.05	43,762,000	0	0	0.00	Belum ada target bulan ini
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	441	51	51	11.56	100.00	447,082,000	15,291,715	15,291,715	3.42	100.00
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	985	56	56	5.69	100.00	768,855,000	11,624,440	11,624,440	1.51	100.00
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26	1	1	3.85	100.00	20,688,000	0	0	0.00	Belum ada target bulan ini
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	1	100.00	100.00	4,208,000	4,208,000	4,208,000	100.00	100.00
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat	336	26	26	7.74	100.00	402,118,000	23,335,000	23,335,000	5.80	100.00

No	Program/ Kegiatan/ Output	Volume					Anggaran				
		Target Tahun 2025	Target Triwulan 1	Realisasi sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1	Pagu Tahun 2025	Target Anggaran Triwulan 1	Realisasi Anggaran sd Triwulan 1	Capaian thd Target Tahunan	Capaian thd Target Triwulan 1
a	b	c	d	e	$f = (e/c) \times 100$	$g = (e/d) \times 100$	h	i	j	$k = (j/h) \times 100$	$l = (j/i) \times 100$
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT										
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice*	1	0	0	0.00	Belum ada target bulan ini	5,772,068,000	0	0	0.00	Belum ada target bulan ini
21	EBA.956 Layanan BMN*	1	8.33%	8.33%	8.33	100.00	8,000,000	107,100	107,100	1.34	100.00
22	EBA.994 Layanan Perkantoran*	1	8.33%	8.33%	8.33	100.00	10,094,234,000	2,287,765,768	2,287,765,768	22.66	100.00

D. Pengukuran Capaian Kinerja triwulan 1 tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran*		
			Target	Realisasi	Capaian	pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25	100	114.61	11,624,440	11,624,440	100.00
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	Belum ada target bulan ini	0	0	Belum ada target bulan ini
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	98.69	116.11	7,645,858	7,645,858	100.00
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	0	0	Belum ada target bulan ini
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.43	109.92	7,645,858	7,645,858	100.00
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	64	72.41	113.14	8,799,000	8,799,000	100.00
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	0	0.00	0	0	Belum ada target bulan ini
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	0	0.00	0	0	Belum ada target bulan ini
		9 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.88	0	0.00	6,540,500	6,540,500	100.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Volume			Anggaran*		
				Target	Realisasi	Capaian	pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c		d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	88.57	110.71	6,540,500	6,540,500	100.00
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88	99.21	112.74	1,455,000	1,455,000	100.00
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	4,208,000	4,208,000	100.00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69.5	75	107.91	1,239,900	1,239,900	100.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	89.83	103.03	22,036,600	22,036,600	100.00
		15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	5	100.00	100,000	100,000	100.00
		16	Jumlah desa pangan aman	5	5	100.00	0	0	Belum ada target bulan ini
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	5	100.00	9,700,000	9,700,000	100.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	19	21.67	114.05	0	0	Belum ada target bulan ini
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	18	33.33	185.17	27,047,000	27,047,000	100.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran*		
			Target	Realisasi	Capaian	pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	100,000	100,000	100.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	Belum ada target bulan ini	200,000	200,000	100.00
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	2,063,659,567	2,063,659,567	100.00
		23 Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	90,000	90,000	100.00
		24 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	461,215,174	461,215,174	100.00
		25 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	Belum ada target bulan ini	90,000	90,000	100.00

E. Pengukuran Capaian efisiensi Output triwulan 1 tahun 2025

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = d/c	f = e -1	g
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
5	BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
6	CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
7	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
8	PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
9	QCD.U32 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM PALANGKA RAYA	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
10	QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
11	QDB.002 Desa Pangan Aman	100.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
12	QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya	100.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
13	QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Belum ada target bulan ini	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
14	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	114.05	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
15	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
16	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)

No	RO	Capaian Output	Capaian Realisasi	Indeks Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = d/c$	$f = e - 1$	g
	Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT					
17	QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
18	QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
19	QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
20	RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Belum ada target bulan ini	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
21	EBA.956 Layanan BMN	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
22	EBA.994 Layanan Perkantoran	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)

F. Pengukuran Capaian efisiensi Kinerja triwulan 1 tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Capaian Realisasi	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	$e = c/d$	$f = e - 1$	g
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.61	100.00	1.15	0.15	100% (efisien)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target bulan ini	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116.11	100.00	1.16	0.16	100% (efisien)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109.92	100.00	1.10	0.10	100% (efisien)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	113.14	100.00	1.13	0.13	100% (efisien)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Capaian Realisasi	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = c/d	f = e-1	g
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	100.00	0.00	-1.00	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110.71	100.00	1.11	0.11	100% (efisien)
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	112.74	100.00	1.13	0.13	100% (efisien)
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	107.91	100.00	1.08	0.08	100% (efisien)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103.03	100.00	1.03	0.03	100% (efisien)
15	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
16	Jumlah desa pangan aman	100.00	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	114.05	Belum ada target bulan ini	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	185.17	100.00	1.85	0.85	88% (efisien)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	100.00	1.00	0.00	100% (efisien)
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada target bulan ini	100.00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100.00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100.00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Capaian Realisasi	Tingkat Efisiensi	Capaian Efisiensi	Kriteria Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e = c/d	f = e-1	g
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100.00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum ada target bulan ini	100.00	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai	Belum dapat dinilai

G. RHPK Indikator Kinerja triwulan 1 tahun 2025

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Januari	87,25	100,00	40,00	#DIV/0!	100,00	80,00
Februari	87,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maret	87,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Penilaian dilakukan diakhir tahun

3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	85,00	48,57	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85,00	76,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,09
Maret	85,00	93,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,69

4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM	Realisasi (%)
Januari	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Februari	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Maret	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!

5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	85,00	100,00	0,00	0,00	100,00	34,29	#DIV/0!	83,57
Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,29	100,00	93,43

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Januari	60,00	69,01	0,00	69,01
Februari	62,00	70,63	0,00	70,63
Maret	64,00	72,41	0,00	72,41

7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Belum dilakukan penilaia di triwulan 1 tahun 2025

9) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Belum dilakukan penilaian di triwulan 1 tahun 2025

10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	1	1	1	20,00	1	1	70,00	1	1	10,00	100,00
Maret	7	7	7	20,00	6	7	60,00	6	7	8,57	88,57

11) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Januari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	98,00
Februari	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,21	98,24
Maret	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,07	99,21

12) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Januari	0	0	1	0,00
Februari	0	0	1	0,00
Maret	100	1	1	100,00

13) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

**LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM**

Unit Kerja : BBPOM di Palangkaraya
Triwulan/Tahun : 1/2025
Tanggal Penilaian : 21 Maret 2025
Nama Tim Penilai : 1. Yustina, S.Si., M.Si.
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	78,1	75,0	69,5	107,9
2.	Standar Peralatan	77,6			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	90			
4.	Standar Metode Terverifikasi	24,1			

14) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

2025	TK EFF KIE : BBPOM PALANGKA RAYA		
TW 1	TARGET TAHUNAN	87,19	JLH RESPONDEN
	INDEKS TATAP MUKA	89,75	64
	INDEKS MEDIA	89,91	19
	TOTAL INDEKS	89,83	83

15) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi
Januari	0					0,00
Februari	5	5,00				5,00
Maret	5	5,00				5,00

16) Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00

17) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Januari	0	0,00					0,00
Februari	5	5,00					5,00
Maret	5	5,00					5,00

18) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	1,00	3,00	0,00	10,00	6,50
Februari	8,67	6,00	20,00	20,00	15,33
Maret	19,17	10,00	22,50	32,50	21,67

19) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Januari	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Februari	3	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	18,33
Maret	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33,33

20) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

**DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Balai Besar POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Aceh							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru							100,00%	75,00%	66,67%
5.	Denpasar							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta							100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura							100,00%	100,00%	83,33%
9.	Kupang							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Mataram							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang							100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya							100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru							100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda							100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang							100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang							100,00%	100,00%	100,00%
22.	Surabaya							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

 Tepat Waktu
 Lewat Waktu

21) Indeks Pelayanan Publik UPT

Penilaian dilakukan diakhir tahun

22) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

23) Nilai AKIP UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

24) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

25) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Penilaian dilakukan diakhir tahun

Laporan KINERJA

Balai Besar POM di Palangka Raya



**Interim
Triwulan 1
2025**



Semua menjadi tanggung jawab kami